



UNIVERSITAS INDONESIA

**GERAKAN SOSIAL-POLITIK KAUM SANGHA
PADA MASA PEMERINTAHAN NGO DINH DIEM
DI VIETNAM SELATAN
(1954 – 1963)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora

oleh

LORENTIUS OKY PRATAMA

0705040282

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

JULI 2011

SURAT PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 21 Juli 2011



(Lorentius Oky Pratama)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

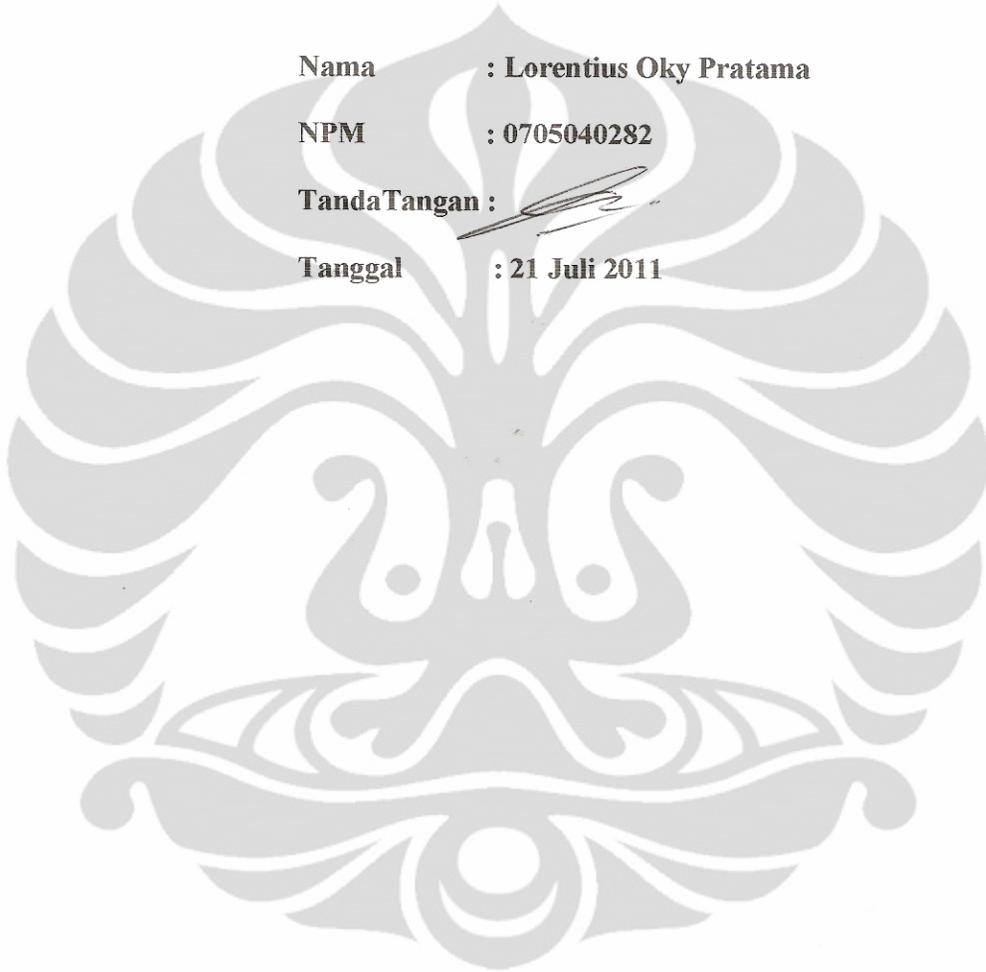
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lorentius Oky Pratama

NPM : 0705040282

TandaTangan : 

Tanggal : 21 Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

nama : Lorentius Oky Pratama
NPM : 0705040282
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Gerakan Sosial-Politik Kaum Sangha pada Masa
Pemerintahan Ngo Dinh Diem di Vietnam Selatan
(1954 – 1963)

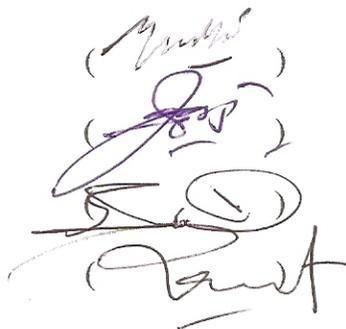
Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Yuda B. Tangkilisan
Penguji : Muhammad Wasith, M.Hum
Pembimbing : Dr. Mohammad Iskandar
Panitera : Abdurakhman, M.Hum

Ditetapkan di : Depok

tanggal : 12 Juli 2011



oleh
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



(Dr. Bambang Wibawarta)
NIP: 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Hormat dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan, karena atas limpahan karunia dan kasih sayang-Nya saya dapat menuntaskan skripsi ini. Penulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil, sangatlah sulit untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Melalui laman ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini:

- 1) Dr. Mohammad Iskandar, selaku dosen pembimbing yang telah bersabar serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya selama penyusunan. Saya minta maaf karena sudah berkali-kali menunda penyusunan
- 2) Yayasan Beasiswa Goodwill International Scholarship, Djarum Bakti Pendidikan dan Indian Women Association, tanpa sokongan dana dan informasi, saya pasti merasa sulit untuk beradaptasi di dunia nyata yang penuh kompetisi ini.
- 3) Ibu Irma Subbag Akademik FIB UI; mbak Titin bagian Administrasi Yayasan IWA; mbak Rossa dan bu Mienh bagian Administrasi Goodwill; mas Hendra Donal, pak Hadi, pak Sachroni (tim kreatif Djarum Bakti Pendidikan); (alm) Ibu Mizue dan suami; kalian semua adalah orang-orang yang hidup di belakang layar, penuh kesabaran dan berdedikasi, penuh kreatifitas dan inovasi yang memberikan saya banyak inspirasi.
- 4) Orang tua saya, J.M, Heru Prasetyo dan E.M. Lilik Suhariyati, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan saya, meski jauh dan jarang bertemu, kalian sering menghubungi dan menanyakan kabar. Sungguh sebuah hiburan yang manis di antara kebosanan menyusun skripsi yang panjang dan lama.

- 5) Adik-adikku, Rizky Dwinanda, Prawenty Destiyani dan Cahyo Satrio Nugroho, maafkan masmu ini yang jarang pulang dan mengajak bercanda. Terima kasih, kalian menjadi satu tujuan saya menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Sahabat satu angkatan, Sejarah 2005; Onal, Dipo, Hendaru, Yossi, Radit, Mprrie, Didi, Nadya, Popon, Yahya, Mike dan Adi, Mizar, Tomo, Azis, Ria, Raisye, Bima, Bayu, Yogi, Hendri, Harry, 'Jablay', Ayu, Sari, Ressa, Ditha, Friska, Herlambang, Aji, (alm)Yasser, di manapun kalian berada, terima kasih sudah menerima dan memahami saya sebagaimana adanya. Setiap dari kalian mempunyai unsur penting yang jadi bagian dari diri saya dan akan teringat selalu.
- 7) Sahabat se-fakultas; Elymart, Moko (Arkeo'2005), Franto, Gabby, Dien, Ivan, Sulaiman, Martin, Friska, Nandang, Adit (Sejarah'2004), Mirza, Yanuar, Inana (Sejarah'2003)
- 8) Pelantun puji-pujian dan rekan satu irama; J.C. Pramudya, Nindy, Kara, Agnes Fabiola, Nico 'Coco', Deli dan pacar.
- 9) Rekan mengajar; Anto Parbulan, Retno Beno, Ika Fera, Ovilia, Imam, Saepudin Mamen, Fauzi, Citra, Adam,
- 10) Christina Ken Maria, terima kasih sudah menjadi teman dan kekasih tempat curahan hati. Kritik dan saran selama penyusunan skripsi yang keluar darimu memang sering menyakitkan, tapi hanya dengan cara itulah saya bisa diingatkan. Semoga kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik.
- 11) Bagi siapapun yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat, saya sekali lagi ucapkan terima kasih.

Penulis juga mengharapkan banyak kritik dan masukan untuk perbaikan penelitian skripsi ini.

Depok, 21 Juli 2011



(Penulis)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lorentius Oky Pratama
NPM : 0705040282
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Gerakan Sosial-Politik Kaum Sangha Pada Masa Pemerintahan Ngo Dinh
Diem di Vietnam Selatan (1954 – 1963)**

Beserta satu keping cakram padat yang berisi karya ilmiah saya dan berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 21 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,



(Lorentius Oky Pratama)

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba memaparkan aksi gerakan Kaum Sangha di Vietnam yang memicu aksi protes dan penggulingan pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem dari kekuasaan. Paparan dimulai dengan menjelaskan pengaruh gagasan pembaharuan Buddhisme dari berbagai negara Buddha terutama China terhadap gerakan Kaum Sangha di Vietnam. Peran Kaum Sangha yang terutama adalah memberikan pencerahan agama kepada setiap orang di manapun berada. Namun pada masa pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem, kebebasan untuk beribadah tidak diberikan kepada penganut Buddha, hanya Katolik yang mendapat tempat utama.

Pada akhirnya penelitian ini mengungkapkan tiga hal. Pertama, Presiden Ngo Dinh Diem tidak memberikan kebebasan beragama kepada penganut Buddha. Kedua, aksi bakar diri Thich Quang Duc pada tahun 1963 memunculkan dukungan dari masyarakat dunia, untuk memaksa Amerika Serikat berlaku keras kepada Ngo Dinh Diem. Ketiga, ketidakpuasan Kaum Sangha terhadap pemerintahan menjadi dasar legitimasi aksi kudeta menggulingkan Ngo Dinh Diem dari kekuasaan.

Kata kunci : Buddhisme, Gerakan, Sangha, Protes, Ngo Dinh Diem, Vietnam

ABSTRACTION

Lorentius Oky Pratama, Sangha's socio-political movement in the era of Ngo Dinh Diem in South Vietnam (1954 – 1963), supervised by Dr. Mohammad Iskandar, Faculty of Humanity, University of Indonesia.

This research tries to explain the Sangha's movement in Vietnam which triggered protest action and down falling Ngo Dinh Diem's authority as a president. The description begins with an explanation about the effect of Chinese-centered Buddhism revival idea on Sangha's movement. The Sangha's main role was giving religious enlightenment to everyone. Unfortunately, religious liberty wasn't given to the Buddhist because of the only priority given to the Catholics.

Ultimately the research reveals of three things. First, Ngo Dinh Diem as a president didn't give freedom worship to the Buddhist. Then, self immolation done by Thich Quang Duc in 1963 had created world supports to have USA determine a harder attitude toward Ngo Dinh Diem. And the last, Sangha's discontentment toward government became legitimation of coup d'état on overthrowing Ngo Dinh Diem's power.

Keyword: Buddhism, Movement, Sangha, Protest, Ngo Dinh Diem, Vietnam

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama berperan dalam tiga kawasan kehidupan manusia. Kawasan pertama adalah kawasan di mana kebutuhan manusiawi dapat dipenuhi dengan kekuatan manusia sendiri. Kawasan kedua meliputi wilayah di mana manusia merasa aman secara moral. Tingkah laku dan tata pergaulan manusia diatur lewat norma-norma rasional yang dibenarkan oleh agama. Kawasan ketiga merupakan daerah di mana manusia secara total mengalami ketidakmampuannya. Hal ini mendorong manusia mencari kekuatan lain di luar dirinya yaitu kekuatan adikodrati.¹

Orang beragama mengharapkan dari agama suatu alasan yang membenarkan keberadaan atau eksistensinya. Bila mereka memegang kekuasaan tertentu. Max Weber mengatakan, agama memberikan legitimasi kekuasaan bagi kelompok penguasa dan orang yang dikuasai. Ia memberi dimensi rohani atau adikodrati kepada lembaga-lembaga yang ada dan memberi makna kepada tuntutan yang berubah-ubah.²

Buddhisme banyak berpengaruh dalam wilayah sosial-politik, psikologi dan ekonomi. Buddhisme merupakan ajaran, agama, keyakinan utama dan dasar identitas sebagian besar masyarakat Asia. Selain itu Buddhisme dianggap ideologi dan sumber nasionalisme. Dalam kaitannya dengan kekuasaan, Buddhisme sering digunakan sebagai dasar legitimasi penguasa maupun gerakan penentangan.³

Di negara Thailand, Kamboja dan Laos, Buddhisme dan negara saling berhubungan erat, meskipun bentuk monarki tidak lagi berlaku di Kamboja dan Laos. Di Kamboja dengan konstitusi tahun 1946 menetapkan Buddhisme sebagai agama resmi negara. Raja Sihanouk mendapatkan kedudukan khusus. Kepala-kepala biara ditunjuk oleh Raja. Saat Sihanouk menjadi biksu di biara

¹Drs. Hendropuspito O.C. *Sosiologi Agama* (Yogyakarta; Kanisius, 1983) 36-37, dalam J.B.

²Sudarmanto, J.B. *Agama dan Ideologi*. Bab 1. Hubungan Agama dan Politik (Kanisius, Yogya. 1987), 18.

³Schechter, Jerrold. *The New Face of Buddha: Buddhism and Political Power in Southeast Asia*, (New York: Coward-McCann, Inc, 1967), xi.

Dhammayuttika, hubungan antara kerajaan dan biara kembali diperkuat. Sihanouk kemudian ditunjuk menjadi kepala Sangha yang memberikan dirinya legitimasi penuh atas pemerintahannya. Saat ia menjadi kepala pemerintahan, Sihanouk mencanangkan gerakan Sosialis Khmer, organisasi politik yang berhaluan Sosialisme. Namun hubungan antara negara dan agama berakhir saat Sihanouk tidak lagi menjabat sebagai kepala Negara.⁴ Buddhisme di Laos situasinya serupa dengan Kamboja, pada tahun 1945, Buddhisme diakui berada dalam perlindungan Raja. Di Tahun 1951, peraturan baru diumumkan, berisi reorganisasi Sangha yang mencantumkan bahwa perihal pendidikan dan penahbisan biksu-biksuni berada dalam pengawasan Menteri Keagamaan. Kepala Sangha di Laos dipilih oleh kepala-kepala biara di tiap wilayah yang berbeda melalui daftar calon yang ditetapkan oleh Menteri Keagamaan. Pada masa 1960-an, saat panasnya Perang Dingin mempengaruhi situasi politik Laos, kaum Sangha memihak kepada Pathet Lao yang berhaluan nasionalis-komunis.

Saat menteri atau petinggi tertentu mencoba berlaku sebagai Raja seperti terjadi dua kali di Burma, Ba Maw pada masa pendudukan Jepang dan U Nu kemudian, mengambil langkah untuk menjadikan Buddhisme sebagai agama nasional. Di negara seperti Burma, di mana kekuasaan kolonial sungguh menekan sistem Monarki, raja kehilangan kuasa untuk melakukan restorasi terhadap Buddhisme. Hingga U Nu muncul sebagai tokoh yang mendukung Buddhisme, praktis tidak ada pihak yang mengusung gagasan keagamaan dalam pemerintahan. Saat U Nu menjabat, Buddhisme dijadikan agama negara dan mendapatkan sokongan penuh dari negara. Bahkan dirinya mendapatkan pendukung dari golongan muda Buddhis (YMBA). Meskipun begitu, U Nu melangkah terlalu jauh dan menganggap dirinya *bodhisatva*, sang Buddha masa depan. Aksinya tersebut membuahkan kudeta dari pihak militer dan mengembalikan Burma menjadi negara sekuler.⁵

Dibagian Negara Buddha yang lain, oleh karena tidak adanya usaha untuk menerapkan sistem monarki kembali, maka maraklah usaha pemisahan agama dan

⁴*Ibid*, 32

⁵Francois Houtart. "Buddhism and Politics in South-East Asia: Part Two" (Social Scientist, Vol. 5, No. 4 (November., 1976)), 31.

negara. Srilangka mengalami kondisi politik yang sama seperti Burma. Pada masa Aung San, segera setelah perang dan pada masa Ne Win sejak 1963, Burma tidak mengakui Buddhisme sebagai bagian dalam politik. Sedangkan di Vietnam yang menganut tradisi Mahayana, tidak pernah muncul protes hingga terjadilah krisis agama di tahun 1963, ketika Thich Tri Quang meminta pengakuan kepada negara agar Buddhism dijadikan agama nasional. Krisis terjadi atas protes terhadap Presiden Katolik Ngo Dinh Diem yang banyak melakukan penyimpangan.⁶

Terlihat bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap Buddhisme di masing-masing tempat, namun satu hal yang sama, setiap penguasa tidak bisa mengabaikan begitu saja keberadaan Buddhisme di sekitar mereka. Richard A. Gard, ahli Buddhisme asal Amerika, menjelaskan bahwa kontribusi penting Buddhisme dalam kehidupan masyarakat Asia terletak pada pembedannya atas spiritualitas seorang raja dan struktur masyarakat yang menyokong Buddhisme.⁷ Kombinasi antara politik dan agama dalam model kepemimpinan di Asia mempunyai catatan sejarah yang panjang. Unsur politik merupakan unsur penting dalam sejarah dan perkembangan ajaran Buddha.

Sepanjang sejarah Buddhisme di Asia Tenggara dan berlaku cukup lama, biksu bertugas melayani sebagai penasihat Raja dengan jalan menafsirkan Dharma, hukum tindakan yang universal, standar perilaku bagi raja agar tetap bertahan. Sesuai dengan ajaran Buddhisme, Buddha-Raja harus mengikuti takdir untuk lepas dari hasrat diri atau ambisi pribadi. Tindakannya harus murni dan terbebas dari pengaruh atau suap. Sangha berperan sebagai pemandu yang mengingatkan Buddha-Raja jika lupa terhadap Dharma.⁸ Hubungan Buddha-Raja dengan Sangha bersifat konsiliatif dan akomodatif.

Selain itu, Gard menegaskan bahwa Buddhisme juga memainkan peranan kuat dalam pengembangan sistem pemerintahan di Asia. Sangha, komunitas biksu dan awam, menjadi pondasi bagi lembaga politik yang sudah ada dan melalui

⁶*Ibid*, 32.

⁷Harold D. Laswell dan Harlan Cleveland, (Ed.), *The Ethic of Power* (New York: Harper & Row, 1962), 53.

⁸Dharma dimaknai sebagai doktrin, aturan, fenomena dan kondisi yang bersifat universal, berlaku bagi semua makhluk hidup. Lebih jelasnya lihat Christmas Humphreys. *A Popular Dictionary of Buddhism*. (Curzon Press: the Buddhist Society, London. 1997). 55.

kunjungan dan ziarah ke negara-negara penganut Buddha lainnya telah menjadi dasar-dasar diplomasi pertama kaum Sangha.⁹

Hubungan antara Buddhisme, Sangha dan kekuasaan sebenarnya sudah berlangsung lama. Sedangkan konsep tentang Buddha dan Raja diambil dari tulisan awal dari India mengenai hubungan agama dan politik. Seluruh cita-cita dan bentuk lahiriah dari kedudukan raja di Asia Tenggara dan terutama dalam kerajaan-kerajaan berkepercayaan Buddha, didasarkan pada konsepsi Chakravartin, yaitu raja jagad raya. Chakravartin dipercaya sebagai pengganti Boddhisatva, yaitu Buddha masa depan, di dunia ini. Seperti Oung Zaya pendiri dinasti di Burma menyebut dirinya sebagai Alaungpaya, Boddhisatva yang ada di Burma. Begitu juga anaknya, Bodawpaya yang mengaku sebagai Boddhisatva Maitreiya, namun disangkal oleh kaum Sangha di Burma.¹⁰

Tanpa memisahkan dengan latarbelakang sebelumnya, terjadi banyak perubahan sejak Perang Dunia II berakhir. masalah utama yang dihadapi Buddhisme dapat dipadatkan dalam dua hal: a) Hubungan antara Buddhisme dan Negara, b) Masalah solidaritas di antara masyarakat Buddhis dengan aliran-aliran yang sangat beragam.

Masalah yang pertama amat tepat diungkapkan oleh U Kyaw Thet: “Dapatkah seorang Buddhis yang memandang semua yang ada ini sebagai tak berguna dan tak pasti mampu melaksanakan tugas berat dan membosankan dari pembangunan?” Inti dari pendapat ini adalah adanya masa baru bagi Buddhisme untuk berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Hal tersebut tidak mudah, karena di satu pihak mereka ingin mempertahankan tradisi Buddhisme, dilain pihak mereka harus mengembangkan tatanan sosial politik baru. Satu usaha yang menyolok dari semua itu adalah upaya untuk meninjau kembali ajaran-ajaran historis Buddha dalam terang pemikiran filsafat modern dan tata sosial baru. Ada

⁹Richard A. Gard. “*Buddhism and Political Authority*” dalam Harrold D. Laswel dan Harland Cleveland. *The Ethics of Power* (New York, Harper & Row, 1962), 47

¹⁰Konsep Chakravartin diadopsi dalam kebudayaan Buddha dan berperan raga duniawi sang Buddha. Buddha-Raja yang berkuasa diberkati dengan simbol kebesaran atau *regalia*: cakram atau roda-roda yang melambangkan hukum, gajah putih, kuda putih, perhiasan ajaib, seorang ratu, menteri keuangan dan jenderal atau payung dan mahkota. Lihat Robert Heine Geldern, “Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara” terj. Deliar Noer (Jakarta: C.V. Radjawali, 1982), 23

yang memandang Buddha sebagai seorang rasionalis dan empiris yang mempunyai pandangan evolusionis tentang dunia dan masyarakat. Ada juga yang memandang kembali Buddha sebagai nabi hidup sosial, dan Dharma sebagai ideologi bagi zaman baru. Bagaimanapun juga sayap-sayap modernis merangsang kelahiran baru Buddhisme yang membebaskannya dari kekolotan sosial dan religius. Hal-hal tersebut pada gilirannya akan mengantarkan pendukung-pendukungnya (Sangha) memburu Nirvana bukan sebagai situasi terasing dalam sel-sel monastik, tetapi Nirvana yang terwujud dalam hidup sehari-hari; bukan keselamatan diri yang dilepaskan dari situasi menyeluruh tatanan sosial, tetapi suatu hidup yang penuh pelayanan dan pengorbanan diri. Bahkan kini banyak Buddhis arif yakin bahwa ajaran, kotbah dan etika saja tidak cukup. Struktur politik harus dibuat dalam terang Buddhisme.

Gerakan penentangan kaum Sangha di Vietnam terhadap pemerintahan dimulai sejak 1930-an. Pada saat itu segala usaha dilakukan pemerintah Perancis untuk mengurangi dan membatasi potensi kaum sangha memunculkan penentangan. Terpengaruh gerakan pembaharuan Buddhisme di Cina yang dipimpin oleh biarawan bernama Thai Hu atau Tai Xu, kaum Sangha di Vietnam melakukan gerakan sejenis di negerinya. Pemerintah Perancis yang mengetahui motif gerakan tersebut mengizinkan pembentukan perkumpulan penganut Buddha di tiga tempat yang berbeda di Vietnam. Tujuan utama pemerintah atas pembentukan perkumpulan tak lain untuk menjaring simpati rakyat sekaligus kaum Sangha yang perlahan dimanfaatkan guna membongkar sistem administrasi lama. Setelah simpati diraih dampak lanjutan dari dukungan itu dianggap dapat menegakkan ketaatan religius dan menghambat semangat patriotis yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Di bawah perlindungan Amerika Serikat Diem berencana untuk menyingkirkan ancaman Komunis dari Vietnam. Ia menunjukkan keberhasilan yang luar biasa di awal karir sebagai Presiden dengan upaya konsolidasinya terhadap struktur politik Saigon yang carut-marut. Namun, kebijakan anti-komunisnya sangat keras dan kejam. Dalam rangka mengkonsolidasi kekuasaannya, Diem melakukan taktik adu domba antar kelompok dalam masyarakat; penganut Buddha dengan Katolik, para pengungsi dengan penduduk

asli Vietnam Selatan, Montagnard (penduduk dataran tinggi) dengan penduduk dataran rendah, tentara dengan rakyat sipil, serta pihak pro-Perancis dengan yang pro-Amerika.¹¹Alih-alih meningkatkan popularitasnya di masyarakat, taktiknya malah mempercepat proses disintegrasi Vietnam Selatan yang mengakibatkan kudeta dan ketidakstabilan politik setelah kematiannya. Rekam jejak karier Ngo Dinh Diem makin buruk setelah politik represi yang ia terapkan pada pihak Komunis dan pihak Nasionalis merugikan dirinya.

Sempat Ngo Dinh Diem mendapatkan dukungan dari kaum Sangha karena program politik anti-komunisnya. Dukungan kaum Sangha tersebut berbalik menjadi kekecewaan karena sikap pemerintah yang tidak menghormati kebebasan beragama. Krisis kaum Sangha dengan pemerintahan dimulai pada 8 Mei 1963, saat Ngo Dinh Diem mengeluarkan dekrit berisi larangan pengibaran bendera selain bendera pemerintah. Kemudian terjadi protes besar-besaran menentang dekrit tersebut. Tentara diturunkan untuk membubarkan massa dan berakhir dengan tewasnya banyak orang. Muncul tuntutan-tuntutan atas jatuhnya korban, dua yang terpenting, kompensasi untuk keluarga korban dan permohonan maaf pemerintah di hadapan publik. Sebaliknya, tuntutan itu dianggap penghinaan terhadap pemerintah. Bahkan Tran Le Xuan, istri Ngo Dinh Nhu, ipar Ngo Dinh Diem terang-terangan mencurigai Buddhisme sebagai alat konspirasi Komunis di Vietnam dan mendesak Diem mengabaikan tekanan-tekanan Amerika untuk menghentikan aksi represif terhadap Buddhisme.

Krisis agama silih berganti menjadi krisis politik saat aksi bakar diri yang dilakukan biksu Thich Quang Duc di Saigon memicu aksi protes di seluruh Vietnam. Pemerintah beberapa kali menolak proses konsiliasi dengan kaum Sangha untuk menenangkan keadaan. Ngo Dinh Nhu, pimpinan Pasukan Khusus mengutus anggotanya melakukan penyerangan malam hari ke pagoda dan biara-biara di Vietnam Selatan, mengancam biksu-biksuni yang tinggal di dalamnya. Di akhir bulan Agustus 1963, Nhu berhasil menangkap hampir dari semua biksu-biksuni dan pelajar. Aksi protes yang terjadi kemudian makin bergejolak.

¹¹Lalita Prasad Singh. "Chapter One, Vietnam: The Futility of American Intervention," 7, *Power, Politics and Southeast Asian* (New Delhi, Radiant Publisher, 1979)

Kekuatan baru muncul untuk menentang pemerintah. Agama Buddha sepertinya menjadi pembuka jalan bagi semua kekecewaan terhadap pemerintah, tepat seperti yang dikatakan oleh Halberstam;

“it was in small part Buddhist against Catholic; it was in much larger part the protest of a large segment of the people who happened to be Buddhist against an authoritarian government that happened to be Catholic-dominated.

[terjemahan:]“merupakan sebagian kecil saja Buddhis yang menentang Katolik di Vietnam, lebih besar lagi pihak yang protes dan berpihak pada Buddhisme untuk menentang pemerintah otoriter yang menggunakan Katolik untuk mendominasi.”¹²

Krisis yang terus terjadi tanpa ada konsiliasi perlahan meruntuhkan struktur pemerintahan dan merusak relasi dengan Amerika Serikat. Presiden Kennedy menyatakan secara luas bahwa penggantian rezim di Saigon harus dilakukan. Bantuan Amerika untuk Pasukan Khusus dihentikan Amerika, sekaligus menjadi pertanda bagi para Jenderal untuk melancarkan kudeta yang sudah dirancang beberapa bulan sebelumnya. Pada 2 November 1963, tentara junta yang dipimpin oleh Duong Vanh Minh melancarkan kudeta dan berhasil membunuh Presiden Ngo Dinh Diem dan saudaranya Ngo Dinh Nhu. Kudeta bulan November, meskipun mendapatkan pujian dari sebagian besar masyarakat Vietnam Selatan, tidak sepenuhnya didukung oleh golongan militer yang bersimpati kepada Buddhisme. Sebagian dari mereka menggunakan Buddhisme semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan.¹³

Penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Sangha dalam lingkup sosial-politik pada masa Ngo Dinh Diem. Dengan ditinjau dari perspektif historis dan ideologis, dan mengacu pada kejadian-kejadian disekitar tahun 1954-1963, akan ditarik dua hal penting yang terjadi dengan kaitannya terhadap gerakan protes kaum sangha.

1.2. Perumusan Masalah

¹²Lalita Prasad, *Op.Cit*, 9.

¹³*Ibid*, 10.

Bahasan penelitian akan mencakup *diskriminasi dan pengurangan hak-hak kaum sangha dan penganut Buddha di Vietnam Selatan dalam kehidupan beragama; dan kebijakan politik Presiden Ngo Dinh Diem yang telah menyebabkan kesenjangan sosial-politik antara masyarakat, pemerintah dan agama*. Dua hal itu merupakan faktor penting yang mempunyai kaitan erat dengan penentangan kaum sangha yang memuncak pada tahun 1963. Dua hal tersebut juga menjadi pijakan analisis tentang bentuk gerakan sosial-politik Sangha yang dibedakan dengan periode kolonial.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini ialah latarbelakang Buddhisme di Vietnam Selatan serta perkembangannya pada masa pemerintahan Ngo Dinh Diem, 1954-1963. Kajian mengenai gerakan ini difokuskan terhadap permasalahannya di bidang keagamaan dan sosial. Untuk itu penyelidikan atas peristiwa-peristiwa serta penjabaran permasalahan tersebut akan dipandu melalui pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana Buddhisme dan Sangha menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat Vietnam?
2. Bagaimana perspektif dan tindakan Kaum Sangha terhadap presiden Ngo Dinh Diem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini berupaya merekonstruksi gerakan-gerakan kaum Sangha di Vietnam, kelompok tarekat Buddhisme, sebagai suatu sejarah sosial-keagamaan yang bersifat regional kawasan. Penulis berusaha untuk mengarahkan bagaimana kaum Sangha yang berada di Vietnam mendapatkan pengaruhnya dari luar dan bersinergi dengan perubahan yang ada.

Untuk itu haruslah dipahami terlebih dahulu kondisi wilayah dimana Sangha suatu ordo tersebut tumbuh dan berkembang, yaitu Vietnam Selatan. Tinjauan terhadap kondisi-kondisi yang relevan dengan pokok permasalahan ialah mengenai keadaan geografis, sosial-budaya dan gerakan-gerakan keagamaan pada umumnya.

Vietnam merupakan wilayah yang penduduknya terdiri atas beragam etnis dengan struktur sosial kemasyarakatan yang bermacam-macam. Oleh karena itu pemahaman tentang sosial-politik lebih diarahkan pada permasalahannya mengenai tradisi dan istiadat dari etnis-etnis tersebut, sedangkan keagamaannya atas kelompok-kelompok keagamaan yang ada di masyarakat bersangkutan dibahas secara umum. Semua kondisi tersebut terutama ditinjau dalam konteks kesejarahannya pada awal pertumbuhan Buddhisme di Vietnam.

Sebagaimana telah menjadi watak suatu tarekat Buddhisme, bahwa keabsahan tarekat Buddhisme aliran Dhyana di Vietnam tunduk kepada pertalian spiritual (silsilah) biksu ke biksu sampai kepada Buddha. Dalam hal ini, pelacakan atas asal-usul tarekat perlu diletakkan persoalannya pada latar historis dan mata rantai persebaran gagasan Buddhisme di Vietnam. Persoalan selanjutnya mengenai penyebaran tarekat di Vietnam, siapa saja yang berperan dan di daerah mana saja pusat penyebarannya akan dibahas dalam skripsi ini untuk melihat posisi tarekat baik dalam sejarah tarekat yang sama pada suatu kawasan tertentu (Vietnam Tengah) maupun keadaan dalam perkembangannya paling akhir.

Di dalam gerakan-gerakan penting yang akan dibahas nanti kaum elit dari kelompok intelektual, atau Sangha terpelajar memainkan peranan sesuai sesuai gerakan yang dipelopori kepala biksu (Sangha intelektual tradisional) di bidang politik, sosial dan pendidikan.

Dalam menganalisa arah kebijakan kaum Sangha terhadap Pemerintahan Ngo Dinh Diem, penulis sangat menyadari akan adanya aspek-aspek terkait baik secara langsung maupun tak langsung dengan inti pembahasan ini. Oleh karena itu penulis hanya membatasi pada dua aspek, sosial dan politik. Selain itu penulis juga menginsafi bahwa terdapat kata, frasa maupun konsep yang berpengertian sangat luas, seperti halnya Buddhisme, konsep perubahan sosial-politik, kaum sangha dan gerakan.

Dalam pembahasan, penulis akan memaparkan mengenai proses integrasi yang terjadi dalam Sangha di Vietnam. Perbedaan tindakan karena aliran yang berbeda menyebabkan setiap wilayah mempunyai respon berbeda terhadap situasi sosial-politik yang terjadi di awal masa pembaharuan Buddhisme di

Vietnam. Proses integrasi yang terjadi menurut hemat penulis dipicu oleh faktor internal dan eksternal.

Lingkup waktu studi (*temporal*) dalam tulisan ini dimulai sejak gerakan pembaharuan Buddhisme yang terjadi di Vietnam pada tahun 1920-an hingga terjadinya kudeta terhadap presiden Ngo Dinh Diem, November 1963. Meskipun proses pembaharuan dimulai sejak 1920-an, gerakan kaum Sangha dibedakan dengan masa awalnya saat Ngo Dinh Diem mulai berkuasa. Di awal tahun 1920-an, kaum Sangha mengalami masa *status quo* di bawah Perancis, bahkan oleh Jepang pada masa PD II. Setelah berakhirnya masa kolonial dan terbaginya Vietnam menjadi dua bagian, kaum Sangha menghadapi jenis tantangan baru; arus pengungsi Katolik ke Vietnam Selatan, kebijakan reformasi tanah dan terlibatnya sekte keagamaan seperti Hoa Hao dan Cao Dai dalam politik, bahkan mempunyai pasukan khusus. Sedangkan lingkup ruang (*spacial*) mengacu pada seluruh Vietnam, meskipun aksi protes menentang Ngo Dinh Diem terpusat di Saigon, Vietnam Selatan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian tentang agama dari perspektif ilmu-ilmu umum berbeda dengan penelitian agama dari sudut pandang ilmu-ilmu agama. Bedanya ialah ilmu-ilmu umum melihat agama dari sudut empirisnya, sedangkan ilmu-ilmu agama melihat dari segi normatifnya. Sebagai penulis yang berlatarbelakang Ilmu Sejarah, sulit untuk memahami sejarah Buddhisme yang secara geografis dan intelektual jauh dari tempat tinggal. Pada awal penelitian disadari oleh penulis, hanya terpusat pada satu dimensi agama, yaitu dimensi konsekuensi sosial. Padahal, dimensi agama ada lima hal, yakni keyakinan (*belief system*), praktik keagamaan, pengetahuan keagamaan, pengalaman keagamaan dan konsekuensi sosial.¹⁴

Untuk studi kali ini, penulis menggunakan model pendekatan sejarah sosial. Selain normatif, agama adalah sebuah institusi sosial. Sebagai institusi sosial inilah agama jadi bahan kajian sejarah, yang ditekankan pada perubahan sosial

¹⁴Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, edisi kedua (PT. Tiara Wacana Yogya; Yogyakarta, 2003), 161.

disekelilingnya. Kuntowijoyo mengarahkan kepada dua model dalam perubahan sosial, yaitu model evolusi sejarah dan model kekuatan sejarah¹⁵. Dalam penelitian kali ini, penulis lebih tertarik menggunakan model evolusi sosial, yang menekankan perubahan birokrasi kaum Sangha dari tradisional menuju kolonial, lalu nasional. Perubahan tersebut secara besar-besaran dipicu oleh munculnya gagasan-gagasan baru Buddhisme dari luar, seperti Taixu dari Cina, atau dr. Ambedkar dari Srilanka.

Sedangkan untuk penulisan akan menggunakan metode ilmu sejarah yang umum digunakan terdiri dari empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Untuk tahap pertama, heuristik dilakukan tinjauan kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber tertulis terbaik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil korespondensi serta analisis terhadap perubahan Buddhisme di berbagai negara termasuk Vietnam, yakni *New Face of Buddhism*, karangan Jerrold Schechter.¹⁶ Untuk sumber lain bertopang banyak pada sumber sekunder yang didapat dari beberapa tempat: yakni perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya; Perpustakaan FISIP (Miriam Budiardjo Resource Center) yang kini kedua perpustakaan tersebut terintegrasikan dalam Perpustakaan Pusat yang baru; Perpustakaan CSIS; Perpustakaan Freedom Institute; buku dan situs digital: jurnal *online* digital (www.jstor.org, www.vietnamvirtualarchive.com); dan beberapa sumber dari internet terkait.

Pada tahap kedua data kemudian diperiksa relevansi, dicermati dan dipilah (kritik) secara ekstern maupun intern. Data yang telah dikumpulkan dalam tahap heuristik dicatat dan dianalisa untuk diselidiki kebenarannya. Dalam tahap ketiga,

¹⁵Kuntowijoyo. *Ibid*, 166. Kuntowijoyo menekankan dua model; pertama, model evolusi sejarah; (1) perubahan birokrasi tradisional, kolonial dan nasional, (2) perubahan kelas pemeluk: kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. (3) perubahan lokasi: desa, kota dan metropolitan, (4) perubahan pendidikan: pesantren, madrasah dan sekolah; kedua, model kekuatan sejarah, (1) agama dan modernisasi, (2) agama dan penetrasi agama lain, (3) agama dan pribadi kreatif, (4) agama dan masyarakat pasca industrial

¹⁶Schechter adalah seorang wartawan dan seorang editor dalam majalah Time-Life China Southeast Asia Bureau yang meliput kematian Thich Quang Duc, lihat Jerrold Schechter. *The New Face of Buddhism: Buddhism and Political Power in Southeast Asia* (New York: Coward-McCann, Inc, 1967), 167.

interpretasi akan dilakukan guna menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dari data yang telah dipilih. Pada tahap terakhir adalah tahap historiografi, yakni penulisan berdasarkan fakta-fakta yang telah dianalisa.

Penulis mengetahui bahwa bahasan karya akademis ini telah banyak dikembangkan dan diteliti oleh banyak pihak, meskipun sejauh ini tidak terdapat pembahasan yang serupa dalam koleksi karya akademis di perpustakaan FIB. Sejauh penelusuran penulis, karya akademis baik yang dipublikasikan atau tidak, yang membahas gerakan sosial politik Kaum Sangha di beberapa negara di Asia Tenggara telah banyak ditulis oleh peneliti barat maupun sejarawan lokal. Permasalahan yang sering diangkat adalah gerakan Kaum Sangha di negara-negara dengan penganut Buddha Theravada. Sedikit sejarawan yang membahas mengenai gerakan kaum Sangha di negara Mahayana. Ada pun masih berkutat pada periode awal kedatangan dan membahas mengenai hubungan Sangha dengan negara.

Ada beberapa sumber utama penulis yang penting untuk dijadikan acuan. Sumber pertama dan kedua adalah jurnal internasional yang dipublikasikan. Jurnal pertama ialah karya Sallie B. King berjudul *They Who Burned Themselves for Peace: Quaker and Buddhist Self-Immolators during the Vietnam War*. Mengacu pada Sallie, apa yang menjadi motif utama bakar diri ialah ideologi normatif yang sudah tertanam lama dalam diri Thich Quang Duch dan biksu-biksu dengan aksi serupa. Ideologi tersebut muncul karena pengaruh Buddhisme China. Dari Sallie, penulis mendapatkan informasi mengenai orientasi dan harapan dari aksi bakar diri Thich Quang Duc. Jurnal kedua ditulis oleh Charles A. Joiner berjudul *South Vietnam's Buddhist Crisis: Organization for Charity, Dissidence, and Unity*. Penulis mendapatkan beberapa acuan dan bacaan lanjutan penting tentang Sangha sebagai organisasi yang berubah dan mengalami penyesuaian. Charles melihat bahwa organisasi Sangha mengalami fragmentasi gerakan dan kesulitan untuk melakukan konsolidasi politik. Informasi ini penting untuk dijelaskan karena dapat dijadikan indikasi adanya perluasan jaringan komunikasi antar tarekat Sangha yang semula terpisah-pisah dan model gerakannya parsial.

Sumber ketiga dan keempat adalah buku yang ditulis oleh Jerrold Schechter, berjudul *The New Face of Buddhism: The Fusion of Religion and Politics in Contemporary Buddhism*. Schechter ialah jurnalis yang menggunakan hasil pengamatan dan sumber tertulis lain. Secara cermat ia menjelaskan posisi Buddhisme di Asia Tenggara dengan Nasionalisme, Komunisme bahkan Demokrasi. Dijelaskan olehnya bahwa tiap negara penganut Buddha menempatkan Buddhisme secara berbeda, diwakili oleh “agen” Buddhisme; biksu, raja, cendekiawan, politisi atau negarawan. Dalam kasus Vietnam, menurut Schechter, Buddhisme menjadi kekuatan ketiga di antara dua kubu Komunisme (DRV) dan Demokrasi (RVN). Penulis mendapat dua informasi penting dari Schechter, bahwa pada masa pemerintahan Ngo Dinh Diem, Buddhisme dianggap mendukung Komunisme. Selain itu, melalui berbagai pernyataan biksu-biksu yang diwawancarai, terlihat bagaimana perspektif mereka terhadap situasi yang terjadi.

Sumber keempat ditulis oleh David Halberstam berjudul *The Making of Quagmire: America and Vietnam During the Kennedy Era*. Sama seperti Schechter, Halberstam juga seorang jurnalis. Secara kronologis, Halberstam menjelaskan arah kebijakan Presiden Kennedy terhadap penyelesaian konflik di Vietnam. Penulis mendapatkan informasi mengenai perspektif Amerika Serikat terhadap kaum Sangha di Vietnam dan peran mereka.

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini terkandung dua tujuan utama. Pertama untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan Diem berkuasa serta implikasi kebijakan sosial-politiknya terhadap proses penyatuan Vietnam seperti direncanakan sesuai isi perjanjian Genewa. Kedua, menjelaskan makna perubahan sosial-politik yang terjadi selama masa pemerintahan Ngo Dinh Diem, dan melihatnya sebagai faktor penting kaum Sangha melakukan aksi protes yang mendorong pelaksanaan kudeta.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab pokok. Bab pertama, yaitu pendahuluan, akan menguraikan kerangka dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi uraian singkat berjudul Buddhisme dan Sangha dalam Sejarah Vietnam yang akan menguraikan tentang perkembangan agama Buddha di Vietnam sebelum dan sesudah Pertemuan Buddhist Se-Dunia di tahun 1950. Akan dijelaskan nanti mengenai keberadaan agama Buddha di tengah masyarakat Vietnam, hubungan agama Buddha dengan agama lainnya, keberadaan agama Buddha bagi bangsa dan Negara, keseharian kaum Sangha dan perubahan gerakan setelah Pertemuan Buddhist Se-Dunia.

Bab ketiga akan menjelaskan mengenai situasi kehidupan beragama di Vietnam pada masa Ngo Dinh Diem. Di dalam bagian ini terdapat beberapa latar belakang yang menjelaskan kondisi politik pada awal pemerintahan hingga akhir masa jabatan Ngo Dinh Diem. Dalam masa pemerintahannya dijelaskan nanti mengenai situasi keagamaan yang terbentuk dan bersinggungan dengan pemerintahan.

Bab keempat berisi pemaparan alasan dan sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya protes kaum Sangha dan umat Buddhist hingga menyebabkan kejatuhan Ngo Dinh Diem.

Bab kelima adalah kesimpulan dan hasil analisis penulis mengenai keseluruhan penelitian.

BAB II

BUDDHISME DAN KAUM SANGHA

DI VIETNAM

2.1. Latarbelakang Geografis, Sosial dan Sistem Kepercayaan di Vietnam

2.1.1. Kondisi Geografis

Daratan Vietnam berbentuk seperti huruf S. Di sebelah utara berbatasan dengan wilayah negara China, di sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam dan laut China Selatan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut China Selatan dan Teluk Tonkin. Di samping bentuk daratan yang menyerupai huruf S, kebanyakan orang Vietnam melihat negara mereka menyerupai seekor *leong*—semacam naga bagi orang Vietnam—yang menghadap ke selatan. Ekor dan kaki belakangnya terletak di daerah *bac* (utara), badannya terletak di daerah *trung* (tengah), kepala dan kaki depannya terletak di daerah *nam* (selatan).¹⁷

Seluruh wilayah Vietnam luasnya 327.000 km² dan mempunyaigaris pantainya lebih dari 2.500 km, dimulai dari Teluk Tonkin sampai Teluk Siam menghadap Laut China Selatan. Selepas perjanjian Geneva tahun 1954, wilayah Vietnam dibagi menjadi dua dengan menetapkan sebagai garis pemisah Lintang Utara 17 derajat. Sebelah selatan Lintang Utara 17 derajat itu menjadi wilayah Republik Vietnam (Selatan) atau disingkat RVN (*Republic of Vietnam*) dan sebelah utaranya menjadi wilayah Republik Demokrasi Vietnam atau disingkat DRV (*Democratic of Republic Vietnam*).

¹⁷St. Munadjat Danusaputro. *Vietnam dalam Perkembangan Astra-Jaya*, cetakan pertama, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1983), 12. Menurut Munadjat, masyarakat Vietnam juga mempunyai pandangan lain mengenai bentuk daratan Vietnam. Ada yang menyamakan dengan bayangan seekor Phoenix, dengan kepala yang juga berada di selatan. Ada juga yang percaya mirip dengan pikulan bambu dengan bakul padi pada masing-masing ujung, diwujudkan oleh Tanah Rendah Mekong di selatan dan Tanah Rendah Song Bo di utara yang saat itu terkenal sebagai lumbung beras Asia Tenggara.

Pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai banyak di temukan di Vietnam. Deret pegunungan dan dataran tinggi di Vietnam di mulai dari sebelah selatan, dataran tinggi yang menjadi anak Pegunungan Himalaya bagian timur, dinamai Pegunungan Annamite yang memanjang hingga ke utara Vietnam. Sungai di Vietnam cukup panjang dan banyak cabangnya. Dua sungai besar Vietnam yang membawa kesuburan yakni sungai Merah di bagian utara dan sungai Mekong di bagian selatan.¹⁸

2.1.2. Kondisi Sosial

Mengenai asal-usul bangsa Vietnam, nenek moyangnya yang asli berasal dari daerah Dong Son di Vietnam Tengah sebelah utara. Mereka adalah bangsa Mongoloid, bercampuran dengan gelombang pengungsi China sekitar Yunan yang hijrah ke arah selatan. Konfu Tse dalam bukunya berjudul *Kinh Le* membedakan bangsa Vietnam dengan China pada ciri fisik; dahi berkeriput (pertanda jeli dan cermat), jari kaki besar (penapak lumpur), berambut pendek dan badan digambari.¹⁹ Bangsa Vietnam sendiri terdiri atas campuran unsur bangsa Champa (suku Khmer), Melayu dan China.

Setiap orang di Vietnam termasuk juga biarawan Buddhis terpecah dan terbagi ke dalam wilayah-wilayah besar di Vietnam yang ditandai juga secara geografis. Sedangkan secara historis, dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar; penduduk Utara atau orang Tonkin (*Tonkinese*), penduduk Tengah atau orang Annam (*Annamese*) dan penduduk Selatan atau orang Cochin China (*Cochin Chinese*). Penduduk Utara terkenal dengan karakternya yang licik, tekun dan pikirannya yang tajam. Mereka juga penuh semangat, halus dan tidak ceroboh serta berbakat untuk memimpin. Bagi mereka yang tinggal di Vietnam Tengah terkenal dengan karakternya, keras kepala dan mempunyai banyak keinginan besar. Mereka membenci, mencintai dan berdoa dengan gairah yang meluap-luap. Mereka mempunyai kehendak yang kuat, dinamis namun kurang menawan

¹⁸ Peta lihat lampiran

¹⁹ *Ibid*, 17.

dibanding penduduk Utara. Secara tradisional mereka tidak sesuai menjadi pebisnis, profesional atau politisi. Pada masa pemerintahan Diem, sebagian besar penduduk Republik Vietnam berasal dari Hue dan beragama Katolik. Penduduk bagian Selatan dianggap lebih sejahtera karena banyak sumber daya alamnya, mereka lebih cepat senang, fleksibel dan sedikit keinginan. Bagian Selatan penduduknya paling sedikit menghasilkan pemimpin. Untuk tradisi dan kekuatan berpusat di bagian Utara dan Tengah.²⁰

Sedangkan dalam struktur sosialnya dapat dibagi menjadi dua kelas: lapisan pertama, diisi oleh militer dengan pangkat rendah, pegawai birokrasi, dan sejumlah kecil pengusaha yang muncul setelah kemerdekaan dan kepergian Perancis; lapisan kedua diisi oleh pegawai eselon tinggi birokrasi, pejabat tinggi militer, pemilik tanah dan pengusaha kaya, profesional seperti dokter dan pengacara serta kaum intelektual. Mobilitas sosial bukanlah karakter masyarakat Vietnam Selatan, dan prasyarat keanggotaan dalam kelas atas setidaknya merupakan kombinasi dari dua dari tiga hal berikut: tingkat kekayaan, keluarga dan pendidikan. Sedangkan sebagian besar masyarakat Vietnam masih hidup dengan mengolah tanah dan kemampuan dasar tradisional—tukang batu atau tukang kayu.²¹

Berlainan dengan lapisan horizontal, masyarakat Vietnam Selatan dikelompokkan atas beberapa kriteria: aspirasi, keberpihakan politik, pekerjaan dan identitas kepentingan lainnya. Secara politis unsur yang paling berpengaruh berasal dari kelompok militer.

2.1.3. Sistem Kepercayaan di Vietnam

Hingga awal abad ke-20, sistem kepercayaan di Vietnam dapat dibedakan dalam beberapa golongan besar; kepercayaan asli (animisme), Konfutsianisme, Buddhisme, Kristen Katolik dan Protestan, Taoisme, Cao Dai dan Hoa

²⁰Schechter, *Ibid*, 162.

²¹George McTurnan Kaihin, (Ed.) *Government and Politics of Southeast Asia*. First published; Ithaca (New York: Cornell University Press, 1959), 346

Hao.²² Sistem kepercayaan di Vietnam terdiri dari atas perpaduan aliran kepercayaan, mencerminkan pengaruh dari banyak kebudayaan. Bentuk kebudayaan awal masyarakat Vietnam terdiri atas tiga sistem kepercayaan: Buddhisme aliran Mahayana, Konfusianisme dan Taoisme. Biku dari India dan China membawa Buddhisme ke Vietnam di awal abad ke-10. Konfusianisme dan Taoisme masuk ke Vietnam setelah penaklukan China. Setelah Vietnam memerdekakan diri dari China di akhir abad ke-11, pihak kerajaan memberikan dukungan resmi kepada tiga sistem kepercayaan tersebut. Namun sejak saat itu, Konfusianisme lebih dianggap sebagai etika sosial daripada agama. Buddhisme dan Taoisme selanjutnya lebih populer di tengah-tengah masyarakat.

Mayoritas masyarakat Vietnam sebagian besar menganut Buddhisme Mahayana. Hanya sebagian kecil dari seluruh penganut aliran itu yang serius mendalami. Agama Katolik Roma yang dibawa oleh misionaris Perancis pada abad ke-17 mempunyai penganut yang sama banyak dengan Taoisme. Sistem kepercayaan lain adalah Hoa Hao dan Cao Dai yang baru lahir di awal abad ke-20. Dua aliran tersebut memadukan unsur kepercayaan Asia dan Eropa. Sedangkan Buddhisme aliran Theravada dianut oleh orang Vietnam suku Khmer yang berada di perbatasan antara Vietnam dan Kamboja.²³

2.2. Buddhisme dan Kaum Sangha dalam Sejarah Vietnam

2.2.1. Buddha, Sangha dan Dharma

Dalam Buddhisme haruslah dipahami tiga unsur yang tidak bisa lepas satu sama lain, bagi penganut Buddha mereka menyebutnya Tiga Permata Buddha, yakni Buddha, Sangha dan Dharma. Unsur yang pertama adalah Buddha. Ia adalah seorang pembaharu sistem keagamaan, Martin Luther dari Asia. Seperti Luther, sang Buddha yang bernama asli Sidharta Gautama. Pada masa hidup Ia

²²*Ibid*, 20.

²³William J. Duiker. "Vietnam," 'Religion System' Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008

banyak mempertanyakan, mengkritik dan mengubah ajaran agama yang ada. Buddha menolak ajaran-ajaran dalam agama Hindu; sistem pelapisan sosial, pengorbanan binatang, kitab suci Weda dan keberadaan Dewa-Dewi. Buddha mengusulkan tentang ajaran kausalitas universal, yakni selalu ada sebab dan akibat, setiap makhluk hidup bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan hidup dalam lingkaran kehidupan yang berulang-ulang. Tidak ada jiwa dalam diri makhluk dan setiap dari mereka akan melalui siklus kelahiran-kematian-terlahir kembali terus-menerus dan berakhir jika dirinya mampu lepas dari nafsu keinginan. Buddhisme atau ajaran Buddha yang terangkum dalam Tripitaka menjelaskan bahwa akhir dari kebahagiaan dan kedamaian adalah Nirvana, Pencerahan atau tujuan tertinggi atas usaha keras Buddha.²⁴

Dalam perkembangannya Buddhisme tersebar ke banyak wilayah di Asia. Terdapat dua aliran utama yakni Buddhisme aliran Hinayana atau biasa disebut Kendaraan Kecil, dan aliran Mahayana atau Kendaraan Besar.²⁵ Untuk Buddhisme aliran Hinayana penganutnya banyak berada di Srilangka (Ceylon), Myanmar (Burma), Thailand (Siam) dan Kamboja. Penganut Buddhisme aliran Mahayana tersebar di Cina, Tibet, Jepang dan Vietnam.²⁶

Unsur kedua adalah Dharma yang agak sulit dijelaskan dengan kata-kata. Edward Conze mendefinisikan Dharma dengan beberapa pengertian dan yang pertama sebagai realitas tertinggi yang satu, kedua sebagai doktrin, kitab suci atau kebenaran, yang ketiga sebagai bentuk kebaikan dan kebajikan. Meskipun sulit dipahami, Conze menekankan bahwa Dharma adalah suatu peristiwa yang tidak bersifat personal, bukan merupakan milik manusia atau pribadi, tetapi hanya berlangsung dengan cara objektifnya sendiri. Peristiwa tersebut dapat tercapai melalui latihan yang tekun mengikuti aturan-aturan.²⁷

²⁴Schechter, Jerrold, *The New Face of Buddha: Buddhism and Political Power in Southeast Asia* (New York: Coward-McCann, Inc, 1967), 1-2.

²⁵Setelah Buddha meninggal, diadakan dua kali pertemuan antara murid-muridnya untuk membicarakan masa depan ajaran Buddha. Detail perbedaan antara Hinayana dan Mahayana akan dijelaskan dalam Bab 2. Lebih jelasnya dapat dibaca, Daisaku Ikeda. *Buddhisme: Falsafah Hidup*, cetakan pertama, Terj. (Jakarta: P.T. Indira dan Intermasa, 1988), 85-103.

²⁶ peta persebaran Buddhisme di benua Asia berada di bagian lampiran

²⁷ Edward Conze. *Sejarah Singkat Agama Buddha* (Indonesia; Karaniya, 2010), 22-23.

Unsur yang terakhir adalah Sangha, dalam bahasa Sansekerta, dikonotasikan sebagai perkumpulan, perhimpunan atau sejumlah orang yang tinggal bersama untuk tujuan tertentu.²⁸ Perlu ditegaskan di sini bahwa perkumpulan ini tidak hanya berisi biksu-biksu saja yang identik dengan biara dan mangkok di tangan. Conze menjelaskan bahwa terdapat dua jenis perkumpulan, yakni terlihat dan tidak. Perkumpulan yang kelihatan adalah biksu dan biksuni yang mematuhi Tiga Permata Buddhisme dan jumlah lebih sedikit dibandingkan kaum awam yang digolongkan dalam perkumpulan tidak terlihat.²⁹

Para biarawan, biksu dan biksuni dan awam sejak semula dipandang sebagai kesatuan yang membentuk masyarakat Buddhis. Saat Sangha diterima sebagai nama resmi masyarakat Buddhis, nama itu menjadi sinonim dengan perkumpulan biarawan karena gejala penekanan hidup monastic pada waktu itu. Namun sekali lagi harus dinggat bahwa istilah Sangha menunjuk pada keseluruhan masyarakat Buddhis.

Keberadaan dan struktur dalam Sangha telah membentuk sejarah agama Buddha, membuatnya merasuk dan mengakar dalam kehidupan negara yang baru lahir, serta menciptakan kebiasaan-kebiasaan serta ritual-ritual yang menjadikan Buddha sebagai agama lebih dari sekedar sekte kepercayaan³⁰. Sangha adalah sekelompok biarawan (biksu dan biksuni) yang mempunyai hak dan otoritas penuh untuk mempelajari, mengajarkan dan menjaga ajaran Buddha agar tetap terpelihara.³¹ Dalam kehidupan sehari-hari mereka bertanggungjawab untuk memberikan contoh hidup ideal menurut Buddha dengan mengajarkan dan

²⁸ Charles E Prebish. *Varying the Vinaya: Creative Responses to Modernity*, dalam dan Stephen Heine, (Ed.), *Buddhism in the Modern World: Adaptation of an Ancient Tradition* (United Kingdom: Oxford University Press, 2003), 46.

²⁹ Perbedaan antara dua kelompok ini sangat penting bagi teori Buddha. Mereka dipercaya mendiami dua tataran keberadaan yang berbeda, yang masing-masing disebut sebagai "duniawi" dan melampaui "duniawi". Hanya orang-orang suci yang benar-benar hidup, sedangkan orang-orang duniawi hanya hidup dalam kebingungan. Conze, *Op.Cit.* 24-25.

³⁰ D. N. De L. Young. *The Sangha in Buddhist History* (Religious Studies, Vol. 6, No. 3, Sep., 1970, Publish by Cambridge University Press), 243.

³¹ Mengacu kitab Vinaya atau sutra yang mengatur tentang tata tertib hidup membiara, Sangha terdiri atas biksu (bhikuu/bukan pendeta), biksuni (bhikuuni), dan murid (sravakas); untuk laki-laki disebut Samanera (sramaneri) dan wanita, Samaneri (sramaneri). Dalam lingkup yang lebih luas khususnya pada masa modern saat ini ditambahkan juga pengikut awam yang tidak menetap di biara. Lelakinya disebut Upasaka, dan wanita disebut upasiki. Lihat dr. Richard Gard, "Notes on Buddhism", Mimeographed lecture notes formerly utilized for presentation for American officials ordered to Asia, 15 September 1963, 4.

menerapkannya pada penganut awam. Membangkitkan dan berpartisipasi dalam kegiatan ritual rutin, menawarkan “lahan-lahan kebaikan” yang dapat mereka olah demi peningkatan kondisi spiritualitas. Menyediakan perlindungan melawan serangan jahat serta menjaga keberlangsungan berbagai pelayanan yang dilaksanakan di bermacam waktu dan tempat. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Sangha, biara menerima penghormatan dan bantuan dari penganut awam berupa sedekah, dengan demikian menghasilkan kebaikan yang dapat meningkatkan perasaan memiliki atas diri dan lingkungannya.³²

Sangha yang banyak ditopang oleh biksu dan biksuni merupakan bagian penting dalam tradisi kehidupan beragama di Vietnam. Di kalangan masyarakat pedesaan, mereka berbaur dan memberikan contoh hidup yang sesuai antara sikap dalam kehidupan saat ini dan kepercayaan akan keselamatan di masa depan. Para biksu atau yang juga disebut biarawan menetap dalam biara yang dipimpin seorang Kepala biara (*abbot*), berhubungan dengan rakyat dan raja. Jadi dalam hirarki, biara dan para biksu adalah jembatan antara masyarakat dan raja atau bangsawan. Tidak hanya itu, peranan kaum sangha sungguh nyata terlihat pada masa dinasti Ly dan Tran sekitar tahun 1300-an. Kaum Sangha saat itu dianggap mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta bertugas penting menjembatani hubungan masyarakat-pemerintah. Hal tersebut terlihat jelas dengan adanya pembagian teritorial terhadap kaum sangha. Setiap wilayah mempunyai kepala biksu yang berkuasa dan bertanggungjawab pada sangharaja.³³ Secara keseluruhan kaum Sangha mempunyai pengaruh moral yang besar terhadap masyarakat dan penguasa, pengaruh tersebut terus bertahan hingga beberapa dinasti.

2.2.2. Buddhisme di Vietnam

Populasi di Vietnam Selatan diperkirakan sekitar 16,000,000 jiwa, dengan sepuluh persen penduduknya beragama Katolik. Tiga puluh lima hingga empat

³² Daisaku Ikeda. *Buddhisme: Falsafah Hidup*, cetakan pertama (Jakarta: Pt. Indira dan Intermasa, 1988), 20.

³³ Thich Nhat Hanh. *The Lotus in the Sea of Fire: The Buddhist Story*, edisi pertama (London: SCM Press.,Ltd, 1967), 19.

puluh persen penduduknya menganut agama Buddha aliran Mahayana yang bercampur dengan ajaran Konfusianisme, Taoisme dan Animisme. Hampir seluruh penduduk di bagian Barat dan Selatan menganut aliran Mahayana.³⁴Sebagian kecil penganut Theravada yang menetap di sepanjang perbatasan Vietnam-Kamboja dan berasal dari suku Khmer. Hoa Hao³⁵ dan Cao Dai³⁶ dan sekte kepercayaan lainnya sekitar lima belas persen dari populasi. Dalam survey yang diadakan di Saigon pada tahun 1961 menunjukkan bahwa 83% penduduknya menganut Buddha, 13% menganut Katolik, sisanya mengaku sebagai Konfusian.³⁷

Awal perkembangan ajaran Buddhisme di Vietnam berlangsung sangat lama dan setidaknya dapat dibagi menjadi tiga periode; persebaran awal, puncak kejayaan dan periode masuk pengaruh konfutsianisme. Periode awal ditandai oleh persebaran ajaran Buddha dengan munculnya kaum terpelajar Vietnam yang belajar langsung dari Cina, lalu kembali ke negerinya dan menyesuaikan kembali dengan budaya setempat. Proses persebaran ini berlangsung secara bertahap dan dimulai dahulu di pusat administrasi dan perdagangan. Sekitar abad pertama, Buddhisme dibawa serta oleh misionaris dari India dengan kapal dalam urusan perdagangan. Namun proses persebaran baru benar dimulai pada akhir abad ke-2 di wilayah Jiaozhi, ditandai oleh hadirnya dua orang terpelajar terkemuka, yakni Mou Zi dan Mou Bo (*Mau Thu dan Mau Bac*) yang menetap di sekitar delta Sungai Merah. Persebaran ajaran ini makin meluas setelah Sutra Buddha

³⁴Schechter, *Op.Cit*, 180.

³⁵Hoa Hao atau dieja sebagai wah how adalah sekte militan pecahan dari Buddha Mahayana. Sekte ini didirikan tahun 1939 oleh pemuda pesakitan, Huyn Phu So. Sekte Hoa Hao memercayai penyembuhan melalui doa dan praktis sihir yang dilakukan oleh Phu So. Hoa Hao menentang Perancis dan rezim Diem, serta mempunyai pasukan sendiri. Markas sekte ini berada di Ang Giang, dengan klaim pengikut sebanyak 450,000 jiwa. Pada tahun 1964, pengikutnya mencapai 2,000,000 jiwa

³⁶Cao Dai pertama dibentuk tahun 1926 oleh seorang Vietnam intelektual berpendidikan Perancis, Nguyen Van Chieu, yang berpikir bahwa terdapat hal baik dan buruk dalam semua agama. Van Chieu kemudian melakukan kodifikasi terhadap nilai-nilai baik dari Buddha, Tao, Konfusian dan Kristen. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai rasul mereka adalah Viktor Hugo, Joan of Arc dan Sun Yat Sen. Cao Dai juga dijadikan sebagai sumber nasionalisme Vietnam. Sekte ini melakukan penentangan terhadap Perancis dan Diem. Markas sekte ini berada di provinsi Tay Ninh. Tahun 1966 pengikutnya diperkirakan mencapai 2,000,000 jiwa.

³⁷Center for Vietnamese Studies, Preliminary Report, Profile of the Vietnamese Population, The Saigon Pilot Study (Saigon, April, 1961) dalam Scigliano, Robert, "Vietnam: Politics and Religion", Asian Survey, Vol. 4, No. 1, A Survey of Asia in 1963: part I (Januari.,1964), 666-673.

diterjemahkan ke dalam bahasa Cina oleh Kang Senghui (*Khuong Tang Huoi*). Perlahan dibangunlah beberapa pagoda di salah satu distrik Jiaozhi, Luy Lau dengan tidak kurang dari lima ratus biksu di dalamnya.³⁸ Yi Jing seorang peziarah dari Cina menganggap Luy Lau tidak hanya sebagai *entry point* Vietnam tapi juga pusat administrasi dan tempat ajaran Buddhisme berkembang pesat.

Seiring waktu Jiaozhi mengalami suatu evolusi keagamaan dengan dimulainya perpecahan di Cina. Perpecahan ini berlarut dengan rumitnya masalah politik, yang mengakibatkan dilalaikannya urusan keagamaan. Keadaan itu memberikan kemerdekaan bagi Jiaozhi, sejak abad ke-4 hingga ke-6, mulai tumbuh aliran-aliran baru percabangan dari ajaran Zen di Cina.³⁹ Aliran ini disebut Dhyana, Chan atau Thien dalam bahasa Vietnam. Aliran ini mengajarkan tentang keselamatan yang dapat diraih melalui kebenaran tekstual—penghayatan Sutra ke dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Pendiri aliran Dhyana yang pertama-tama ialah Vinitaruci, seorang India yang keluar dari lapisan sosialnya sebagai Brahmana. Setibanya di Cina ia diterima sebagai murid Seng Chan, seorang kepala biara besar di Hunan. Melalui rekomendasi kepala biara tersebut, Vinitaruci kemudian mendapatkan izin raja untuk membentuk aliran baru. Kemudian ia berpindah ke Canton dan akhirnya menetap di Jiaozhi selama empat belas tahun hingga wafatnya pada tahun 594. Selama masa hidupnya, Vinitaruci telah menyumbangkan aturan dan perintah yang terus digunakan para biksu di Jiaozhi.

Di antara tahanan yang terbawa dalam ekspedisi ke Champa, seorang di antaranya adalah biksu bernama Thao Duong (Cao Tang). Ia dipercaya untuk membantu kepala biara Thang-Long (Ha-Noi). Dengan rekomendasi kepala biara,

³⁸Saat ini distrik tersebut bernama Thuan-Thanh, provinsi Ha Bac

³⁹Aliran atau *School* dalam terminologi Barat, bagaimanapun tidak secara kaku dimaknai sebagai sekumpulan biksu yang terorganisasi ke dalam sebuah biara dengan hierarki, otonomi dan ajaran yang secara khusus berbeda dengan ajaran utamanya. Namun lebih kepada serangkaian tradisi pedagogis yang dihadirkan oleh seorang figur terkemuka. Figur dimaksud mampu mengemukakan sesuatu yang baru dalam suatu ajaran pokok. Hal tersebut juga berlaku pada berkembangnya banyak aliran baru di Vietnam, dengan aliran Dhyana sebagai contohnya.

⁴⁰Sejarawan Vietnam mengacu pada biografi kuno berjudul “Compendium of Eminent Figures of the Chan Garden” (*Thien uyen tap anh ngu luc*), disusun pada masa pemerintahan Dinasti Tran (1226-1400). Ditulis oleh Cf. Tran Van Giap, *Les Chapitres bibliographiques de le Quy Don et de Phan huy chu*, *Bulletin de la Sociee des Etudes Indochinoises*, NS, 13, 1, 1938. Hlm 90, Dalam Nguyen The Anh, *Buddhism and Vietnamese Society throughout History*, 99.

Cao Tang kemudian menetapkan aliran Dhyana yang ketiga dengan banyak anggotanya berasal dari keluarga dan pejabat kerajaan. Doktrin dan istilah ajaran ini mengikuti tren Cina pada masanya. Hampir dari semua figur dalam tradisi Thao Duong tidak banyak berhubungan dengan kebiaraan. Keanggotaan aliran ini lebih didasarkan pada derajat pangkat daripada pencapaian diri melalui kehidupan membiara.

Selama masa ketidakstabilan politik antara akhir abad kesembilan hingga sepuluh komunitas biara bertahan sebagai pusat pendidikan, tempat masyarakat mencari jaminan sosial dan ekonomi. Sebagai akibatnya kedudukan biara yang banyak berperan di pusat beralih ke pinggiran. Tidak lama setelah itu Vietnam lepas dari dinasti Tang, biara berkembang menjadi pusat kebudayaan. Perkembangan Buddhisme pada masa ini banyak terjadi di daerah Hoa Lu, dimana untuk pertama kalinya masyarakat Vietnam memindahkan kerajaannya beserta biksu-biksu terdidik dengan pengetahuan dan bahasa Cina yang baik, terhubung langsung dengan pemerintahan. Biksu yang saat itu berperan sebagai penasihat raja juga mengurus urusan diplomasi dengan Cina. Keadaan ini terus berlangsung hingga tahun 1009.

Periode kedua ditandai dengan kejayaan dinasti Ly, ketika Buddhisme dijadikan sebagai agama negara oleh penguasa-penguasanya. Banyak dari kerabat kerajaan yang menjadi anggota biara. Bahkan para raja melepaskan kekuasaannya menjelang tua dan mengabdikan hidupnya menjadi biksu. Aliran Dhyana pada masa ini dibentuk oleh Vo Ngon Thong (*Wu Yan Thong*) sekitar tahun 820. Ia menetap di kuil Kien So, di desa Phu Dong, beberapa mil sebelah utara Hanoi. Tradisi yang diterapkan Vo Ngon Thong dianggap sebagai bentuk murni Dhyana (*Pure Dhyana*) dan sangat bertolak belakang dengan ajaran sebelumnya yang cukup populer. Aliran Vo Ngon Thong lebih menitikberatkan ajarannya pada meditasi dan pertapaan. Sekte ini kemudian mendapatkan pengakuan dari kerajaan pada tahun 971 dengan ditunjuknya Vo Ngon Thong sebagai kepala biara dengan pemberian gelar *Khuong Viet* atau penjaga dan pelindung Vietnam. Aliran

ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Ly Thai Thong (1028-54), dengan pembangunan seribu kuil dalam lima tahun pemerintahannya.⁴¹

Periode terakhir dimulai sekitar abad ke-15, masa saat Buddhisme mengalami kemunduran dengan peningkatan pengaruh Konfutsianisme. Perlahan-lahan jumlah biksu dibatasi, sarjana-sarjana terpelajar berkurang, keberadaan biksu di beberapa wilayah tidak dapat dijangkau masyarakat karena terbatas jumlahnya. Selain itu ritual yang dilaksanakan pun mulai bercampur dengan hal-hal mistis dan klenik. Meskipun begitu Buddhisme tetap menjadi agama mayoritas yang mempunyai 80 persen dari populasi.⁴²

2.3. Gerakan Pembaharuan Buddhisme

Setelah dinasti Tran berakhir, Buddhisme di Vietnam memasuki masa penurunan popularitas dengan meningkatnya intelektual China dan digunakannya Konfusianisme dan Taoisme dalam sistem pemerintahan. Kemerosotan tersebut terus berlanjut seiring munculnya sekte-sekte baru serta masuknya agama Katolik yang dibawa oleh pemerintahan Kolonial Perancis. Kemerosotan Buddhisme terletak juga pada sedikitnya penerapan ajaran dalam kehidupan sehari-hari serta menurunnya kualitas biksu. Mengacu kepada kesaksian Khanh Van, seorang penganut agama Buddha:

"Some people pretend to be Buddhist monks. Although they claim to be devoted to the cult of Buddha, they believe in superstitions, practice witchcraft, use amulets and secret drugs, and chant incantations to cure diseases. In reality they are capitalizing on the blind beliefs of the ignorant masses in order to enrich themselves. What good can these devil-monks do for Buddhism

[Terjemahan:]“beberapa orang mengaku sebagai biksu Buddha. Meskipun mereka menyatakan devosi atau mengikut ajaran Buddha, mereka percaya pada ketakhyulan, melakukan sihir dan guna-guna, menggunakan jimat, obat-obatan rahasia dan melantunkan mantra untuk menyembuhkan penyakit. Pada kenyataan, mereka memanfaatkan kebutaan masyarakat akan agama dengan tujuan menguntungkan diri. Hal baik apa yang bisa dilakukan biksu demikian untuk Buddhisme”

⁴¹ Nguyen The Anh. “Buddhism and Vietnamese Society Throughout History”. 1993, 100.

⁴²*Ibid*, 102.

Than Quang, juga seorang awam penganut Buddha melihat bahwa sedikit sekali biksu yang tidak memahami Sutra Buddha yang menyebabkan hilangnya integritas biksu dengan masyarakat:

"It is painful for our country when there are monks who profess themselves to be wholeheartedly devoted to the cult of Buddha but pay no attention to learning their prayer books. They conduct religious services for the people in exchange for fat rewards. While they wear Buddhist robes, they behave like common people."⁴³

[terjemahan:]“sangat menyakitkan bagi negara kita saat biksu-biksuni yang seharusnya bertekun sepenuh hati pada ajaran Buddha, tidak menaruh perhatian untuk mempelajari Tripitaka. Mereka bersikap melayani pada masyarakat dengan harapan balasan penghargaan. Saat mereka mengenakan jubah biksu, mereka bersikap seperti orang pada umumnya”

Terlihat bahwa kemerosotan Buddhisme diwakili oleh sikap dan perilaku Sangha yang mulai diabaikan penganutnya. Bentuk kemerosotan meningkat dengan kehadiran sekelompok pihak yang menjauhkan diri (sekte sinkretis) atau menafsirkan secara bebas ajaran Buddha bahkan mencampurkan dengan unsur keagamaan lainnya. Fenomena tersebut paling banyak terjadi di Vietnam Selatan ketika kelompok-kelompok seperti sekte Phat Duong, sekte Minh Su, dan sekte Phat Thay muncul dan berkembang di akhir abad ke-19. Sekte Cao Dai dan Hoa Hao muncul di awal abad ke-20, dua sekte yang sama-sama mengkombinasikan unsur Buddhisme dengan unsur keagamaan lain. Sekte Cao Dai dan sekte-sekte sebelumnya bahkan menjadi pesaing dan dalam beberapa hal mengancam akan menggantikan Buddhisme.⁴⁴

Jika kondisi sosial tersebut tidak segera disikapi, akan menjadi mustahil bagi Buddhisme untuk mendapatkan dukungan massa dalam perubahan yang saat itu sungguh besar terasa. Di lain pihak, faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi domestik Vietnam sedang berlangsung. Di tahun 1920-an, proses pembaharuan Buddhisme yang terjadi di China dan Jepang

⁴³Nguyen Tai Thu, (et.al). *The History of Buddhism in Vietnam*. Institute of Philosophy, Vietnamese Academy Social Sciences, (United States; The Council for Research in Values and Philosophy, 2008), 269.

⁴⁴*Ibid.* 270.

mulai tersebar ke seluruh Asia dan Eropa. Semboyan rakyat China seperti "Revolutionize religious doctrine, revolutionize religious systems, revolutionize the church," mengemuka di mana-mana. Buku-buku keagamaan dan majalah seperti *Hai Trieu Am* serta gagasan-gagasan biksu China bernama Tai Xu mempengaruhi banyak penganut Buddha di Vietnam.

Proses perubahan yang terjadi luar di Vietnam sekaligus membawa Buddhisme bersentuhan dengan nasionalisme. Setiap negara-negara di Asia mempunyai pengalaman sendiri selama masa kolonial. Bahkan Thailand yang sepenuhnya terbebas dari kolonialisme, masih mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari Inggris dan Perancis. Pada akhir masa kolonialisme, para biksu yang berperan sebagai pembawa suluh kebudayaan nasional menghadapi tantangan baru. Setelah kemerdekaan, dengan mulainya pembangunan nasional, tuntutan akan fasilitas dan teknik-teknik baru belum dapat dipenuhi para biksu.⁴⁵

2.3.1. Dari Tai Xu Hingga WFB (World Fellowship Buddhist)

Oleh karena kelangkaan sumber maupun naskah yang menerangkan gerakan Buddhis anti-kolonial selama abad ke-19 di Vietnam, banyak sarjana sejarah tidak mengetahui hubungan pasti antara gerakan anti-kolonial sejak awal dengan gerakan yang berikutnya pada periode 1920-1950-an, yakni gerakan *Chan Hung Phat Giao*. Gerakan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Nhat Hanh (1967), Woodside (1976), dan Mchale (2004) dengan arti "*the Buddhist Revival*." Bagi tokoh gerakan revival di Vietnam, Chan Hung atau kebangkitan dimaknai sebagai pembaharuan melawan politik kolonial yang menindas. Mereka menginginkan kembali kondisi saat Buddhisme mencapai kejayaan di masa lampau, yang pernah terjadi sejak abad ke-11 hingga ke-14, saat Buddhisme tersebar di seluruh wilayah Vietnam, dari pusat kerajaan hingga pedesaan.⁴⁶

Gerakan pembaharuan Buddhisme di China menjadi model utama pembaharuan Buddhisme di Vietnam. Jejak pengaruhnya terlihat pada sebagian

⁴⁵Schechter, *Op.Cit*, 31.

⁴⁶Elise Anne Devido. "The Influence of Chinese Master Tai Xu on Buddhism in Vietnam." *Journal of Global Buddhism*, 10, 2009, 414.

besar teks Buddha di Vietnam ditulis dalam bahasa China, selain itu banyak biara di awal abad ke-20 memberikan pelajaran China klasik. Sejak tahun 1920, biksu pembaharu Buddhisme di Vietnam merevitalisasi agama mereka, sebagian besar diinspirasi oleh “cetak biru” gagasan Tai Xu, biarawan dari China, tentang modernisasi dan sistematisasi pendidikan Sangha dan administrasi Biara. Keseluruhan gagasan Tai Xu disebut sebagai *renjian fojiao* atau dalam bahasa Vietnam *nhan gian phat giao* yang berarti Buddhisme untuk Dunia.⁴⁷ Inti gagasan Tai Xu menekankan tentang pemusatan pendidikan, penerbitan modern, kerja sosial dan pembentukan perkumpulan Buddhis untuk kaum awam.

Gagasan *renjian fojiao* Tai Xu lahir dari situasi China selama masa modern, khususnya setelah Revolusi tahun 1911 yang membentuk pandangan politiknya terhadap Buddhisme. Tai Xu adalah biarawan yang dekat dengan banyak tokoh politik, sekaligus pendukung gerakan nasionalisme Sun Yat Sen. Meski ia tidak pernah ragu terhadap program pembangunan modern yang dicetuskan Sun Yat Sen (1924-1925), ia menyadari bahwa pihak nasionalis masih terhalangi oleh pihak komunis dan pemimpin-pemimpin militer yang korup. Lebih jauh lagi ia meyakini bahwa semua ideologi politik; Sosialisme, Fasisme atau Demokrasi hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan cenderung menyokong eksploitasi terhadap sesama dan tidak dapat dihindarkan terjadinya konflik dan perang. Tai Xu menyimpulkan bahwa Buddhisme merupakan jalan untuk mencapai perdamaian serta stabilitas di China dan dunia dengan melakukan perubahan secara efektif terhadap cara berpikir individu hingga tingkat nasional. Ia berhasil menanamkan gagasan tentang Buddhisme Humanis di kalangan masyarakat Cina yang terbelenggu feodalisme. Pada tahun 1929, ia mendirikan sebuah Komunitas Buddhist Cina (*Chinese Buddhist Society*), hingga tahun 1947 komunitas tersebut sudah beranggotakan 4,5 juta orang.⁴⁸

Tai-Xu menekankan karakter Buddhisme yang universal dan mendunia serta berinisiatif memulai kontak dengan penganut Buddha di seluruh Cina, meluas ke negara-negara tetangga, khususnya Srilangka, Thailand dan Jepang. Lembaga-Lembaga Kepemimpinan Sangha banyak dibentuk di berbagai daerah di

⁴⁷*Ibid*, 414.

⁴⁸*Ibid*, 418.

Cina, dengan maksud untuk memulai reformasi terhadap Sangha. Satu cirikhas dalam gerakan revivalisme Tai-Xu ialah penerbitan sejumlah besar Majalah bertemakan Buddhisme yang berisi kajian hermeneutik (penjelasan naskah-naskah Buddha) dan apologetik (bantahan-bantahan terhadap kritik yang diarahkan pada Buddhisme). Hingga tahun 1920 hingga 1935, telah tercetak 58 jenis Majalah. Usaha keras Tai-Xu memperkenalkan Buddhisme di tengah masyarakat Cina membuahkan hasil, sekitar tahun 1930-an, diperkirakan 60-70% warga Cina menganut aliran Tanah Suci (*Pure Land Buddhism*), semacam Zen.⁴⁹

Gagasan-gagasan Tai Xu mengenai gerakan revivalisme banyak tersebar melalui buku dan jurnal-jurnal yang berjudul *Hai Chao Yin* serta beberapa biksu Vietnam yang belajar padanya. Perhatian Tai Xu mengenai maksud pembaharuan dalam Buddhisme luas cakupannya dan terlihat melalui tulisan-tulisannya yang banyak dipublikasikan: Republik dan Buddhisme, Pendidikan agama Buddha bagi anak muda, Buddhisme dan Ilmu Pengetahuan, Kritik agama Buddha terhadap Sosialisme, Demokrasi dan Buddhisme dan masih banyak lagi.

Salahsatu bukti adanya pengaruh Tai Xu di Vietnam terlihat dalam beberapa jurnal agama Buddha yang diterbitkan di Vietnam Utara pada tahun 1937 berjudul *Duoc Tue* (Suluh Kebijaksanaan). Dalam jurnal yang diterbitkan pada 15 Februari 1937, gagasan *renjian fojiao* Tai Xu mulai diperkenalkan.

2.3.2. Pembaharuan Buddhisme di Vietnam

Tujuan dari gerakan pembaharuan adalah mengembalikan ajaran Buddha, menyusun ulang organisasi Sangha dan membangun generasi-generasi biksu terpelajar. Semua tujuan itu dicapai melalui pembentukan asosiasi-asosiasi pelajar Buddhis. Meski program dari perkumpulan berbeda di tiap wilayah, secara umum mereka menaruh perhatian pada penguatan disiplin dan peningkatan kondisi dalam biara, merawat dan memperbaiki pagoda-pagoda tua, mengembangkan fasilitas pendidikan bagi para biksu dan meningkatkan aktifitas pelayanan sosial. Sebuah keputusan penting yang dibuat pada masa ini adalah penggunaan bahasa

⁴⁹*Ibid*, 430

Vietnam dalam penerjemahan teks-teks Tripitaka hingga memicu kemunculan tulisan-tulisan, majalah hingga buku bertemakan Buddhisme. Kemajuan itu benar-benar mendorong persebaran Buddhisme di Vietnam.

Banyak dugaan bahwa pembaharuan Buddhisme di Vietnam bermula di Vietnam Utara karena berdekatan dengan China serta limpahan surat kabar dan buku-buku dari sana. Namun “asal mula gerakan dapat ditemukan di dalam maupun wilayah sekitar Saigon,” terinspirasi dari banyak informasi dan publikasi yang tersebar di Saigon dalam bahasa China, Vietnam (Quoc Ngu) dan Perancis. Pelopor pergerakan Buddhisme di Vietnam seperti Khan Hoa (1877-1947) dan Thien Chieu (1898-1974) memandang bahwa China adalah model utama dalam modernisasi Buddhism.

Fenomena reformasi yang terjadi dalam Buddhisme di Vietnam tidak dilakukan oleh kaum Sangha maupun sarjana dari China melainkan dokter, guru dan aktifis sosial. Mereka melakukan perjalanan ke seluruh Vietnam dan ke Eropa. Mereka berbicara dalam bahasa China dan Perancis. Ambisi yang menyokong mereka melakukan renovasi beranjak pada kepercayaan bahwa meskipun sistem kepercayaan dihapuskan, ilmu pengetahuan saja tidak akan cukup untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Harus ada moralitas yang tetap untuk menyangga dan mempertahankan nilai etis kemanusiaan.

Beberapa intelektual Buddha pada awal abad ke-19 menyatakan bahwa Buddhisme adalah ilmu pengetahuan. Umumnya tokoh pembaharu Buddhisme dekat dengan borjuis demokratis, di mana keduanya memahami pentingnya eksperimen dalam ilmu pengetahuan dan menghargai nilai kebebasan dan kemanusiaan. Keadaan tersebut menjadi dasar re-evaluasi atas nilai budaya lama dan usaha untuk reformasi masyarakat dengan tujuan mengharmoniskan nilai lama dan baru.

Gerakan untuk mendukung pembaharuan tidak menggunakan bahasa dan aksara China, namun menggunakan *quoc ngu*, bahasa Vietnam yang lebih mudah dipahami, mudah dipelajari dan dapat segera dicetak berupa surat berita atau

Universitas Indonesia

majalah.⁵⁰ Para pembaharu Buddha pada zaman tersebut tidak mengungkapkan gagasannya dalam bentuk propaganda keagamaan, namun hipotesis atau dugaan sementara yang bisa didebat dan diperiksa kembali akurasi dan kontradiksinya. Selain membahas mengenai pertanyaan tentang ajaran, kaum intelektual tersebut juga menyuguhkan isu yang fokus kepada hubungan antara Buddhisme, masyarakat, bangsa dan ilmu pengetahuan. Dengan cakupannya yang luas, Buddhisme pun berpotensi dikembangkan ke berbagai macam isu.

Jika sebelumnya pusat pengajaran Buddhisme selalu berpusat di wilayah lereng perbukitan atau pegunungan—seperti sekte Truc Lam yang berlokasi di gunung Yen Tu—mulai berpindah ke pusat penduduk atau kota-kota besar seperti Saigon dan Hanoi. Dengan letaknya yang lebih dekat dengan perkotaan, gerakan pembaharuan diharapkan dapat lebih mempengaruhi banyak orang. Saigon pun menjadi tempat pertama kali publikasi Buddhisme banyak disebar serta menjadi tempat utama pembaharuan.

Pada tahun 1920, biksu Buddha dan pengikutnya mendirikan Perkumpulan *Luc Hoa* di Vietnam Selatan. Tujuan dari perkumpulan ini adalah memperkuat persatuan dan kerjasama di antara penganut Buddha dan non-Buddha untuk memudahkan proses belajar dan beribadah. Perkumpulan tersebut khususnya menaruh perhatian untuk memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok Sangha di negara-negara tetangga di bagian Utara. Dua biksu Khan Hoa dan Thien Chieu, adalah pelopor gagasan terbentuknya perkumpulan ini. Khan Hoa mengunjungi hampir semua pagoda yang ada di Cochinchina. Thien Chieu, disertai dengan beberapa koleganya berkeliling Annam dan Tonkin menyebarkan visi baru perkumpulan *Luc Hoa*. Lebih jauh lagi, mereka juga menyebarkan majalah bertemakan pembaharuan Buddhisme yang berjudul *Phap Am* oleh Khan Hoa dan *Phat Hoa Tan Than Nien* oleh Thien Chieu. Kedua majalah tadi adalah majalah Buddha pertama di Vietnam yang ditulis dan disebar secara periodik dalam bentuk *quoc ngu* atau bahasa Vietnam.⁵¹

⁵⁰*Ibid*, 271.

⁵¹*Ibid*, 272.

Kedua majalah tersebut banyak disebarakan di antara pemuda-pemudi penganut Buddha. Di saat bersamaan *Dong Thap Thoi Bao*, surat kabar harian di Indochina milik Perancis, juga mulai menerbitkan artikel tentang Buddhisme. Sebagai contohnya dalam salahsatu kolom harian tersebut berjudul “*A Summary History of Buddhism*”, memuat tentang asal, sejarah dan isi dari ajaran Buddha. Mengetahui bahwa artikel-artikel tentang Buddhisme itu tidak membahayakan, pihak Perancis tidak menyensornya.

Selagi partisipasi para biksu dalam kehidupan sosial mulai berkembang, bersamaan juga diragukan mengenai kebenaran kemajuan ini dari sudut pandang ajaran. Saat pemerintah Perancis menanyakan motif biksu bergabung dalam bidang sosial-politis, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kelemahan atas Buddhisme karena sedikitnya kontribusi dalam kegiatan sosial-politik dilontarkan oleh Thien Chieu dalam artikel yang dipublikasikan di surat kabar Saigon. Thien Chieu menjelaskan alasan mengapa Buddhisme berkontribusi dalam politik menanggapi, “It is the compassion and the benevolence preached by Buddha (and none other) that incites Buddhist to involve themselves in patriot deeds—terj: Ini adalah kasih sayang dan kebajikan yang diajarkan oleh Sang Buddha (dan tidak ada lainnya) yang menghasut Buddha untuk melibatkan diri dalam tindakan patriotis”. Pada tahun 1929, Thien Chieu melanjutkan agitasinya atas pembaharuan Buddhisme dengan menerbitkan tulisan berjudul *Phat Hoc Tong Yeu* atau Ikhtisar Umum mengenai Buddhisme. Tulisan tersebut berisi terjemahan baru sutra-sutra dan Abhidharma, artikel yang memperkenalkan *Hai Trieu Am* dari Asosiasi Pelajaran Buddhis China dan beberapa esai yang dibuat sendiri oleh Thien Chieu. Para biksu itu memperkenalkan banyak gagasan baru dan mengemukakan posisi Buddhisme situasi masa kolonial yang masih berlangsung di Vietnam:

"Those who are simple slaves to convention rely not on their own power, but on the power of others. Those who think that success and failure, happiness and sadness are not created by themselves but determined by

some divine force will never fully grasp Buddhist theory. They will become wicked, hurt the faith and contribute to its downfall. Alas".⁵²

[Terjemahan:]“Mereka yang terbiasa pada kesepakatan tidak bersandar padakekuatan mereka sendiri, tetapi pada kekuatan orang lain. Mereka yang berpikir bahwa kesuksesan dan kegagalan, kebahagiaan dan kesedihan tidak diciptakan oleh diri mereka sendiri tetapi ditentukan oleh beberapa kekuatan ilahi tidak akan pernah sepenuhnya memahami teori Buddhis.Mereka akan menjadi jahat, menyakiti iman dan berkontribusi untuk kejatuhannya. Sayang”

Antara tahun 1929 hingga 1932, beberapa resensi buku bertemakan Buddhisme muncul dalam beberapa harian; *Dong Thap Toi Bao*, *Trung Lap* (Jalan Tengah), *Than Chung* (Bel Kudus) dan *Duoc Nha Nam* (Suluh Selatan). Semua tulisan-tulisan tersebut ditulis biksu garda depan, menurut Thai Tu hal ini mempunyai dampak yang luas dengan munculnya organisasi Buddha yang aktif, besar dan permanen di Vietnam. Organisasi yang pertama muncul berupa kelompok pelajar Buddhis di Vietnam bagian selatan, kemudian menyusul di bagian tengah dan utara. Antara tahun 1930 hingga 1933, empat perkumpulan peneliti Buddhis dibentuk di selatan. Tahun 1931, *Hoi Nam Ky Ngien Cuu Phat Hoc* dikepalai oleh delapan biksu berpengaruh termasuk Khan Hoa, Hue Quang dan Tri Thien Chieu didirikan di Saigon, di pagoda Linh Son.

Tran Nguyen Chan juga menjadi salahsatu pimpinan yang berpengaruh bersamaan dengan diterbitkannya majalah berjudul *Tu Bi Am*, perkumpulan tersebut mengirimkan perwakilan untuk mengumpulkan teks-teks Tripitaka dari China. Pada tahun 1931, biarawan Hue Dang membentuk perkumpulan untuk sekte Chan di pagoda Thien Thai, Ba Ria. Untuk menyebarkan ajarannya, perkumpulan itu menerbitkan majalah berjudul *Bat Nha Am*. Tahun 1933 biksu-biksu dari pagoda Long Hoa, provinsi Tra Vinh; pagoda Thien Phuoc dan pagoda Vien Giac, provinsi Ben Tre bekerjasama membangun sekolah untuk mempelajari dan mempraktikkan Buddhisme. Di tahun 1934, perkumpulan Luong Xuyen, sejenis kelompok studi Buddhis dibentuk di provinsi Tra Vinh, memelihara teks-teks Buddha klasik, menyebarkan ajaran dan melatih para biksu. Tahun 1935

⁵² Nguyen Thai Tu, *Op.Cit*,273.

perkumpulan Luong Xuyen kemudian menerbitkan majalah yang berjudul *Duy Tam Phat Hoc*.⁵³

Tahun 1932, perkumpulan pelajar Buddhis di daerah Annam dibentuk di pagoda Tu Quang. Giac Tien, Tam Minh dan Le Dinh Tham ditunjuk untuk memimpin perkumpulan tersebut. Tahun 1933, asosiasi itu mulai menerbitkan tulisan berjudul *Vien Am*. Perkumpulan tersebut juga membentuk sebuah grup yang berkomitmen pada aturan dan etika Buddha seperti “*Popular Buddhist Families*” yang bertugas untuk membimbing dan mengajar kesusastraan, fisik dan moral bagi orang dewasa. Perhimpunan itu juga membuka sekolah kelas dua untuk melatih biksu-biksuni. Setelah itu dibangun lagi sekolah Buddha di pagoda Bao Quoc yang dipindahkan ke biara Tung Lam tu di wilayah Kim Son. Biksu Thich Tri Do menjadi kepala sekolahnya. Sedangkan tahun 1934 dibentuk perkumpulan Buddhisme Vietnam bagian utara (GBANV) di pagoda Quan Su, Hanoi. Tahun 1935, diterbitkan majalah Duoc Tue (Suluh Pencerahan). Selain itu masih ada beberapa majalah yang beredar di Vietnam bagian utara seperti Bo De Tan Thanh dan Tieng Chuong Som. GBANV juga membuka sekolah untuk biksu dan biksuni.

Pendirian perkumpulan, publikasi yang rutin diterbitkan, pengumpulan dan perawatan teks-teks berisi ajaran serta pembukaan sekolah baru menjadi kontribusi Buddhisme yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan berkembang di seluruh wilayah regional Vietnam, baik utara, tengah dan selatan. Keanggotaan di dalam tiap cabang perkumpulan Buddhis makin menjamur. Pada tahun 1935, hanya setahun setelah pembentukannya, perkumpulan Buddhis Vietnam Utara menyatakan diri beranggotakan 2,000 biksu-biksu dan sekitar 10,000 kaum awam. Perkumpulan tersebut dipimpin oleh biksu yang terpilih di antara biksu-biksuni. Di tahun 1937, asosiasi Buddhist Vietnam Tengah sudah beranggotakan 3,000 orang.

Hampir dari semua anggota perkumpulan mengerti dan memahami sejarah dan ajaran Buddha serta menyadari kondisi sosial saat itu. Banyak penganut

⁵³*Ibid*, 274.

Buddha mulai memikirkan kembali sejumlah pertanyaan teoritis mengenai peran Buddhisme di kehidupan nyata. Meskipun Perancis mencegah perkumpulan meluas ke tingkat nasional, berbagai perkumpulan Buddhis berdiri di berbagai tempat secara bertahap berkembang, saling menjalin hubungan, bekerjasama dan berbagi pengalaman.

Saat perkumpulan Buddhis di Vietnam berkembang pesat, perhatian datang dari pemerintah kolonial Perancis. Mereka berharap untuk mengarahkan gerakan yang dibentuk oleh kaum Sangha agar memenuhi kepentingan mereka. Di Vietnam Selatan, gubernur dari Perancis mengutus kolaborator politik, Tran Nguyen Chan untuk mendirikan dan menyetujui perkumpulan Studi Buddhism Vietnam. Cabang perkumpulan tersebut juga dibentuk di Vietnam Utara

Jepang selama masa pendudukannya di Vietnam ditandai dengan toleransi yang diberikan terhadap kegiatan keagamaan termasuk juga Buddhisme sejak awal kedatangan hingga akhir kealahannya. Ketika Jepang kalah, kehadiran Viet Minh telah mengacaukan misi asosiasi yang telah lama dibentuk, yakni pemulihan dan perbaikan lingkungan. Namun pada tahun 1948, para rahib yang tercerai-berai disatukan, dan komunitas Sangha beserta kaum awam dibentuk kembali. Kejadian itu memberi hasil ketika pada tahun 1949 panti asuhan, universitas swasta dan tempat percetakan dibangun di Hanoi, serta kegiatan amal bagi korban perang gencar dilaksanakan. Keadaan yang sama terjadi juga di Hue, Vietnam Tengah. Organisasi penerbitan yang tadinya dibredel dibangun kembali, dan para pengarang serta penerjemah mendapat semangatnya yang baru.

Pada tahun 1951 Perkumpulan Cendekia Buddhis yang baru dibentuk untuk menggantikan perkumpulan sebelumnya karena tidak efektif dan berhenti berfungsi. Perkumpulan yang baru itu didirikan di Saigon. Kemudian pada 6 Mei 1951, Kongres Nasional diadakan di Hue, yang dihadiri 50 delegasi rahib dan kaum awam. Resolusi difokuskan pada penyatuan tiga perkumpulan yang berada di Vietnam utara, tengah dan selatan, dengan pengorganisasian oleh kaum Sangha, penyusunan upacara atau tata ibadah, pengajaran agama bagi orang dewasa dan pembentukan organisasi pemuda penganut Buddhist. Kongres juga mengukuhkan delegasi dari Vietnam Selatan, To Lien, sebagai perwakilan

Organisasi Buddhist Dunia, *World Fellowship Buddhist* atau disingkat WFB yang dibentuk pada Kongres Dunia pertama di Kolombo, 25 Mei 1950.⁵⁴ Pada tahun 1952, ketika relik sang Buddha dibawa untuk kegiatan Kongres Buddhist Dunia kedua di Tokyo, menetap selama 24 jam di Saigon, oleh karena itu diadakanlah upacara khusus yang dihadiri sekitar 50.000 penganut, dan dilakukan selama enam hari.

Seiring dengan konstelasi politik dunia yang sedang memanas, kondisi Vietnam makin dikeruhkan dengan usainya kekuasaan Perancis yang ditandai dengan kejatuhan Benteng Dien Bien Phu. Konferensi Geneva yang diadakan di Swiss diadakan se usai kekalahan Perancis. Konferensi tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yang salahsatunya menetapkan tentang pemisahan Vietnam menjadi dua wilayah. Pemisahan tersebut diharapkan usai dengan diselenggarakannya pemilihan umum dua tahun kemudian.⁵⁵ Namun pemilihan umum itu terhambat dengan agenda politik Ngo Dinh Diem, pemimpin baru Republik Vietnam Selatan.

Kebimbangan kaum Sangha dimaknai sebagai sebuah dilema oleh Thich Nhat Hanh.⁵⁶ dalam perspektif mereka atas keterlibatan Vietnam dalam konstelasi politik dunia, terlebih selepas kekalahan fasisme. Kaum Sangha menyadari bahwa saat itu terdapat banyak kepentingan politik yang melanda Vietnam. Kaum Sangha melihat Vietnam berada di antara persaingan tiga negara besar yakni Uni Soviet dan Cina yang berideologi komunis, dan Amerika yang menganut kapitalisme. Di lain pihak ketiga negara tersebut menilai penting bahwa kestabilan politik dunia harus bertumpu pada satu poros ideologi. Menyadari hal tersebut

⁵⁴WFB masih bertahan hingga saat ini dengan beranggotakan 200 perwakilan dari 27 Negara dari Asia, Eropa dan Amerika. Organisasi ini muncul berkat gagasan dari G.P. Malalasekera, seorang duta besar Srilanka untuk Soviet. WFB kemudian menetapkan 5 tujuan dan 8 misi organisasi ini. Lebih jelasnya, lihat catatan Sunao Miyabara, *A History of the World Fellowship Buddhist 1950-1990*, dalam Lee Chi Ran. *“World Peace Movement Through WFB Activities and Engagement”* 2007

⁵⁵Isi kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian Geneva, yang diadakan pada 20-21 Juli 1954, dan berhasil menghasilkan enam butir kesepakatan. Lebih jelasnya lihat Verbatim Record of the Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indochina, 21 July 1954, dalam Lalita Prasad Singh, *Power Politic and Southeast Asia*, (New Delhi: Radiant Publisher, 1979), hal. 178-184, atau kronologisnya dalam George McTurnan Kahin (ed.), *Government and Politics of Southeast Asia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1969), 336-338.

⁵⁶Thich Nhat Hanh, *Ibid*, 79.

beragam upaya dilakukan untuk menawarkan ideologi terbaik, dan hal itu terlihat jelas pada penerapan kebijakan luar negeri mereka. Uni Soviet pada masa Nikita Khrushchev, menerapkan kebijakan koeksistensi damai (*peacefulcoexistency policy*) dengan tujuan menyebarkan komunisme seluas-luasnya, jauh berbeda dengan kebijakan politik pendahulunya. Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Harry S. Truman menilai bahwa komunisme adalah ideologi yang bertentangan dengan kapitalisme, maka hampir dari seluruh kebijakan luar negerinya diarahkan untuk melakukan pembendungan atas pengaruh komunisme (*containment policy*).⁵⁷ Berbeda dengan Cina yang digagas oleh Mao, ideologi komunisme lebih tepat dilaksanakan sejalan dengan konsep awalnya, Marxisme-Leninisme, dan ia menuding bahwa revisionisme Khrushchev harus ditanggulangi secepat mungkin.⁵⁸

⁵⁷salah satu tujuan komunisme adalah membatasi kebebasan yang ditegakkan kapitalisme. Pandangan ini muncul sejak masa Presiden Harry S. Truman pada akhir tahun 1940-an, namun baru dilaksanakan pada masa Eisenhower memimpin Amerika. Lihat Lawrence Freedman, *Kennedy's Wars: Berlin, Cuba, Laos and Vietnam*, (New York: Oxford University Press, 2000),13-17.

⁵⁸Lihat pandangan Mao tentang revisionisme Khrushchev dalam Bab VII, Bayangan dan Kenyataan, 58-79, oleh Harrison E. Salisbury, *Perang Mendatang Antara Rusia dan RRT*, terjemahan, (Jakarta: P.T. Kinta, 1971)

BAB III
KONDISI SOSIAL POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN
NGO DINH DIEM

3.1. Kondisi Sosial Politik Vietnam Selatan Pasca-Konferensi Geneva

Hampir satu dekade Diem menjabat presiden, 1954-1963, selama itu pula ia telah membawa Vietnam Selatan jauh berseberangan dengan Vietnam Utara. Pada awal menjabat, ia dihadapkan pada kondisi Vietnam selatan yang sangat kacau dan ruwet karena sepeninggal Raja Bao Dai. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan pemerintahan serta administrasi negara dengan tujuan menertibkan kembali kekacauan dalam negeri yang berbuah stabilitas politik dengan dukungan Amerika.⁵⁹

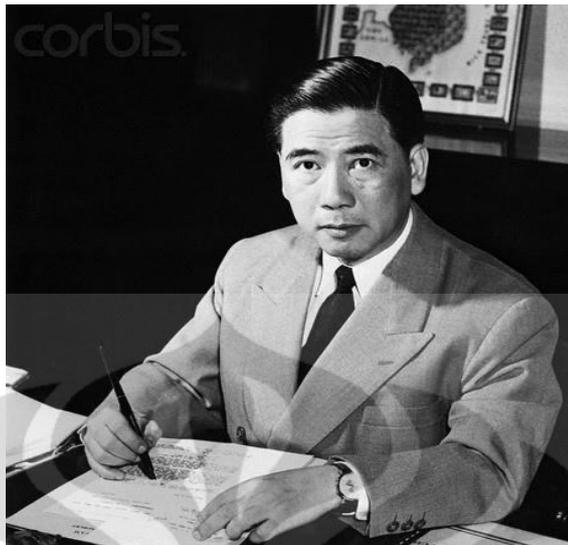
Praktis selama berkuasa ia terpisah dari masyarakatnya tetapi tidak dengan kerabat, uskup, polisi rahasia dan penasihat politiknya dari Amerika. Diem berpikiran bahwa kebijakannya mewujudkan stabilitas, dan hal itu akan tercapai bila secara mendasar masyarakat Vietnam Selatan terbebas dari komunisme dengan menggunakan kerangka ideologi personalisme-nya. Ideologi Diem ditekankan pada penyebarluasan paham demokrasi, membangkitkan nilai dasar konfusianisme serta menganut agama Katolik sebagai agama negara.⁶⁰

Ternyata kestabilan politik dicapai di luar jalur demokrasi. Tidak ada kegiatan yang secara bebas dapat dilakukan di Vietnam Selatan. Organisasi oposisi dilenyapkan, kelompok intelektual yang anti-Diem anggotanya dibunuh atau diasingkan, bilapun selamat mereka melakukan aksi secara diam-diam atau jauh dari pengawasan. Upaya untuk menyebarkan berita juga jauh dari independensi karena tidak ada kritik. Bahkan dalam sidang Dewan Perwakilan tidak diperkenankan untuk mengajukan usulan kepada pemerintah.⁶¹

⁵⁹Lihat Freedman, *Op.Cit*, hlm 307-308, dan Bernard Newman, *Background to Vietnam; From the Japanese Puppet Emperor Bao-Dai to the Viet-Cong's Ho Chi Minh*, (New York: Signet Books, 1966), 114-121.

⁶⁰Newman, *Ibid*, 120.

⁶¹David Halberstam, *The Making of Quagmire: America and Vietnam During the Kennedy Era*, Revised Edition, (United Stated: Alfred A. Knopf, Inc, 1988), 101.



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Gambar 3.1.
Presiden Ngo Dinh Diem

Sedangkan aspek agama Katolik sebagai bagian penting dalam gagasan personalisme Diem, digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi politiknya. Selepas konferensi Genewa, sekitar 700.000 jiwa melakukan migrasi ke Vietnam Selatan karena takut akan bahaya komunisme di Utara. Peristiwa tersebut dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki lemahnya sistem pemerintahan. Segera ia mengangkat para pendatang yang kebanyakan beragama Katolik menjadi bagian dalam pemerintahannya. Mulai dari kepala desa hingga pejabat provinsi, jabatan-jabatan penting dalam militer, hingga beberapa aparat polisi rahasia yang sengaja disiapkan untuk melakukan spionase menganut agama Katolik. Semua pengangkatan itu dilakukan dengan sistematis dan cenderung diskriminatif karena mayoritas masyarakat Vietnam beragama Buddha.⁶²

Agama Buddha yang saat itu menjadi agama mayoritas masyarakat Vietnam, dianggap Diem sebagai potensi yang mendukung keberadaan komunisme.⁶³ Sedangkan kaum sangha melihatnya sebagai seorang pemimpin diktator. Berulang kali anggapan ini terbukti dan muncul dalam pemberitaan dalam

⁶²Halberstam, *Ibid*, 105.

⁶³Jerrold Schecter, *The New Face of Buddha: Buddhism and Political Power in Southeast Asia*, (New York: Coward-McCann, Inc, 1967), 33-38.

surat kabar mereka, terlihat dalam sebuah wawancara dipenghujung akhir masa pemerintahan Diem, tahun 1962;

“Diem wants to unify the country into a Catholic bloc and convert all religious sects and parties to Catholicism. Catholicism in Vietnam is capitalism. The Church is the representative of the government. If you want to be rich and wealthy, if you want to be a high ranking officer, you must be a Catholic”.⁶⁴

[terjemahan:]“Diem ingin untuk menyatukan negara menjadi blok Katolik dan mengkonversi semua sekte keagamaan dan golongan menjadi Katolik. Katolik di Vietnam adalah kapitalisme. Gereja adalah wakil dari pemerintah. Jika Anda ingin menjadi kaya dan sejahtera. Jika Anda ingin menjadi seorang perwira tinggi, Anda harus menjadi seorang penganut Katolik”

3.1.1. Konsolidasi Politik Presiden Ngo Dinh Diem

Di sebuah negara di mana pemerintahannya menggantungkan kontrolnya pada kesetiaan keluarga dan pribadi-pribadi tertentu serta kesetiaan kelompok, dukungan militer nasional merupakan kebutuhan pokok keberlanjutan rezim. Inilah mengapa penaklukan Binh Xuyen⁶⁵ pada tahun 1955 sangat penting. Diem tidak hanya menyingkirkan Binh Xuyen tapi juga memenangkan hati militer. Tentaranya dibayar dengan standar Vietnam, dilatih dan difasilitasi dengan baik.

Suatu waktu dia yakin dengan dukungan penuh militer, Diem menggunakannya untuk melakukan konsolidasi dan memperluas kontrol pemerintah. Dari dua puluh dua gubernur di Vietnam Selatan, pada tahun 1957, empat belas di antaranya dijabat oleh militer, dan sembilan di antaranya merangkap sebagai komandan pasukan wilayah. Para gubernur ditugaskan untuk langsung bertanggungjawab kepada Presiden.⁶⁶

Di awal masa pemerintahannya, Ngo Dinh Diem dihadapkan dengan birokrasi yang tidak efisien bentukan Perancis sebelumnya serta tidak menyukai rezim yang baru. Untuk memperbaiki keadaan, Presiden mengganti semua pejabat

⁶⁴Schechter, *Ibid*, 172.

⁶⁵Sekelompok bandit yang terorganisir dengan baik serta didukung oleh pasukan bersenjata bentukan sendiri.

⁶⁶Kaihin, *Ibid*, 347.

lama dengan pegawai militer dan bagian administrasi yang berasal dari Vietnam Tengah and Utara serta memusatkan kekuasaan kepada kerabat kepercayaan. Di antara semua kerabatnya, Diem mempercayai Ngo Dinh Nhu dan Ngo Dinh Can.⁶⁷

Kesetiaan pribadi pada pemerintah adalah syarat utama menjadi pegawai pemerintahan.⁶⁸ Untuk meningkatkan dukungan dan kinerja birokrasi, pemerintah mengkampanyekan pendidikan politik bagi pegawai-pegawainya, termasuk juga kewajiban mengikuti kelas regular. Untuk meningkatkan control, pemerintah juga memicu terbentuknya Liga Pegawai Sipil Revolusioner (*League of Revolutionary Civil Servants*) yang mengajak semua pegawai negeri sipil berkontribusi dalam pendidikan politik.



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Vietnam, 1957

Gambar 3.2.
Anggota Kabinet Pemerintahan Ngo Dinh Diem.

Meskipun upaya konsolidasi dilakukan, tak pelak Diem tetap berhadapan dengan beberapa pihak yang tidak sejalan dengan kebijakannya, antara lain para

⁶⁷Jumper, "Mandarin Bureaucracy and Politics in South Vietnam" dalam Kahin, 56.

⁶⁸Jumper melaporkan keterangan Presiden Diem: "You cannot be sure of a man unless you know him yourself. When you rely upon the recommendation of a second person, the gates are thrown open to invasion by your opponents--Anda tidak dapat yakin pada seseorang kecuali anda tahu sendiri. Bila Anda mengandalkan rekomendasi dari orang kedua, Anda akan mudah diserang oleh lawan" *Ibid*, 51.

bangsawan, pengusaha sekaligus pemilik tanah. Pihak tersebut dianggap sebagai golongan elit yang sering menghambat pemerintah, khususnya mengenai program reformasi pertanian. Di situ terdapat konflik dasar antara pemerintah dan golongan kaya. Pihak tua atau pendahulu mewakili kondisi *status quo* dalam hal sosial dan ekonomi. Kontras dengan Diem yang berkoar-koar tentang “revolusi”.

Pihak penting setelah golongan elit kaya adalah kaum cerdik pandai yang mempunyai pengaruh politik yang kuat. Meskipun jumlahnya tidak banyak sebagian besar dari mereka cukup loyal kepada Diem dan mempunyai pandangan anti-komunisme.

Lembaga keagamaan menjadi perhatian Diem selanjutnya untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat sekaligus alat kontrol penting bagi pemerintahannya. Namun Buddhisme di Vietnam tidak seperti lembaga yang diperlukan Diem untuk memenuhi tujuan politiknya. Masyarakat Vietnam bahkan tidak menganggap Buddhisme sebagai agama, karena menurut mereka yang mengkombinasikan Buddhisme dengan Taoisme, Konfusianisme dan animisme, urusan agama atau kepercayaan adalah kepentingan individu atau keluarga, dan oleh sebab itu tidak terlalu membutuhkan organisasi formal. Berbeda dengan Katolikisme, agama dengan hierarki organisasi yang bias dimobilisasi untuk kepentingan politik.⁶⁹ Meskipun Gereja Katolik tidak melibatkan diri dalam urusan sekuler, namun pada masa berlangsungnya eksodus pengungsi dari Vietnam Utara selepas Kesepakatan Geneva, gereja sangat aktif dalam kegiatan politis.

Katolik masuk Vietnam diperkenalkan oleh Perancis, karena itulah dapat dipahami bahwa anggota lapisan atas merupakan peralihan agama. Untuk alasan itulah dan karena organisasi gereja di Vietnam Selatan—sangat berbeda dengan Katolik Vietnam Utara—adalah sekelompok kecil golongan yang memiliki potensi politik meskipun jumlahnya hanya empat persen dari populasi Vietnam Selatan. Dua kecenderungan politik muncul di antara penduduk Katolik asli Vietnam Selatan. Sebagai bagian dari kelas pemilik tanah atau pribumi, mereka tidak menyukai pemerintahan Diem dengan alasan finansial.

⁶⁹Kaihin, *Ibid*, 348.

Pengungsi dari Vietnam Utara berarti penting bagi Diem untuk menyokong birokrasinya yang minim personel. Diem berpikir bahwa setelah beberapa waktu yang tak tentu pasca-Kesepakatan Geneva, saat loyalitas militer diragukan, pengungsi adalah satu-satunya kelompok yang akan berkomitmen kepada Diem.

Komunis di Vietnam Selatan merupakan pihak yang patut dipertimbangkan tidak hanya dari segi kekuatan militer namun juga pengaruh politiknya. Selepas Kesepakatan Geneva, isu mengenai kolonialisme tidak lagi mengemuka, pemerintahan Diem pun gencar melakukan propaganda. Meskipun tidak nampak ada ruang gerak bagi komunis di perkotaan, pihak komunis memilih wilayah pedesaan khususnya golongan petani.⁷⁰

Di masa mendatang terlebih pada saat konflik antara komunis dan rezim Diem memanas, kesetiaan politik para petani akan menjadi faktor penting. Kedua belah pihak, Diem dan Komunis, menyadari hal ini dan mulai melakukan perebutan pengaruh terhadap petani di berbagai wilayah pedesaan. Meskipun begitu, menurut Kaihin petani hanya sekedar golongan berbasis kesetiaan tidak mempunyai kontrol seperti birokrasi dan militer.

Di pihak lain golongan pekerja perkotaan atau masyarakat urban proletar hampir sama dengan golongan petani, mereka sasaran komunis dan simpatis terhadap ideologi ini. Hubungan mereka dengan struktur kekuasaan dan proses pemerintahan yang membedakan mereka dengan golongan petani. Hubungan seimbang dibutuhkan untuk menarik simpati golongan pekerja. Diem membentuk Serikat Dagang yang pertama kalinya ada di Vietnam. Melalui organisasi ini Diem bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi pekerja. Secara ketat pemerintah mengawasi organisasi ini, namun pada kenyataannya mereka bekerja dengan standar gaji rendah serta lingkungan kerja yang tidak nyaman. Sejumlah pekerja yang tidak puas dengan mekanisme kerja beralih berpihak kepada Viet Cong.⁷¹

⁷⁰Jumper dalam Kaihin, *Ibid*, 350.

⁷¹Bernard B. Fall. "South Vietnam Internal Problems" dalam *Vietnam Witness 1953-1966*. (London: Pall Mall Press, 1966), 248.

Pada dasarnya perbedaan sosial ekonomi dan kelompok-kelompok yang ada di Vietnam Selatan di bagi menjadi tiga wilayah sesuai identifikasi regionalnya. Secara historis Tonkin dan Annam merupakan pusat kebudayaan awal. Wilayah selatan, yakni Cochin China dianggap sebagai perbatasan dan tidak berbudaya Vietnam oleh penduduk Utara dan Tengah. Identifikasi regional dan pertentangan menjadi karakter relasi masyarakat Vietnam bahkan hingga masa pemerintahan Diem. Pusat pemerintahan Republik Vietnam Selatan berada di Saigon di Selatan, dan kebencian muncul di antara masyarakat Vietnam Selatan karena Presiden dan pejabat pemerintahannya berasal dari Vietnam Tengah dan Utara. Kebencian mereka bertambah lagi mengingat sebagian besar pengungsi dari Utara ditempatkan dalam pemerintahan Diem.

3.1.2. Hubungan Presiden Ngo Dinh Diem dan Lembaga-Lembaga Negara

Sistem pemerintahan yang berlangsung dan beroperasi bagi Republik Vietnam Selatan pada masa pemerintahan Diem mempunyai landasan konsitusi yang diumumkan oleh Presiden Ngo Dinh Diem pada 26 Oktober 1956. Terdapat dua tujuan utama atas pembuatan konstitusi tersebut: memberikan persetujuan resmi atas lembaga pemerintah yang sudah lebih dahulu beroperasi dan memperluas wilayah kekuasaan pemerintah.⁷² Sejak awal konstitusi tersebut memang diarahkan untuk menciptakan stabilitas dan mengisi kekosongan kekuasaan yang hilang setelah Konferensi Geneva.

Konstitusi Republik Vietnam Selatan terdiri atas beberapa pasal: ketentuan dasar, hak dan kewajiban warga negara, Presiden Republik Vietnam Selatan, Dewan Nasional, Kehakiman, Lembaga Peradilan, Dewan Ekonomi Nasional, Mahkamah Konstitusi, amandemen konstitusi dan ketentuan umum.

Ketentuan-ketentuan tentang Presiden tercakup dalam pasal 30 hingga pasal 47. Dijelaskan bahwa Presiden ditetapkan dengan fungsi eksekutifnya dan juga sebagai “pemimpin bangsa”(pasal 3). Masa jabatan Presiden dan wakilnya

⁷²The Constitution of Republic of Vietnam. The Secretariat of State for Information, Saigon-Vietnam, 3.

selama lima tahun dan berhak dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Presiden adalah komandan tertinggi angkatan bersenjata, mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota militer dan pegawai negeri, menunjuk duta besar, memberikan kuasa diplomatik dan mewakili bangsanya dalam hubungan antar-negara. Dengan persetujuan Dewan, Presiden meratifikasi perjanjian internasional, menyatakan perang dan damai. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Nasional dan bisa memberikan veto terhadap semua atau sebagian rancangan lembaga legislatif. Untuk menggagalkan veto diperlukan tiga-perempat suara dari Dewan Nasional. Dalam keadaan darurat, Dewan dapat memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membuat dekrit dengan batas waktu.



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Gambar 3.3.
Rapat Dewan Nasional

Kekuasaan yang dianugerahkan kepada Presiden Diem bahkan lebih luas dibandingkan dengan Presiden Amerika: hal ini terlihat jelas mengenai kontrol anggaran dan kuasa veto terhadap undang-undang maupun menciptakan dekrit di saat genting. Hak untuk mengatur referendum juga bisa menjadi amunisi yang efektif bagi Presiden karena referendum bisa dimanipulasi oleh rezim yang otoriter.

Kekuasaan yang luar biasa dilindungi untuk Presiden pertama, dirancang dalam artikel 96, “President of the Republic who was charged by the people in the referendum of October 23, 1955, with establishing a democratic regime.” Di bawah artikel 98 dituliskan bahwa Presiden juga berkuasa membatasi dan menanggukkan kebebasan rakyat sipil hingga 1 Oktober 1959:

The President of the Republic may decree a temporary suspension of the rights of freedom of circulation and residence, of speech and the press, of assembly and association, and of formation of labor unions and strikes, to meet the legitimate demands of public security and order and of national defense.⁷³

[Terjemahan:]Presiden dapat memutuskan penghentian sementara terhadap hak-hak sirkulasi dan tempat tinggal, berbicara dan pers, berkumpul dan berserikat, dan pembentukan serikat buruh dan pemogokan, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dan pertahanan nasional.

Dewan Nasional terdiri atas utusan daerah terpilih dan menjabat selama tiga tahun. Setiap anggotanya membagi haknya dengan Presiden untuk memperkenalkan Undang-Undang. Mereka juga berhak untuk menolak veto Presiden dan menjadi anggota Mahkamah Konstitusi.⁷⁴

Kaihin menduga bahwa aspek paling kontroversial dalam lembaga legislatif Vietnam Selatan tercakup dalam Artikel 42, yang mengizinkan Dewan Nasional untuk mendelegasikan wewenangnya kepada Presiden ketika situasi genting. Sejak anggota Dewan didominasi pendukung pemerintahan, tidak ada keberagaman suara ataupun pertentangan kehendak yang menandakan masa depan hubungan antara Eksekutif-Legislatif.

Beranjak ke lembaga peradilan, Kaihin berpendapat bahwa independensi dan supremasi tidak dimiliki sepenuhnya oleh lembaga ini, Sistem peradilan telah menjadi boneka bagi pihak eksekutif. Bahkan jaminan terhadap independensi peradilan—periode jabatan dan bebas dari ancaman—tidak ada di dalam konstitusi. Meskipun Presiden mengeluarkan dekrit mengenai independensi dan ketetapan kerja, pada saat bertugas badan peradilan tidak mempunyai keberanian

⁷³Grant dalam Kaihin, *Ibid*, 355.

⁷⁴Mahkamah ini berisi empat anggota Dewan Nasional, empat juri atau ahli hukum yang ditunjuk oleh Presiden dan pemilihan ketuanya yang disertai dengan persetujuan Dewan Nasional.

untuk menangani serta memutuskan suatu masalah yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah.⁷⁵

3.2. Periode Konflik

3.2.1. Pemerintahan Keluarga



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Gambar 3.4.
Presiden dengan Keluarga

Saigon, Vietnam, 1963. Keluarga Presiden dari kiri ke kanan: Ngo Dinh Le Thuy, putri Nhu; Mme. Nhu, Tran Le Xuan, istri Nhu; Uskup Ngo Dinh Thuc; Ngo Dinh Nhu, kepala polisi rahasia; Presiden Ngo Dinh Diem; Ngo Dinh Trac, putra Nhu.

Diem tidak pernah mendelegasikan mandatnya kepada orang lain selain keluarga, dan saat tekanan meningkat karena krisis dengan umat Buddha, Diem hanya mendengarkan nasihat dari Ngo Dinh Nhu adiknya. Ia memercayai bahwa dirinya adalah perantara rakyat dan surga, dan berkuasa karena adanya “mandat dari surga”.⁷⁶ Mistik dan cenderung penyendiri adalah sikap dan kebiasaan Diem.

⁷⁵ *Ibid*, 356.

⁷⁶ Dalam beberapa pernyataannya mengenai hakikat penguasa di Vietnam, “the Confucian mandate of heaven held by the sovereign was revocable only if he proved himself unworthy thereof; the voice of the people was the voice of heaven—Konfusianisme adalah mandat dari langit dipegang oleh Raja dan hanya dibatalkan hanya jika ia membuktikan dirinya tidak pantas di hadapan rakyat; suara rakyat adalah suara dari surga”

Ia sangat meyakini bahwa “campur tangan Tuhan” telah mencegahnya dari empat kali upaya kudeta dan percobaan pembunuhan yang diarahkan kepadanya.⁷⁷

Semenjak realisasi bantuan Amerika tahun 1961, Diem mendelegasikan wewenang lebih pada Nhu untuk merealisasikan gagasan personalisme⁷⁸ menjadi sebuah kebijakan. Personalisme merupakan ideologi dengan kerangka yang luas, namun oleh Nhu ia wujudkan melalui program Dusun Kecil (*Hamlet Strategy*). Program Dusun Kecil sesungguhnya bukan yang pertama, karena merupakan perkembangan dari kebijakan Desa Strategis yang dibuat oleh Inggris di wilayah Malaysia. Skema program tersebut diperkenalkan kepada Nhu oleh Sir Robert G.K. Thompson, penasihat pemerintah Diem dari Inggris.

Salah satu hal yang membuat Nhu bersemangat merupakan pembentukan gerakan organisasi massa di tengah masyarakat Vietnam Selatan untuk mengalahkan Viet Cong. Hal yang paling dibutuhkan menurut Nhu adalah ideologi dan metode. Dengan Personalisme sebagai ideologi, dan Dusun Kecil (*Hamlet Strategy*) sebagai metode, Nhu berharap mampu menciptakan revolusi dan mental gerilya rakyat. Masalah utama Nhu adalah sosialisasi nilai-nilai gerilya yang sulit disampaikan pada masyarakat. Nhu berharap, melalui program Dusun Kecil, rakyat akan mengenali pemerintah dan semakin dekat.⁷⁹

3.2.2. Katolik Versus Buddhisme

Bagi Buddhis Vietnam, agama Katolik adalah jangkar besar yang membuat Perancis dapat berlabuh hingga kemudian menetap dalam waktu lama. Beriringan dengan penanaman kebun karet berkembang menjadi pemerintahan

⁷⁷Schechter, *Op.Cit*, 187.

⁷⁸Personalisme—ideologi yang berusaha untuk mempertemukan dasar ketuhanan dan nilai humanisme Timur dan Barat. Tokoh penggagas dan pemikir filosofi ini adalah Jacques Maritain dan Emmanuel Mouniers, filsuf berkebangsaan Perancis, beserta kelompok *Revue Esprit*-nyayang sangat mempengaruhi Ngo Dinh Nhu. Ideologi yang dikembangkan Nhu dikombinasikan dengan ajaran Konfusian yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu beban kemajuan industri yang disebabkan oleh komunisme dan kapitalisme. Meskipun diunggulkan sebagai “*national formula*”, gagasan Nhu tidak pernah populer di Vietnam Selatan karena sulit kurang dimengerti dan ketidakmampuan keluarga Ngo menerjemahkannya ke dalam tindakan.

⁷⁹Lihat catatan mengenai strategi Hamlet, Notes on Strategic Hamlet, Office of Rural Affair, USOM, Saigon, 15 Agustus 1963

kolonial, Perancis membawa juga roti dan anggur merah perlambang budaya Katolik, berikut juga pemimpin agamanya.

Di bawah kekuasaan Perancis sejak 1860 hingga awal Perang Dunia II, Katolik mengalami supremasi yang sangat signifikan dibandingkan Buddhisme yang mandeg dan tidak berkembang. Buddhisme dicabut dari trinitasnya dengan Konfusianisme dan Taoisme, kombinasi ajaran yang sudah digunakan oleh kaisar-kaisar Vietnam masa lampau. Tidak lagi Buddhisme mendapat sokongan dan prestise dari penguasa karena Perancis telah membatasi dengan ketat jumlah biksu di tiap pagoda selama bercokol di Vietnam. Izin diperlukan untuk mendirikan pagoda baru dan hak pengurus untuk menerima sumbangan dan peninggalan harta waris untuk pagoda dibatasi.

Pada tahun 1920 terjadi gerakan revivalisme yang dilakukan Buddhis di Vietnam Utara, Tengah dan Selatan. Organisasi Buddhis tidak beraktifitas sama sekali saat Perang Dunia II karena Jepang berkuasa. Baru pada tahun 1945 dibentuk Organisasi Buddhis Melawan Kolonialism (*Phat Giao Khan Cien*). Banyak sekali pemimpin Buddhis yang besar pada masa Diem berkuasa; Thich Quang Duc, Thich Thien Minh, Thich Nhat Hanh, Thich Tri Quang dan Thich Tam Chau mengikuti organisasi anti-Perancis ini, yang akhirnya dibubarkan pada tahun 1954 karena janji kemerdekaan atas Perancis terwujud.

Gerakan revival Buddhis Vietnam dimulai lagi Mei 1951 ketika Kongres Buddhis Nasional diadakan, dihadiri oleh lima puluh biksu dan orang awam di Hue. Pertemuan itu membahas rencana re-organisasi Sangha, kodifikasi aturan upacara dan membentuk kelompok Buddhis muda serta pembangunan Pusat Pendidikan Buddhisme.

Selepas konferensi Genewa tahun 1954 dan pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Selatan sepanjang garis tujuh belas derajat paralel, muncul masalah sosial baru. Di awal pemerintahan Diem, Vietnam Selatan kebanjiran pengungsi dari Vietnam Utara yang menghindari dari bahaya komunisme. Jumlah mereka diperkirakan mencapai setengah juta jiwa dan delapan puluh persen dar

pengungsi itu beragama Katolik.⁸⁰ Bantuan dana pertama untuk menolong pengungsi dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam Selatan atas inisiatif Diem. Bantuan dana kemudian datang dari Lembaga Bantuan Internasional Katolik, dengan bantuan pemerintah menyalurkannya kepada gereja-gereja Katolik setempat. Katolik dengan hierarki organisasi yang rapi ditambah dengan bantuan internasional mampu menangani pengungsi lebih baik dibanding komunitas Buddhis yang tidak terorganisasi, anggotanya tersebar dan tidak bisa menjangkau penduduk lokal.

Di masa-masa pengungsi masuk Vietnam Selatan, tersebar isu bahwa mereka yang Katolik akan mendapatkan keistimewaan dan kesempatan kerja dari kelompok berkuasa di Vietnam Selatan. Donald Lancaster melihat situasi tersebut seperti ini:

...was viewed with considerable dismay by the population as the Cochin Chinese, who possess the spontaneity and somewhat reckless temperament which stems from the relatively easy condition of life in the rich and underpopulated Mekong Delta, where afraid that the frugal, hard-working and calculating Northerners would now oust them from the position of profit and power which they regarded as their birthright. Moreover, the religion of the refugees increased the undesirable nature of the invasion in Cochin Chinese eyes, since the possibility could not be ignored that the Roman Catholic Prime Minister might use the refugees to secure his hold on political power and to establish a Christian state in South Vietnam. The somewhat tactless fashion in which relief was distributed did little to dissipate these popular misgivings; whereas the requirements of Roman Catholics, who comprised eighty percent of the refugees, were accorded priority, those Cochin Chinese who had been living in a state of destitution in the Vietminh zone received little assistance from the government

[terjemahan:](Kedatangan pengungsi dari Vietnam Utara)mengkhawatirkan penduduk Cochin Cina(selatan), yang memiliki sifat temperamen, spontan, dan agak sembrono yang terbentuk karena kemudahan hidup di Delta Mekong yang kaya dan berpenduduk jarang. Kekhawatiran itu cukup beralasan jika kedatangan masyarakat Vietnam Utara yang hemat, pekerja keras dan perhitungan akan menyisihkan mereka secara perlahan dari tempat asalnya. Selain itu agama pengungsi yang menjadi nilai lebih mereka tidak diinginkan masyarakat selatan, karena Perdana Menteri Katolik (Ngo Dinh Diem) menggunakan pengungsi untuk mengamankan kekuasaannya dan untuk mendirikan negara Kristen di Vietnam Selatan. Apa yang terjadi adalah pemberian bantuan yang diskriminatif, karena keistimewaan hanya diberikan pada mereka yang

⁸⁰ Schechter, *Op.Cit*, 170.

menganut agama Katolik. Orang-orang selatanyang telah hidup dalam kemiskinan di zona Vietminh menerima sedikit bantuan dari pemerintah

Buddhis menegaskan bahwa di kamp pengungsian jemaat Katolik lebih diperhatikan dan diberikan makanan yang lebih sehat dibandingkan pengungsi beragama Buddha. Beranjak dari masalah di pengungsian yang berlangsung selama beberapa tahun, Buddhis mengeluhkan kembali tentang tanah yang diberikan kepada pihak Katolik untuk pembangunan sekolah dan gereja Katolik lebih baik daripada tanah untuk Buddhis. Kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan pun lebih terbuka untuk penduduk beragama Katolik.

Bentuk diskriminasi juga melibatkan penduduk yang masuk dalam militer, bahwa seorang Katolik akan lebih cepat dipromosikan naik pangkat dalam waktu cepat. Segera masalah ini menciptakan permasalahan baru di muka presiden. Penganut Katolik di Vietnam adalah minoritas, sebanyak 1,700,000 jiwa dalam 16,000,000 jiwa dengan bagian terbanyak adalah penganut agama Buddha sebesar delapan puluh persen di antaranya. Presiden tidak menyadari bahwa kebijakannya tersebut menyulut perasaan tersisihkan di kalangan penganut Buddha.

Paus sangat terganggu dengan aksi yang dilakukan pemerintah Vietnam Selatan dan dengan sangat hati-hati berhubungan dengan mereka. Paus menekankan bahwa krisis yang ada di Vietnam Selatan bukanlah konflik agama namun krisis politik.⁸¹ Uskup Saigon Paul Nguyen Van Binh menyebarkan surat pastoral yang dibacakan di gereja dan kapel di semua wilayah keuskupan menekankan bahwa Paus Yohanes ke-XXIII dalam ensikliknya;⁸²

“Pacem in Terris, that every human being has the right to honor God according to the dictates of an upright conscience and to profess his religion privately and publicly”.

[Terjemahan:]“Pacem in Terris (kemerdekaan di tanah tertentu—terjemahan bahasa latin), bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menghormati Tuhannya sesuai dengan perintah dari hati nurani yang jujur dan untuk memeluk agamanya secara pribadi dan di hadapan publik”.

⁸¹Schechter, *Op.Cit.* hlm 185

⁸²Ensiklik adalah surat edaran untuk masyarakat yang ditulis oleh Paus, pemimpin tertinggi dalam lingkup hierarki gereja Katolik.

BAB. IV

PROTES KAUM SANGHA TERHADAP PEMERINTAHAN

4.1. Kaum Sangha di Vietnam Selatan

4.1.1. Pandangan Kaum Sangha Terhadap Pemerintahan

Buddhism menurut Tri Quang, mengajarkan bahwa setiap orang akan bahagia saat melihat orang lain bahagia dan kebahagiaan itu makin besar saat orang tersebut menderita untuk membuat orang lain bahagia. Hal tersebut menjelaskan perasaan tanggungjawab terbesar tiap biksu yang hidup di antara masyarakatnya.⁸³ Meski jumlah biksu lebih sedikit dibanding masyarakat, makin dalam suatu kelompok mempelajari Buddhism maka akan makin besar usaha mereka untuk bangsa dan negaranya. Begitupula, jika seseorang makin dalam mempelajari Buddhism, maka makin luas dedikasinya untuk masyarakatnya.

Ada hubungan yang mistis antara rakyat dan Buddhisme yang dibangkitkan melalui karisma pemimpin Sangha. Thich Tri Quang adalah salah satu pemimpin yang dihormati. Pandangannya mengenai kekuasaan terlihat dalam pernyataan berikut, "dalam Buddhism tidak ada pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut, yang ada adalah orang yang menerima tanggungjawab dan massa yang menerima sang pemimpin. Pemimpin hanya diikuti jika ia merefleksikan aspirasi massa". Menurut Tri Quang, apa yang membuat pengikut tetap setia dengan pemimpinnya adalah, mereka tetap berhubungan dengan kehidupan sekitar pengikutnya dan pikirannya bebas dari kepentingan pribadi dan jauh dari segala perbuatan tercela. Bilapun ada kepentingan pribadi di antaranya, akan segera ditolak oleh pengikutnya.

Menurut Tri Quang, seorang pemimpin harus mempunyai semangat *truc giac*, bahasa Vietnam serapan dari bahasa China yang berarti kesungguhan hati dan kesadaran akan kebenaran. Dengan caranya sendiri dan dalam konteks modern, Quang melihat adanya pengaruh Buddhisme bagi pemerintahan di

⁸³ Jerrold Schecter, *The New Face of Buddha: Buddhism and Political Power in Southeast Asia*, (New York: Coward-McCann, Inc, 1967), 146.

Vietnam saat ini. Dengan gambaran Buddhisme di masa lampau dia berharap untuk menciptakan masa depan bagi Vietnam.⁸⁴ Dari sudut pandang Amerika, Quang adalah pemimpin yang kontroversial dan merugikan mereka dalam penanganan konflik. Banyak pejabat tinggi yang ditugaskan dalam misi di Vietnam percaya bahwa apapun motif Tri Quang, ia telah membantu komunis menyebabkan banyak kegelisahan dan penyimpangan dan mengizinkan Viet Cong melakukan infiltrasi bersamaan dengan gerakan yang dilakukan para biksu. Quang banyak mempunyai rival dan musuh, namun ia memiliki pusat kekuasaan di Hue. Quang tanpa Hue tidak akan berpengaruh.



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali
Vietnam, 1967

Gambar 4.1.
Thich Tri Quang (tengah) Duduk Bersama Biksu Lainnya.

Biografi Tri Quang membuat dirinya lebih mudah dipahami. Dia dilahirkan di kota Dong Hoi, termasuk dalam propinsi Quang Binh, bagian utara Hue, Vietnam Utara, pada November 1922. Nama aslinya adalah Pham Van Bong. Thich Tri Quang atau yang dimuliakan karena pencerahan kebijakan⁸⁵ adalah nama baru religinya. Ayahnya menikah dua kali dan Tri Quang adalah anak kedua dari empat anak yang dilahirkan istri kedua ayahnya. Pada 1955

⁸⁴*Ibid*, 148.

⁸⁵Nama baru seorang biksu di Vietnam selalu diawali dengan Thich, yang berarti “yang dimuliakan”, diikuti dengan satu atau dua nama tambahan.

keluarganya diperiksa pengadilan karena berada dalam kelas atas dengan kepemilikan tanah yang besar. Setelah itu ibu dan kakak tertuanya ditahan di penjara petani. Tri Quang tidak pernah mendengar lagi tentang mereka. Tri Quang mengingat bahwa saudaranya ada yang mati terbunuh oleh komunis di utara, saudaranya keempat adalah Sersan Mayor dalam satuan tentara Vietnam Selatan. Ayahnya sendiri meninggal sejak 1945.

Tri Quang sekolah di Dong Hoi, dan saat berusia 13 tahun dia meninggalkan rumah dan menuju pagoda Quoc untuk menjadi biksu. Dia adalah orang yang cepat belajar, cerdas, namun seorang biksu yang pemberontak. Pikirannya yang sangat hebat membuatnya mudah mencerna teks-teks Buddha yang sulit dipahami, sekaligus juga mempunyai semangat yang meluap-luap dan suka bercanda, sehingga ia sering diusir dari pagoda. Pernah ia diusir dari pagoda, namun disuruh kembali oleh Thich Tri Do, guru Tri Quang, yang juga ketua Asosiasi Buddhis Vietnam Utara. Menurut Tri Do, Tri Quang adalah seorang nasionalis yang keras kepala dan agen revolusioner yang akan berperan besar selepas Perang Dunia II.

Tri Quang lulus sebagai biksu pada 1944, yang kedua dari enam orang di kelasnya. Orang ketiga adalah Thich Thien Minh yang menjadi pengikut setia Tri Quang dan tokoh yang menerapkan “cetak biru” strategi Quang. Thich Thien Minh menjadi wakil Quang di Saigon dan memimpin faksi biksu militan di sana.

Di awal tahun 1946 Quang menyertai Thich Tri Do ke Hanoi, dimana ia ditunjuk menjadi profesor di sekolah Buddha. Dia berkata harus bergabung dengan Perkumpulan Buddhis Viet Minh yang dipimpin oleh Thich Mat The, hingga kemudian masuk menjadi anggota Dewan Nasional dan saat ini memimpin Buddhis Vietnam Utara. Pada saat itu Tri Quang melihat adanya kesempatan untuk berpihak kepada Ho Chi Minh yang saat itu sedang membawa gelombang nasionalisme melawan Perancis. Tri Quang mulai bersentuhan dengan kekuasaan, dan perjuangan awal memerdekakan Vietnam sangat mempengaruhi karakternya.

Saat pecah perang antara Viet Minh dan Perancis, Desember 1946, Tri-Quang terbang ke Hanoi, ke desa Trung Nghia kemudian bekerja kembali ke Hue tahun 1947. Quang juga merupakan anggota dari Organisasi Buddhis Melawan

Kolonialisme dan sempat ditangkap oleh Perancis tahun 1948 karena dicurigai sebagai agen komunis, dan dilepaskan beberapa hari kemudian dengan pengawasan. Quang juga sempat diangkat menjadi dosen di Dalat untuk beberapa waktu namun tahun 1952 kembali lagi ke Hue, saat ia mengajar tentang Buddhisme dan mengedit sebuah buku berjudul *Vien Am* (Suara Vietnam). Ia akhirnya diawasi penuh oleh pemerintah Perancis dan diberikan masa bebas selama 25 hari untuk menghadiri Kongres Buddhis Se-dunia yang diadakan di Jepang tahun 1952. Ditahun 1953, Perancis membebaskan dia dari pengawasan dan mengizinkannya pergi ke manapun di Vietnam tengah dan dataran tinggi. Ia merupakan pendiri dari Asosiasi Buddhis Vietnam dan Asosiasi Pramuka Vietnam.

Tri Quang berkata bahwa "Buddhisme di Vietnam bukanlah korban dari komunisme saja, namun juga korban dari usaha melawan komunisme—anti-komunisme. Setidaknya di Vietnam ini terdapat tiga golongan; Viet Cong, orang yang mengambil kesempatan dari usaha melawan Viet Cong, dan massa". Saat ditawarkan menjadi penasihat Jenderal Duong Vanh Minh pasca penggulingan Ngo Dinh Diem tahun 1963, Tri Quang menolak dengan segera tawaran itu, namun dia menegaskan selalu bersedia untuk diajak berkonsultasi. Tri Quang menyadari keterbatasan Buddhisme dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya dalam hal politik seperti katanya, "kami (penganut Buddha) tidak pernah menginginkan apapun, dan berkata bahwa penganut Buddha menginginkan ini atau itu juga salah. Semua yang kami yang inginkan adalah pemerintah jangan menindas agama, khususnya Buddha. Namun kami tidak pernah mendukung siapapun. Memang tidak mungkin bagi Buddhis untuk sendirian melawan komunis. Untuk melawan komunis kamu membutuhkan tentara dan politik yang dikombinasikan dengan agama".⁸⁶

Kekuatan Tri Quang juga dibangun oleh orang-orang yang setia kepadanya, yang telah mengembangkan dan melaksanakan strateginya. Orang paling penting baginya adalah teman sekelasnya saat belajar di pagoda Hue, Thich Thien Minh. Ia adalah orang kepercayaan, ahli taktik, kepala staf, organisator,

⁸⁶Jerrold Schechter, *Op.Cit*, 157.

negosiator dan eksekutor pelaksanaan strategi Tri Quang. Thien Minh juga seorang juru bicara Komite Intersekte Buddhis yang bernegosiasi dengan presiden Ngo Dinh Diem dan menjadi pemimpin delegasi dalam pertemuan ketujuh WFB di Sarnath, India, Desember 1964.

4.1.2. Konsolidasi dan Diferensiasi Gerakan dalam Sangha

Kesatuan dalam gerakan Buddhis dasarnya tidak hanya berupa simbol jubah kuning dan waktu yang bertahun-tahun di dalam biara, namun juga atas kesetiaan yang lain. Seperti Tri Quang adalah produk dari Hue, seperti halnya biksu-biksu lain mewakili daerah yang lain di bagian Vietnam. Dalam krisis penganut Buddhis menjelma bersatu meski sesaat, dan satu alasan kesatuan tersebut masih longgar karena kesetiaan terhadap daerahnya melebihi kesetiaan kepada agama.⁸⁷

Untuk hierarki dalam Buddhis juga dibagi atas dasar geografis dan setiap pemimpin cenderung berpengaruh di daerahnya saja. Thich Tri Quang dominan di Vietnam bagian Tengah, kekuasaannya di Saigon selalu bersaing dengan biksu moderat, Thich Tham Chau, yang dominan di Vietnam bagian Selatan. Tham Chau adalah ketua dari Institut Penyebaran Dharma.⁸⁸ Dirinya diperkirakan mempunyai pengikut sebanyak 1.000.000 jiwa berasal dari Utara yang mengungsi ke Selatan, dan sebagian lainnya adalah biksu moderat di Selatan.

Tham Chau terlahir sebagai orang Utara yang temperamen, tingginya hanya 5 kaki, kecil dan kurus. Ia lahir di Provinsi Ninh Binh di Vietnam Utara, anak seorang petani miskin. Orang tuanya meninggal saat ia masih remaja; dari ketiga saudaranya, dua orang meninggal dan yang ketiga adalah petani. Dia tidak pernah mendengar kabar lagi dari saudaranya semenjak pemisahan Vietnam tahun 1955.

Tham Chau mengawali pendidikannya di sekolah dasar di desanya sampai ia berusia sebelas tahun, hingga kemudian belajar lagi di pagoda Dong Dac yang

⁸⁷Schechter, *Op.Cit.* 161.

⁸⁸Institute for the Propagation of the Dharma (*Vien Hoa Dao*)

cukup terkenal di Provinsi Ninh Binh. Meski ia dapat sedikit berbicara bahasa Inggris dan Perancis, ia sangat ahli dalam literatur China. Pada tahun 1946, ia ditunjuk menjadi biksu senior dan bertugas mengawasi empat Provinsi di Vietnam Utara. Pada saat perang Indochina dimulai tahun 1948, dia berada di Phat Diem, sekitar delta Sungai Merah di Vietnam Utara, pusat dari pemimpin pasukan Katolik, Hoang Quynh yang dikenal sebagai Pendeta Petarung. Selagi kaum Buddhis melakukan sedikit perlawanan, di bawah arahan Tham Chau mereka melakukan propaganda balasan melawan komunis. Oleh karena ulahnya itu Tham Chau diancam hukuman mati secara *in absentia* oleh pengadilan Viet Minh tahun 1949. Dia sudah beberapa kali hampir tertangkap dan dua kali diselamatkan pasukan Perancis dari kematian. Tahun 1951, Tham Chau mendirikan GAVB dan melakukan perjalanan ke seluruh Vietnam Utara hingga tiba di Vietnam Selatan tahun 1954. Di Saigon ia dipilih menjadi ketua BRA yang menangani para pengungsi dari Utara, dan tahun 1963 ia dipercaya menjadi ketua Komite Buddhist Intersekte dan memimpin gerakan protes Buddhist terhadap pemerintahan presiden Diem. Bagaimanapun Tham Chau lebih mudah melakukan kompromi terhadap pemerintahan berkuasa dibandingkan dengan Tri Quang. Tham Chau juga tidak enggan untuk meminta bantuan dari pejabat yang ada di dalam pemerintahan, terlepas dia Buddhis atau bukan. Sedangkan Tri Quang, biksu yang dihormati di Hue, adalah seorang absolutis dan selalu menegaskan tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan. Tri Quang dan Tham Chau adalah rival yang sengit.⁸⁹

Perbedaan di antara kedua tokoh terletak dalam hal gaya dan temperamen. Tri Quang sangat luwes dengan massa—menyemangati massa dan menggerakkan. Tham Chau pribadi yang pendamai dan lebih suka melakukan negosiasi secara personal. Tri Quang jarang berunding langsung dengan pemerintah, sedangkan Tham Chau bersemangat dengan percakapan pribadi dan siap dengan kesepakatan-kesepakatan, serta siap menjadi jembatan bagi biksu militan dengan pemerintahan.

⁸⁹Schechter, *Op.Cit.* 163.

Untuk wilayah bagian Selatan, dikenal biksu bernama Thich Thien Hoa dan Thich Ho Giac. Menurut Schechter, Ho Giac lebih dominan dan sangat penting peranannya dibandingkan dengan Thien Hoa, meskipun usia masih muda, tiga puluh sembilan tahun. Menurut Ho Giac, saat ini di tengah konflik, tidak ada lagi bedanya Theravada maupun Mahayana di Vietnam. Ho Giac menjabat sebagai Deputy Direktur biarawan Buddhis dan kepala Komisi Masyarakat Awam. Parasnya lembut, daun telinganya lebar dan pandangannya tajam, cerdas dan tampak sedang menyembunyikan sebuah rahasia. Matanya berbinar ceria, kombinasi antara energi dan kontrol yang baik. Ho Giac hidupnya mengikuti pola berikut ini; bertahun-tahun dalam biara kemudian beranjak bergabung dan terlibat dalam politik.

Ho Giac adalah anak pedagang kaya dari Vietnam dan dibesarkan di Phnom Penh, Kamboja saat ayahnya masih hidup. Dia memasuki biara sebagai orang baru pada usia enam tahun dan menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar di Kamboja hingga tahun 1958. Kemudian ia kembali ke Vietnam dan berkeliling ke wilayah-wilayah penganut Theravada di Vietnam yang dekat dengan perbatasan Kamboja, mencari-cari pengikut yang akan setia. Saat Buddhis bersiap diri menentang presiden Diem, Ho Giac bergabung dalam gerakan. Ho Giac sangat sensitif untuk mengkritik bahwa Buddhis pro-komunis dan menolong Viet Cong. Ho Giac berkata bahwa pihak barat dan Amerika Serikat telah salah paham terhadap Buddhis; itulah mengapa terdapat psikologi *defeatism*—Amerika berpikir Buddhis adalah pro-komunis dan tidak banyak menolong Buddhis.⁹⁰

4.2. Peranan Kaum Sangha dalam Penjatuhan Ngo Dinh Diem

4.2.1. Aksi Bakar Diri Thich Quang Duc

Pada 5 Mei 1963 diadakan upacara peringatan dua puluh lima tahun masa bakti Ngo Dinh Thuc sebagai pastur dan uskup. Peringatan tersebut diadakan di dataran tinggi Dalat. Selagi mengunjungi peringatan, Diem dikejutkan dengan adanya bendera Vatikan yang berkibar tanpa adanya bendera nasional Vietnam.

⁹⁰Schechter, *Op.Cit*, 165.

Pada Agustus 1962 ia mengeluarkan dekrit agar semua pihak mengibarkan bendera nasional bersandingan dengan bendera apapun. Saat ia kembali dari Saigon setelah peringatan di Dalat Diem mengingatkan kembali khususnya kepadasesua gubernur atas dekritnya. Memorandum presiden itu baru tiba di provinsi Hue pada 7 Mei 1963, sehari sebelum peringatan hari Waisak.

Buddhis di Hue sedang menyiapkan peringatan Waisak pada 8 Mei dan mengibarkan bendera lima warna Buddhis internasional, namun polisi yang telah mengetahui memorandum segera menurunkan beberapa bendera. Buddhis segera mengajukan protes atas aksi tersebut kepada gubernur Hue, juga seorang Buddhis. Segera gubernur memerintahkan polisi untuk menghentikan penurunan bendera Buddhis dan peringatan tetap berjalan sesuai jadwal.

Pukul 10.00, 8 Mei 1963, peringatan dimulai. Agenda pertama dibuka dengan sambutan dari gubernur provinsi Hue, kemudian sebanyak 10.000 biksu berjubah oranye memenuhi tempat peringatan “umat Buddha”, kata gubernur, “tidak bertindak melawan pemerintah, namun mereka dihambat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan”. Gubernur kemudian menyerukan agar pemerintah memenuhi permintaan atas kebebasan beragama. Segera bersahutan seruan untuk kebebasan beragama yang muncul dari kerumunan biksu sambil membawa spanduk bertuliskan “Kebebasan Beragama,” “Turunkan Pihak yang Menentang Agama,” dan “Buddhism itu Abadi.”

Pemerintah cepat menanggapi dan menginformasikan pada khalayak bahwa siaran Radio yang diagendakan untuk Thich Thien Khiet, pemimpin GBA dan biksu senior di Vietnam, malam nanti ditunda. Siaran radio boleh tetap terlaksana dengan adanya program bertema Buddhisme, namun tidak untuk pidato.⁹¹

Biksu tua mengajak untuk melakukan protes damai di luar stasiun radio Hue, dan sekitar 3,000 orang berada di situ. Thien Kiet berseru kepada massa bahwa dia berharap agar pemerintah mengubah pikirannya dan membiarkan dirinya berpidato. Para pelajar yang antusias segera memanjat bangunan dan naik ke atap untuk mengibarkan bendera Buddhis. Kemudian Thien Khiet

⁹¹Schechter, *Ibid*, 174.

menghubungi gubernur dan ia tiba pada pukul 22.00, segera berunding dengan Khiet. Sepuluh menit kemudian tank-tank dan kendaraan berisi pasukan dari kamp pelatihan Phu Bai tiba di stasiun radio. Rupanya pasukan tersebut adalah tentara garnisun Hue yang diperintahkan untuk menenangkan massa, namun gagal. Lima truk pemadam kebakaran juga dikerahkan dengan menyembrotkan air ke arah kerumunan, namun mereka tetap bergeming.

Letusan muncul kemudian di antara jajaran tank di belakang kerumunan. Tentara yang bergerak di belakang tank mulai menembaki kerumunan. Beberapa saat kerumunan terpecah dan kabur ke segala arah dengan tank maju mengejar. Ketika letusan berhenti, sembilan orang, enam di antaranya adalah anak kecil, tewas di tempat. Pemerintah yang mengetahui aksi ini menyatakan bahwa Viet Cong terlibat dan meletakkan bom plastik di antara kerumunan. Namun dr. Eric Wulff dan beberapa doktor Jerman lainnya yang menjadi saksi mata pada saat kejadian memotret peristiwa dan menjelaskan bahwa korban yang tewas disebabkan karena serangan amunisi tentara serta tembakan tank.

Sumber Amerika tidak menyebutkan kemungkinan adanya bom plastik, namun mereka mencatat bahwa pasukan khusus, sesuai arahan Ngo Dinh Nhu, menyatakan bahwa terdapat sejenis peledak berbahan dasar C-4. Namun bukti terbanyak yang berasal dari cetak foto dan saksi mata mengungkapkan peran tentara dan tank-tank yang menewaskan korban. Mengenai siapa yang memberikan perintah pertama penyerangan tidak diketahui pasti, namun Dennis Warner, jurnalis Australia menuturkan bahwa sebelum penyerangan sejumlah pasukan dipanggil menghadap Ngo Dinh Can dan Ngo Dinh Thuc yang sedang berkonsultasi dengan gubernur.

Gambar-gambar korban yang tewas serta keterangan-keterangan yang tersirat di dalamnya diserahkan dr. Eric kepada para biksu. Laporan pemerintah tentang dugaan keterlibatan Viet Cong tidak mempengaruhi massa. Pada 15 Mei 1963, delegasi Buddhis yang diwakili beberapa biksu dan awam menemui presiden Ngo Dinh Diem untuk menuntut lima permintaan yang pernah diajukan sebelumnya.

Diem mengatakan, dirinya tidak pernah melarang pengibaran bendera Buddhis dan menyatakan bahwa hal itu adalah kesalahpahaman. Dekrit tentang bendera berlaku bagi semua pihak; bendera nasional harus dikibarkan pertamanya karena dianggap sebagai representasi masyarakat dalam menghadapi musuh bersama, komunis. Bendera Buddhis boleh dikibarkan hanya dengan bendera nasional Vietnam Selatan. Ketika Diem diminta penghentian penangkapan dan aksi teror terhadap umat Buddhis, ia menjamin sepenuhnya bahwa undang-undang mengakui kesetaraan bagi semua agama.

Ketika Diem dituntut atas kesetaraan Buddha dan Katolik di mata hukum, Menteri Dalam Negeri, Bui Van Luong yang berada dalam pertemuan itu membantah tuduhan delegasi. Ia menjelaskan bahwa penangkapan yang terjadi dalam kerusuhan di Hue bukan karena mereka Buddhis namun mereka telah melakukan tindakan penyimpangan.

Diem kembali menyangkal saat ditanyai mengenai permintaan Buddhis untuk bebas melaksanakan kegiatan keagamaan dan meminta bukti nyata atas larangan itu pada delegasi. Mengenai tuntutan ganti rugi kepada korban Diem berjanji akan ada penyelidikan menyeluruh kepada semua yang terlibat termasuk para biksu dan umat Buddhis terkait. Untuk biaya ganti rugi Diem menampik anggapan bahwa pemerintah yang bersalah dan menganggap bahwa bantuan untuk korban adalah aksi sosial yang menjadi kewajiban pemerintah. Diem juga menegaskan kepada delegasi bahwa dirinya tidak menganjurkan mereka datang meminta bantuan.⁹²

Delegasi juga meminta kepada Diem, perlindungan atas mereka selama berada di Hue. “Kenapa menanyakan hal itu?” tanya Diem pada delegasi, “di Vietnam semua orang bebas bepergian ke mana pun mereka mau.” Presiden melanjutkan “Pagoda dibangun untuk sarana berdoa, kalian semestinya berdoa namun jangan menyusun acara yang cukup besar dan mengundang ratusan orang karena Viet Cong akan mengeksploitasi acara dan menyebabkan masalah.”

Pada 30 Mei 1963, 400 biksu dan biksuni melakukan aksi duduk sebagai bentuk protes di depan Gedung Dewan Nasional dan mengumumkan aksi mogok

⁹²*Ibid*, 175.

makan secara nasional. Pemerintah mengambil sikap dengan memecat gubernur, Mayor dan delegasi pemerintah yang bekerja di Hue. Diem juga berusaha menjelek-jelekan GBA sebagai organisasi yang memecah-belah karena meresmikan pagoda sekte Co Son Mon, sekte pecahan Buddha yang terpisah dari GBA. Diem merencanakan agar sekte yang membolehkan biksunya untuk menikah itu menggantikan GBA dalam WFB yang rutin diadakan. Diem berpikir bahwa Co Son Mon akan merusak hierarki dalam Sangha, melemahkan dan merusak gerakan mereka. Upaya tersebut adalah taktik Diem yang biasa ia lakukan untuk memecah-belah lawannya.⁹³

Namun, Diem tidak memperhitungkan para pelajar atau mahasiswa. Pada 3 Juni 1963, 3,500 pelajar provinsi Hue berkumpul di depan rumah delegasi Vietnam Tengah untuk demonstrasi menentang diskriminasi agama. Saat pasukan pemerintah berusaha membubarkan, mereka membalas dengan ejekan dan cacian, berseru bahwa tentara telah membunuh umat Buddha. Tentara yang berada di atas truk bersuara keras lewat pengeras suara mengingatkan bahaya komunis dapat menyusup di antara mereka. Namun para pelajar tidak menggubris sehingga menimbulkan aksi lanjutan yang dilakukan tentara. Sambil memegang bayonet, sejumlah tentara melemparkan gas air mata ke tengah-tengah pelajar. Para pelajar berlarian ke pagoda Tu Dam untuk menghindari, namun barikade tentara menghadang. Dengan ketakutan para pelajar berlutut dan berdoa di jalanan, lagi tentara melemparkan gas air mata. Kerusuhan itu berakhir dengan enam puluh tujuh pelajar dirawat di rumah sakit, empat puluh di antaranya kritis karena terbakar paru-parunya menghisap banyak gas air mata. Tiga puluh delapan pendemo dipenjara dan sejak peristiwa tersebut diberlakukan jam malam di Hue. Poster-poster ditempel di sudut-sudut jalan berisi larangan keras dari pemerintah terhadap perkumpulan umum atau kepemilikan dan penyebaran suatu dokumen apapun. Batalion infanteri didukung dengan perlengkapan bantuan Amerika bergerak menuju Hue, bersiaga untuk jam malam yang berlaku mulai pukul 21.00 waktu setempat. Pagoda Tu Dam juga diawasi dan dikelilingi oleh tentara serta diberi pagar kawat berduri sebagai barikade. Orang-orang yang

⁹³Schechter, *Ibid*, 176.

masuk dan keluar pagoda diperiksa, sedangkan air serta listrik di pagoda itu diputus.

Pemerintah kemudian menempelkan poster-poster bertuliskan “Pembongkar, pihak asing dan Viet Cong bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.” Sebagai solusi atas kekacauan di Hue, pada 4 Juni 1963 pemerintah membentuk Komite AntarAgama, dikepalai oleh wakil Presiden, Nguyen Ngoc Tho yang bertugas untuk menemui Komite Antar-Sekte Buddha. Umat Buddha mendapatkan komitmen secara verbal dari wakil Presiden bahwa dirinya akan menuju Hue dan mempersiapkan hukum yang pantas untuk kerusakan yang telah terjadi. Di lain pihak para petugas pemerintah yang lain meningkatkan serangan terhadap penganut Buddha, dan pihak militer tidak menyadari adanya selebaran yang mengutuk Thich Tri Quang. Isi selebaran memberitahukan bahwa Tri Quang telah mengajak rakyat untuk berkumpul berdoa dan kemudian mengalihkan ritual doa menjadi demonstrasi kepada pemerintah. Menanggapi berbagai isu yang beredar, Presiden Ngo Dinh Diem mencoba bersikap lunak dengan berpidato di radio. Diem mengajak masyarakat untuk bersikap nasionalis dan secara serius mempelajari semua permasalahan.

Di lain pihak, kedutaan Amerika mencari cara untuk menenangkan ketegangan. Wakil duta besar Amerika untuk Vietnam, William C. Trueheart menggantikan Frederick B. Nolting yang sedang berlibur, membujuk Diem untuk melakukan konsultasi dengan kaum Sangha. Trueheart menghimbau Diem untuk segera mengakhiri krisis, karena Amerika tidak akan mengakui kebijakan Diem dan menjauhkan diri jika krisis terus berlanjut.

Di tengah panasnya bulan Juni, pada tanggal 11, barisan biksu dan biksuni berjubah oranye dan biksuni-biksuni berjubah abu-abu menjadi gelombang besar yang hampir memenuhi jalan raya Phan Dinh Phung di Saigon. Di tengah protes berjalan mobil putih yang berisi beberapa biksu. Di persimpangan jalan Phan Dinh Phung dan Le Van Duyet mobil itu berhenti, dan biksu di dalamnya keluar sambil membuka penutup kepalanya. Kelihatannya mobil mereka bermasalah, namun prosesi baru akan dimulai. Delapan atau lebih biksu dan biksuni mengelilingi mobil tersebut. Perlahan lingkaran orang tersebut bersuara lirih,

mengalun dan menyedihkan, merapalkan sutra Buddha. Biksu yang masih ada di dalam mobil keluar dan menuju tengah-tengah lingkaran. Dia adalah Thich Quang Duch, biksu berusia tujuh puluh tiga tahun, bersimpuh di aspal dan bersemedi bersikap seperti Lotus. Kemudian beberapa biksu mulai menyiram Quang Duch dengan bensin yang sudah disiapkan dalam beberapa galon. Beberapa saat kemudian mulai terdengar isak tangis biksuni sembari menghapus air mata tak henti-henti. Tangisnya mulai merintih menahan haru dan memecah keheningan sutra Buddha. Kemudian Quang Duch mengambil sekotak korek api, sembari memegang tasbih di tangan kanan dan mulai menyalakan satu batang korek.⁹⁴

Semburat api kecil seketika membakar seluruh tubuh Quang Duch, sedangkan dirinya tetap dalam posisi Lotus dengan tangan mengapit di dada. Lirih sutra mulai berhenti, dengan banyak mata memandangi tubuh terbakar Quang Duch. Lingkaran biksu dan biksuni sekarang bersujud dalam doa dan memulai ritual nyanyian sutra yang baru. Ratusan orang yang penasaran, melihat dan meratap dalam sedih atau jatuh berlutut dan berdoa sambil mengapitkan tangannya. Seorang anak kecil yang juga melihat Quang Duch terbakar langsung menjerit, menangis ketakutan.⁹⁵

Beberapa orang Amerika yang ada dalam kerumunan berseru berkali-kali, “oh my God, oh my God,” seperti dituturkan oleh David Halberstam, koresponden untuk *New York Times*, menyaksikan langsung fenomena itu. Polisi yang melihat pertama kali langsung menerobos barikade lingkaran biksu-biksuni, gagal dan menyerah. Thich Quang Duch terbakar hangus dalam sepuluh menit sebelum tubuhnya benar-benar hitam dan terjatuh ke belakang. Jubahnya masih terbakar dan masih terlihat wajahnya tenang, dan tangan kanannya masih menggenggam tasbih hingga akhirnya mencapai angkasa.⁹⁶

⁹⁴Dalam terminologi modern politik propaganda kekerasan dan kengerian aksi digunakan secara efektif untuk meningkatkan kemarahan massa melawan rezim tertentu, dalam hal ini presiden Ngo Dinh Diem.⁹⁴ Aksi tersebut menimbulkan kesadaran baru dan menyulut rasa percaya diri yang besar kepada rakyat Vietnam untuk menentang.

⁹⁵Schechter, *Op.Cit*, 166 – 167.

⁹⁶Menurut kisah bakar diri Quang Duch tersebar rumor bahwa dirinya memakai obat-obatan sebelum melakukan aksinya atau berada di bawah pengaruh opium saat mulai terbakar. Malcolm Brown, anggota Asosiasi Press bersaksi bahwa Quang Duch tidak nampak dalam pengaruh obat-



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Vietnam, 1963

Gambar 4.2.
Tubuh Thich Quang Duc
Setelah Api Padam

Semua aksi tadi sudah direncanakan sebelumnya. Dengan cepat empat biksu membentangkan sebuah bendera besar dan lebar berwarna oranye, biru, merah, kuning dan putih. Biksu lainnya dengan suara lantang dan keras berseru kepada kerumunan massa yang ada di antara jasad Quang Duch, dengan bahasa Inggris; “ini adalah bendera Buddhis. Dia mati karena bendera ini. Yang Mulia Thich Quang Duc membakar dirinya untuk lima tuntutan kami.” Tuntutan dimaksud berkaitan dengan insiden 8 Mei 1963 ketika pasukan pemerintah menahan laju demonstran. Delegasi Buddhis meminta kepada Presiden Diem untuk memenuhi lima tuntutan:

- 1).Membatalkan aturan ilegalisasi pengibaran bendera Buddhis;
- 2).Persamaan di bahwa hukum untuk penganut Buddhis dan Katolik;
- 3).Menghentikan penangkapan-penangkapan terhadap penganut Buddhis—yang kebanyakan adalah biksu;

obatan, atau bahkan dibantu keluar dari mobil. Quang Duch keluar sendiri dari mobil dan bersimpuh di aspal tanpa bantuan. Seorang Vietnam yang mengenal Quang Duch memberikan kesaksian pada Schechter bahwa Quang Duch melatih dan menguasai teknik yoga dan karena itu mampu menahan sakit tanpa menangis atau merintih, Schechter,167.

Universitas Indonesia

- 4).Kebebasan melaksanakan agama dan melakukan pengajaran agama Buddha, dan
- 5).Pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban yang tewas pada 8 Mei 1963, serta sangsi institusional kepada siapapun yang bertanggungjawab atas tewasnya mereka.⁹⁷



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Gambar 4.3.
Pertemuan Delegasi Sangha dengan Presiden Ngo Dinh Diem

Setelah aksi bakar diri Quang Duch Komite Antar-Agama bertemu dengan kaum Sangha untuk mempercepat rekonsiliasi, dan pada pagi hari, 18 Juni 1963 saat upacara Quang Duch direncanakan, dibacakan dan diumumkan kepada khalayak tentang kesepakatan bersama antara pemerintah dan Sangha yang terjadi saat pertemuan resmi (*join communiqué*) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuantersebut pemerintah akan memenuhi lima tuntutan yang diajukan delegasi Buddhis dan akan dibentuk satu komite khusus dengan tugas menyelidiki hingga tuntas mengenai peristiwa Hue.⁹⁸

Umat Buddhis setuju untuk menunda upacara pemakaman untuk menghindari munculnya bentrokan dan memberikan waktu untuk memberitahukan isiVkesepakatan sebelum pemakaman untuk mengurangi

⁹⁷Schechter, *Ibid*, 167.

⁹⁸ Schechter, *Ibid*, 179.

ketegangan. Namun sekelompok biksu menuntut agar pemakaman segera dilaksanakan dengan menggunakan pengeras suara. Pada saat itu setidaknya 10,000 orang berada di sekitar upacara pemakaman Quang Duch. Akhirnya pemakaman tidak dilaksanakan, namun massa yang dipimpin oleh pelajar menyerang petugas dengan batu-batu. Dalam kerusuhan tersebut dua ratus orang ditangkap dan satu pemuda langsung tewas di tempat, ditembak langsung di kepala.

Kepemimpinan dalam Sangha terpecah. Pihak yang lebih muda, biksu aktivis, sangat marah karena penghapusan beberapa klausul dalam kesepakatan bersama. Mereka kecewa karena para delegasi Buddhis dalam *pertemuan resmi* membiarkan pemerintah melepaskan tanggung jawab dengan menghilangkan klausul tentang kompensasi atau penggantian atas keluarga korban peristiwa 8 Mei 1963.

Pada 19 Juni 1963, Quang Duch dikremasikan. Publik tidak diperkenankan menghadiri prosesi tersebut dan 7,000 polisi dipersiapkan untuk mencegah penumpukan massa. Selama kremasi, tubuh Thic Quang Duc yang belum habis dilalap api, dibakar kembali. Menurut kesaksian beberapa orang, bagian tubuh Quang Duc yang tidak terbakar oleh api adalah jantungnya. Bagian itu dijadikan relik dan tetap disimpan di altar pagoda Xa Loi, Saigon, hingga kini untuk mengenang Quang Duch.

Jantung suci Quang Duc membuat krisis tetap hidup, begitupula tentang “tindakan mulia” dan kata “keajaiban” tersebar ke seluruh Vietnam sebagai kesadaran baru untuk melakukan aksi menentang pemerintah. Setelah kremasi kaum Sangha seolah mendapatkan cara baru untuk menentang pemerintah. Menyadari pola gerakan mereka sebelumnya, kini kaum Sangha berhati-hati dalam melangkah dan memperhatikan momen saat melakukan protes. Skema gerakan ini meluas tidak hanya di Hue, tapi juga di Saigon, Danang, Quang Ngai dan Nhatrang.⁹⁹

⁹⁹*Ibid*, 180.

4.2.2. Jatuhnya Pemerintahan

Sekelompok Buddhis yang dapat menyebabkan huru-hara membingungkan kedutaan besar Amerika, khususnya Frederick B. Nolting. Mereka tidak banyak mengetahui tentang Buddhisme dan Sangha maupun organisasi bentukannya, hingga CIA menyiapkan agen khusus untuk melakukan observasi.

Langkah diplomasi yang dilakukan Trueheart mengejutkan pemerintah. Diem menganggap bahwa konflik dengan Buddhis adalah masalah internal dan inisiatif Trueheart membuatnya marah. Trueheart menyatakan bahwa pemerintahan Kennedy akan sangat kecewa dengan krisis yang terjadi dan berpotensi menghancurkan pola relasi Amerika dan Vietnam yang sudah dibangun selama ini. Tindakan Diem terhadap Buddhis tidak hanya menyinggung diplomasi dengan Amerika tapi juga negara-negara terdekat; Kamboja, Thailand dan khususnya Srilangka.¹⁰⁰

Selepas pemakaman Quang Duc, konflik agama yang dulu berkembang sekarang menjadi konflik politik. Pihak pemerintah yang paling menentang Buddhis adalah Ngo Dinh Nhu. Ia mengubah penggunaan kata “protes” menjadi “pemberontakan” terhadap aksi lanjutan yang dilakukan kaum Sangha. Kemudian, Nhu dan istrinya menyebut aksi bakar diri Quang Duc sebagai “*Buddhist Barbecue*” untuk memicu emosi kaum Sangha. Nhu juga menyebarkan berbagai komentar terhadap aksi lanjutan kaum Sangha. Dalam propagandanya Nhu mencurigai bahwa terdapat faksi perjuangan Komunis Viet Cong di dalam Sangha.¹⁰¹

Sejak awal Presiden Diem menolak nasihat Amerika serta bujukan beberapa bawahannya untuk melakukan konsiliasi dengan kaum Sangha. Nhu dan istrinya tidak sepakat dengan gagasan konsiliasi atau membuat kesepakatan dengan kaum Sangha. Mereka meyakinkan Diem bahwa pihak Buddhis adalah mayoritas yang dipengaruhi oleh Komunis untuk ditunggangi, dengan tujuan menjatuhkan rezim Ngo Dinh Diem.

¹⁰⁰*Ibid*, 181

¹⁰¹*Ibid*, 182.

Pada 16 Juli 1963, 150 biksu dan biksuni berkumpul di depan kediaman Duta Besar Nolting, dan hari berikutnya empat demonstrasi di Saigon dibubarkan secara paksa disertai penutupan pagoda-pagoda. Tujuh hari kemudian para biarawan pagoda Xa Loi mengadakan konferensi pers, mengumumkan bahwa Do Thi Thea akan melakukan aksi bakar diri menentang pemerintahan. Do Thi Thea adalah anggota keluarga kerajaan dan sepupu dari Bao Dai. Dirinya juga ibu dari Bui Hoi, pemimpin ilmuwan-ilmuwan Vietnam serta Duta Besar Vietnam Selatan untuk Timur Tengah.

Pada hari Selasa, 30 Juli 1963, upacara ketujuh dan terakhir untuk memperingati kematian Thich Quang Duc diadakan di pagoda Xa Loi. Upacara tersebut menyita banyak perhatian. Semua pekerja menghentikan kerjanya terutama para pegawai negeri. Hasilnya sungguh mengesankan karena tidak terjadi aksi penangkapan. Di Saigon 12.000 orang mengunjungi pagoda Xa Loi, sedangkan di Hue 15.000 orang berdoa yang mana semuanya tanpa kekerasan.

Pemerintah telah mengizinkan umat Buddha berdoa untuk Thich Quang Duc. Hal ini sesuai dengan rencana Diem untuk memecah-belah kekuatan Sangha. Pemerintah menunggu dan sengajamemperlama realisasi tuntutan. Namun, kaum Sangha memilih untuk bertahan. Pada tahap ini kaum Sangha tidak pernah menyatakan pada publik bahwa akhir dari gerakan mereka adalah kesalahan politik karena diskriminasi agama. Dengan memperpanjang krisis, kaum Sangha yakin kerusuhan sosial yang terus berlanjut akan menghentikan laju pemerintahan. Jika kaum Sangha cukup dapat mengumpulkan dukungan karena hal itu, mereka yakin tentara akan menjadi kekuatan untuk menyingkirkan Diem melalui kudeta. Namun, saat ditanya oleh sejumlah wartawan, mereka mengelak dan menyatakan bahwa kaum Sangha tidak mempunyai tujuan politik dan tidak memihak Amerika maupun Komunis.¹⁰²

Thich Duch Ngiep adalah salah satu wakil golongan muda yang paling dikenal dan menjadi juru bicara kaum Sangha serta Komite AntarSekte. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan Schechter mengenai anggapan Presiden Diem

¹⁰² Schechter, *Ibid*, 194.

bahwa Buddhisme di Vietnam Selatan membantu perjuangan Viet Cong, Duc Ngiep menjawab;

“Communism is politics. Buddhism is not a politics. The leader of politics make war; they have desire and ambitions. The Chinese communist have used clever tactics to win the hearts of the Buddhist. The communist are only oportunist, but we are not made use by anyone. In fact, there is no struggle, only defense—our self defense. We have no struggle with anyone, but we must have our self defense. In the spirit of our self defense, we never find fault with anyone”¹⁰³

[Terjemahan:]Buddhisme bukanlah politik. Pemimpin politik membuat perang; mereka mempunyai hasrat dan ambisi. Pihak Komunis China telah menggunakan taktik cerdas untuk memenangkan hati penganut Buddha. Pihak Komunis hanya oportunist, namun kami (Sangha) tidak digunakan oleh siapapun. Pada kenyataan, tidak ada perjuangan, hanya pertahanan. Kita tidak pernah berjuang denga siapapun, namun kami harus mempertahankan diri. Dalam semangat seperti ini, kami tidak pernah mempersalahkan orang lain”.

Duc Ngiep masih menganggap Diem mampu merubah kondisi. Dia digolongkan dalam kelompok moderat yang memimpin Buddhis awam terkemuka. Kelompok ini awalnya meyakini bahwa Presiden Diem masih mempunyai niat baik dan mengharapkan solusi damai. Mereka selalu meminta perkembangan informasi dari komite investigasi dan bekerjasama sepenuhnya dengan Diem.

Pada minggu terakhir bulan Juli, wakil Presiden Nguyen Ngoc Tho meyakinkan kaum Sangha bahwa pemerintah serius melakukan konsiliasi dan membentuk komite investigasi. Kedutaan besar Amerika secara khusus kepada wartawan menyatakan bahwa semua pihak sekarang sudah di jalurnya. Konsiliasi akan segera dilaksanakan. Namun, tidak ada pihak yang memperhitungkan Madam Nhu. Pada 3 Agustus 1963, ia berada di Saigon untuk memberikan sambutan terhadap ratusan perempuan yang akan memulai pelatihan paramiliter. Dalam sambutannya, ia mengucapkan kata-kata yang mampu merusak proses

¹⁰³ *Ibid*, 195-196.

konsiliasi. Pidato tersebut secara langsung merusak proses konsiliasi yang sedang berlangsung.¹⁰⁴

Pada pertengahan bulan Agustus 1963, Ngo Dinh Nhu mengundang delapan belas Jendral dan Kolonel untuk mengetahui perspektif mereka mengenai krisis dengan Buddhis. Nhu mengatakan bahwa jika pemerintah tidak sanggup menyelesaikan krisis ini, akan terjadi aksi penggulingan oleh militer. Dia berencana untuk membungkam kaum Sangha dan memecah popularitas mereka untuk kemudian beraksi.

Pada Malam hari tanggal 21 Agustus 1963, Nhu merencanakan untuk menyerang kaum Sangha. Tepat tengah malam sekelompok pasukan khusus dibawah komando Letnan Kolonel Le Quang Ty mulai menyebarkan kawat duri di sepanjang gerbang pagoda Xa Loi dan mendobrak pintu Semua biksu dan biksuni dipaksa keluar diiringi dengan tembakan gas air mata. Thich Duc Ngiep dan seluruh biarawan dikumpulkan di lapangan dan dipukuli.

Di lima pagoda lainnya di Saigon berlaku juga hal yang sama, teror brutal dilakukan oleh sekelompok pasukan. Di Hue juga terjadi hal yang sama dengan mengirimkan sejumlah tentara. Saat fajar menjelang 5,000 warga Hue turun ke jalan melakukan aksi protes, kali ini tidak ada suara tembakan namun pasukan memukul warga dengan senapan, banyak dari mereka yang ditangkap. Dimanapun di Vietnam terjadi aksi protes, di Danang, Quinhon dan Quangtri. Di manapun umat Buddhis berbaris protes, di sana pasti ada penangkapan.

Di tengah kerusuhan yang sedang berlangsung, Presiden Diem menyatakan status negara dalam keadaan berperang melalui radio, dia menyatakan “kepada seluruh tentara Republik Vietnam, tanggung jawab untuk mengambil semua langkah penting diperlukan untuk menentukan terjaminnya keamanan negara dari ancaman Komunis dan terjaganya Demokrasi”.Kaum Sangha dan masyarakat merasa bahwa pemerintah telah melakukan proses

¹⁰⁴Madam Nhu bertanggungjawab atas pembentukan Peraturan Keluarga pada bulan Januari, 1959. Dia menegaskan aturan keras serta hukuman penjara bagi siapapun yang melakukan tindakan poligami, kumpul kebo, perceraian yang seharusnya diputuskan hanya oleh Presiden melalui Inpres atau Dekrit. Lihat Schechter, 197.

“konsultasi secara ekstrem”. Kaum Sangha Muda merasa kecewa dengan harapan mereka, karena pemerintah tidak bisa melalui proses secara perlahan.

Dalam tahap ini, kaum Sangha mencapai suatu titik transisi. Mereka tidak mewakili kekuatan untuk mengubah atau menjadi unsur pendukung revolusi dengan ideologi tertentu. Mereka juga tidak menyokong restorasi sistem pemerintahan Mandarin yang sudah tua atau mendesak agar beralih kepada bentuk negara agama. Semua yang mereka lakukan merupakan kumpulan respon terhadap kebijakan serta tindakan pemerintahan Ngo Dinh Diem, meskipun aksi mereka tergolong politis. Setelah organisasi Buddhis dibubarkan oleh Nhu pada tanggal 21 Agustus 1963, dan hukum darurat perang ditetapkan, kaum Sangha tetap melakukan aksi bawah tanah. Aksi bakar diri dan penyiksaan diri masih terjadi untuk menarik perhatian pihak penentang Buddhis. Gerakan Buddhis yang tidak terorganisasi dan tidak terprogram menitikberatkan aksinya terhadap pemerintahan.



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Gambar 4.5.
Barisan Tank Memasuki Istana Presiden

Diem dan Nhu melakukan aksi terakhir mereka untuk mempertahankan kekuasaan yang berujung pada ketegangan hingga memaksa munculnya aksi kudeta pada November 1963. Mereka berdua ditemukan tewas mengenaskan di

dalam kendaraan tentara, terbunuh dalam konspirasi militer pada 1 November 1963. Selepas kudeta terhadap pemerintahan Ngo Dinh Diem, banyak sekali analisis muncul mengenai penyebabnya. Dari semua analisis, krisis yang disebabkan karena diskriminasi agama yang paling banyak dianggap sebagai faktor penting kejatuhan Diem. Meskipun tidak memberikan dampak secara langsung tanpa bantuan tentara dan Amerika, kaum Sangha dianggap sebagai katalis kudeta. Melalui surat kabar, terutama berita mengenai aksi bakar diri Thich Quang Duc, kaum Sangha mendapatkan simpati sekaligus membentuk opini publik tentang pemerintahan Ngo Dinh Diem.

Jika dirunut sejak awal, proses kejatuhan Diem dapat dimulai sejak Amerika menegaskan komitmennya membantu Diem dalam pemerintahan barunya. Saat Wakil Presiden Amerika, Lyndon B. Johnson mengunjungi Asia pada bulan Mei 1961, Vietnam Selatan mulai mendapatkan bantuan pertama. Diem dianggap sebagai Churchill Asia yang akan melenyapkan pengaruh Komunisme. Namun pada kenyataannya, kudeta terhadap Diem sudah direncanakan sejak 1960, namun tidak ada satu pun tokoh militer: pemimpin kudeta dari dewan jenderal, Duong Van Minh; dan dari dewan kolonel, Pham Ngoc Tho, yang akan mengambil langkah tanpa persetujuan Amerika.

Pada bulan November 1963, krisis akibat diskriminasi terhadap Buddhis makin melemahkan posisi Diem, membuat militer yakin bahwa Amerika akan segera memutuskan dengan segera kudeta. CIA memahami para jenderal dengan sangat baik, dan melaporkan kepada mereka bahwa Amerika siap berperang melawan komunis dan mereka akan mendukung setiap usaha menuju reformasi sosial yang gagal dilaksanakan Diem. Laporan tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi para Jenderal untuk melakukan kudeta.

4.3. Kesadaran Baru dalam Gerakan Kaum Sangha

Setelah kudeta, Tri Quang dan pemimpin organisasi Buddhis lainnya menyadari bahwa meskipun mereka dapat menyelenggarakan kekuatan yang sangat besar, mereka tidak terorganisasi dan sejalan dengan pemerintah. Tanpa pendidikan modern dan sekuler para biksu dapat berguna bagi pemerintah, dan

mereka tidak ingin bertanggungjawab terhadapnya. Namun mereka tidak ingin kekuasaan seperti yang diberikan Diem pada gereja Katolik. Mereka menginginkan aspirasi Sangha didengar oleh pemerintah dan ingin menjadi penasihatnya. Mereka ingin mendapatkan perlindungan penuh dari negara atas kebebasan beragama.¹⁰⁵

Kejatuhan Diem berpengaruh terhadap kekuasaan kaum Sangha dan membuat mereka sebagai kekuatan besar di Vietnam, namun tetap di belakang tentara dan Viet Cong. Kaum Sangha mulai berbenah, karena sekedar gerakan massa untuk menjatuhkan Diem tidak efektif lagi setelahnya. Dibutuhkan jenis organisasi baru dengan program politik. Mereka berhasil membangkitkan potensi laten Buddhisme dan sekarang dibutuhkan lebih dari pendekatan tradisional untuk membuat ajaran itu tetap hidup.

Selepas kudeta pihak militer berdamai dengan kaum Sangha dan memenangkan hati mereka. Oleh karena itu pemerintahan baru menyetujui rencana kaum Sangha untuk mengadakan Kongres Reunifikasi Buddhis Vietnam pada 21 Desember 1963 hingga 3 Januari 1964 di pagoda Xa Loi. Kongres tersebut masuk dalam sejarah penting dalam sejarah Buddhism di Vietnam karena menjadi tonggak persatuan kaum Sangha aliran Mahayana di Selatan dengan Theravada yang banyak tersebar di sekitar perbatasan Vietnam ke dalam Perkumpulan Buddhis Bersatu (*United Buddhist Association*).

Kongres kemudian membuat sejumlah organisasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan menciptakan hierarki dalam Sangha dengan tugas-tugas politik. Semua kegiatan organisasi seakan-akan ditujukan kepada Dharma, namun kegiatan dan isi organisasi adalah murni sosial dan politik. Gerakan Buddhis yang baru bersifat nasionalis dan tidak dipengaruhi faktor asing. Langkah pertama Perkumpulan Buddhis Bersatu adalah pembentukan Lembaga Urusan Agama dengan sekretaris jenderal dijabat oleh Thich Tri Quang dengan wewenang yang setara dengan gubernur provinsi; memberikan rancangan kebijakan baru dan arahan terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian pembentukan Lembaga Penyebaran Dharma dengan Thich Tam Chau sebagai ketuanya, dengan wewenang

¹⁰⁵Schechter, *Ibid*, 203.

setara perdana menteri; mengontrol hierarki dalam Sangha di berbagai wilayah. Lembaga Penyebaran Dharma mempunyai perwakilan di semua provinsi dan distrik, dan berencana memperluas penyebaran hingga ke pelosok. Tham Chau mengembangkan rencana elaborasi mengkoordinasi keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar pemukiman komunis. Unit keluarga tersebut akan berperan sebagai inti organisasi kecil Buddhis di wilayah pedesaan yang fungsinya melakukan agitasi dan aksi politik.¹⁰⁶

Di bawah Lembaga Penyebaran Dharma terdapat enam komisi yang dipimpin enam orang berpengaruh. Tiap komisi membidangi beberapa bagian; umat, hubungan kebudayaan, ritual keagamaan, keuangan dan pemulihan, urusan sekuler, dan kepemudaan.

Di bawah rezim Nguyen Van Khanh, setelah berhasil menggulingkan Duong Van Minh pada 3 Januari 1964, kaum Sangha diberikan tanah yang berada di pinggiran Saigon untuk pendirian organisasi mereka. Pada masa Van Khanh Buddhis juga dijamin merayakan upacara keagamaan. Pada peringatan Waisak ke 2.508, kaum Sangha menyatakan sebagai kekuatan yang independen di Vietnam. Di Saigon pada 26 Mei 1964, lebih dari 200,000 orang berkumpul memenuhi jalanan untuk merayakan festival matahari dengan parade: beberapa pejabat mengatakan bahwa kerumunan saat itu adalah yang terbesar sejak empat belas tahun terakhir. Jenderal Nguyen Van Khanh dan Duta Besar Amerika, Henry Cabot Lodge hadir dalam perayaan yang diadakan di sepanjang sungai Saigon itu. Perayaan tersebut menandai pertama kalinya dalam sepuluh tahun umat Buddha dapat mengibarkan benderanya tanpa perasaan takut terhadap pemerintah.

¹⁰⁶ Schechter, *Ibid*, 205.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang sejak awal dikemukakan: pertama, bagaimana Buddhisme dan Sangha menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat Vietnam. Kedua, Bagaimana perspektif dan tindakan Kaum Sangha terhadap presiden Ngo Dinh Diem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama: Vietnam merupakan negara dengan mayoritas penganut ajaran Buddha aliran Mahayana. Buddhisme di negara ini sejak lampau dikenal sebagai agama negara dan dekat dengan penguasa. Sepanjang sejarahnya Buddhisme juga dikenal dengan sifatnya yang mudah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru serta konteks zaman yang berubah. Sangha atau komunitas biarawan dan awam mempunyai peran penting untuk membuat Buddhisme tetap bertahan dalam berbagai perubahan tersebut. Meskipun menurut hemat penulis perubahan dalam Buddhisme di Vietnam lebih cenderung dipicu oleh faktor dari luar. Pertama, dengan kehadiran unsur asing di Vietnam yang memaksa kaum Sangha untuk beradaptasi. Kedua, mencari model pembaharuan yang sesuai dari luar.

Tujuan pembaharuan dalam Buddhisme ialah penyesuaian bentuk ajaran dan manifestasi gerakan yang lebih nyata di dalam masyarakat dengan acuan kondisi masa lampau. Namun kondisi saat itu tidak menunjukkan bahwa Buddhisme di Vietnam mendapatkan kemudahan dari penguasa seperti pada masa keemasannya dulu. Kaum Sangha, baik biarawan dan awam, sangat menyadari bahwa model gerakan mereka sudah mendapatkan saingan semenjak pihak kolonial membawa bentuk kebudayaan baru yang mengubah kebudayaan di Vietnam. Masuknya agama Katolik merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang menyumbangkan prinsip dasar organisasi dalam modernisasi Vietnam. Bagaimanapun harus diakui bahwa Buddhisme di Vietnam tidak terorganisasi, terbukti dengan adanya perbedaan aliran-aliran, meskipun masih dalam doktrin

Mahayana, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai sikap terhadap pihak asing.

Dengan munculnya gagasan pembaharuan Buddhisme dari China, kaum Sangha Vietnam mendapatkan model pembaharuan yang sesuai di negerinya. Pembaharuan Buddhisme di Vietnam berkembang cukup pesat, ditandai dengan dukungan pemerintahan kolonial Perancis, bahkan Jepang yang hanya sesaat, terhadap berbagai perkumpulan Buddhis. Perkembangan Buddhisme juga ditandai dengan meluasnya berbagai tulisan bertemakan Buddhisme yang sudah ditulis dalam aksara Vietnam, *Quoc Ngu*. Sekolah-sekolah serta beasiswa juga meningkat jumlahnya untuk menyokong misi penyebaran Buddhisme atau *propagate the faith of Buddhism*. Boleh dikatakan bahwa kaum Sangha telah mendapatkan kembali popularitasnya kembali pada masa pemerintahan kolonial, meskipun mereka tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyingkirkan pihak asing dari Vietnam. Pun mereka mengalami dilemma mengenai unsur “asing” yang tersemat juga dalam ideologi partai Komunis.

Situasi politik pasca kesepakatan Geneva di tahun 1954 membawa dampak yang merugikan bagi misi pembaharuan Buddhisme di Vietnam, namun mendapat dukungan dari masyarakat pedesaan. Jaringan Sangha yang semula terjalin, terputus karena dibaginya Vietnam menjadi dua, Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh sebagai Presidennya, dan berhaluan Komunis. Sedangkan Vietnam Selatan, dari raja Bao Dai beralih kepada Ngo Dinh Diem sebagai presiden, menandai berakhirnya monarki di Vietnam. Kedua pemimpin tersebut menerapkan politik represif terhadap kegiatan beragama. Politik identitas menjadi penting begitu juga di mana seseorang berafiliasi. Buddhisme menjadi alternatif bagi masyarakat yang dilematis terhadap Komunisme dan Demokratisme. Banyak dari pendukung Buddhisme berasal dari masyarakat pedesaan yang buta politik. Sedangkan Vietnam Selatan adalah alternatif kedua untuk mereka yang memilih haluan Demokrasi, meskipun dalam versi Ngo Dinh Diem.

Kedua; arus pengungsi dari Vietnam Utara menuju Vietnam Selatan menandai awal mula perselisihan antara Ngo Dinh Diem dan Buddhisme.

Konsolidasi dilakukan Diem dengan merekrut pengungsi, terutama yang beragama Katolik, menjadi bagian dalam pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Ngo Dinh Diem terjadi berbagai bentuk pelanggaran: dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu besar, sistem pemerintahan yang dibangun atas politik keluarga, kebijakan keamanan represif, hingga politik diskriminasi. Akomodasi yang lebih baik diberikan jika seseorang menganut agama Katolik.

Dalam perspektif kaum Sangha, pemerintahan Ngo Dinh Diem dicitrakan sebagai Presiden yang tidak mengerti demokrasi. Bahkan ia jelas melanggar konstitusi yang disahkan pemerintahannya di tahun 1956, yakni pasal 17, mengenai hak kebebasan melaksanakan ibadah dan dianggap setara di depan hukum bagi semua agama.

Puncak kekesalan Sangha dimulai saat upacara Waisak ke 2587 di Hue, saat pemerintah mengeluarkan dekrit tentang pelarangan pengibaran bendera selain milik pemerintah. Protes tersebut membawa hasil yang luarbiasa dalam penjatuhan popularitas pemerintah, tidak saja di masyarakat Vietnam, tapi juga di kalangan militer dan sponsor utamanya, Amerika Serikat. Puluhan orang terluka dan beberapa orang tewas dalam kerusuhan yang dinyatakan Diem merupakan konspirasi sangha dan Viet Cong. Ngo Dinh Nhu dan istrinya mengusulkan agar Diem menolak usulan konsiliasi dengan Sangha yang diajukan Amerika maupun penasihat dalam pemerintahannya.

Kekecewaan beragama silih berganti menjadi krisis politik saat aksi bakar diri yang dilakukan biksu Thich Quang Duc di Saigon memicu aksi protes di seluruh Vietnam. Pemerintah beberapa kali menolak proses konsiliasi dengan kaum Sangha untuk menenangkan keadaan. Ngo Dinh Nhu sebagai pimpinan Pasukan Khusus mengutus anggotanya melakukan penyerangan malam hari pagoda dan biara-biara di Vietnam Selatan. Di akhir bulan Agustus 1963, Nhu berhasil menangkap hampir dari semua biksu dan pelajar. Aksi protes yang terjadi kemudian makin bergejolak. Kekuatan baru muncul untuk menentang pemerintah. Krisis yang terus terjadi tanpa ada konsiliasi perlahan meruntuhkan struktur pemerintahan dan merusak relasi dengan Amerika Serikat. Presiden Kennedy menyatakan secara umum bahwa diperlukan penggantian rezim di Saigon.

Bantuan Amerika untuk Pasukan Khusus dihentikan Amerika, sekaligus menjadi pertanda bagi para jenderal untuk melancarkan kudeta yang sudah dirancang beberapa bulan sebelumnya. Pada 2 November 1963, tentara junta yang dipimpin oleh Duong Vanh Minh melancarkan kudeta dan berhasil membunuh Presiden Ngo Dinh Diem dan saudaranya Ngo Dinh Nhu.

Selepas kudeta muncul kesadaran baru dalam arah gerakan kaum Sangha. Mereka tidak mewakili kekuatan untuk merubah atau menjadi unsur pendukung revolusi dengan ideologi tertentu. Mereka juga tidak menyokong restorasi sistem pemerintahan Mandarin yang sudah tua atau mendesak agar beralih kepada bentuk negara agama. Kejatuhan Diem berpengaruh terhadap aktifitas kaum Sangha, yang membawa mereka sebagai kekuatan besar di Vietnam, walaupun tetap di belakang tentara dan Viet Cong. Kaum Sangha mulai berbenah, karena sekedar gerakan massa tidak efektif lagi setelahnya. Selepas kudeta, konflik di Vietnam makin memanas, dibutuhkan jenis organisasi baru dengan program politik. Pemerintahan Diem menurut hemat penulis berhasil membangkitkan potensi laten Buddhisme, kemudian dibutuhkan lebih dari pendekatan tradisional seperti penyebaran ajaran Buddhisme lewat biara, namun lebih aktif dengan pembentukan organisasi massa dan politik untuk membuat ajaran tetap hidup. Bahkan di awal tahun 1964, mulai dibentuk suatu organisasi bagi biksu perang yang bertugas menyertai pasukan di medan laga. Semua hal tersebut dilakukan dengan tujuan membuat ajaran Buddhisme tetap hidup di dalam hati masyarakat Vietnam.

BIBLIOGRAFI

Daftar Pustaka

Buku

- Bleeker, C.J. *Pertemuan Agama-Agama Dunia*, cetakan kedua, Bandung: Penerbitan Vorkink-Van Hoeve, 1973.
- Christie, Clive. *Ideology and Revolution In Southeast Asia 1900-1980: Political Ideas of the Anti-Colonial Era*. Great Britain, England: Curzon Press, 2001.
- Crick, Bernard. *Sosialisme*. Terjemahan dari “ *Concept in Social Thought Socialism*”. Surabaya: Pustaka Prometheus, 2001.
- Danusaputro, St. Munadjat. *Vietnam dalam Perkembangan Astra-Jaya*, cetakan pertama, Bandung: Penerbit Binacipta, 1983.
- Duncanson, Dennis J. *Government and Revolution in Vietnam*. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs, Oxford University Press, New York and London, 1968.
- Fall, Bernard B. *Vietnam Witness 1953-1966*. London: Pall Mall Press, 1966.
- Freedman, Lawrence. *Kennedy's Wars: Berlin, Cuba, Laos and Vietnam*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Halberstam, David. *The Making of Quagmire: America and Vietnam During the Kennedy Era*, Revised Edition, United States: Alfred A. Knopf, Inc, 1988.
- Hanh, Thich Nhat. *The Lotus in the Sea of Fire: The Buddhist Story*, edisi pertama, London: SCM Press., Ltd, 1967.
- Humhreys, Christmas. *The Buddhist Way of Life*, New York; Schocken Books, 1969.
- Ikeda, Daisaku. *Buddhisme: Falsafah Hidup*, cetakan pertama, (terjemahan), Jakarta: Pt. Indira dan Intermasa, 1988.

- Kahin, George McTurnan, (Ed.). *Governments and Politics of Southeast Asia*, first edition, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1959.
- Kohn, Hans. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, (Terjemahan), Cetakan keempat, Jakarta: Pt. Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984.
- Lanternari, Vittorio. *Religion of The Oppressed: a Study of Modern Messianic Cults*, Diterjemahkan dari bahasa Italia oleh Lisa Sergio. A Mentor Book; The New American Library, 1965.
- Newman, Bernard. *Background to Vietnam; From the Japanese Puppet Emperor Bao-Dai to the Viet-Cong's Ho Chi Minh*, New York: Signet Books, 1966.
- Prebish, Charles E dan Stephen Heine, (Ed.). *Buddhism in the Modern World: Adaptation of an Ancient Tradition*. United Kingdom: Oxford University Press, 2003.
- Salisbury, Harrison. *Perang Mendatang Antara Rusia dan R.R.T*, Jakarta: P.T. Kinta, 1971.
- Schechter, Jerrold. *The New Face of Buddha: Buddhism and Political Power in Southeast Asia*, New York: Coward-McCann, Inc, 1967.
- Singh, Lalita Prasad. *Power Politic and Southesat Asia*, New Delhi: Radiant Publisher, 1979.
- Tarling, Nicholas (Ed.). *The Cambridge History of Southeast Asia: The Nineteenth and Twentieth Centuries*, Volume II, New York: Cambridge University Press, 1994.
- Tarling, Nicholas. *Nationalism in Southeast Asia: If the People are with US*. New York; Routledge Curzon, 2004.
- Halberstam, David. *The Making of Quagmire; American and Vietnam During the Kennedy Era*. Revised Edition, Alfred A. Knopf, Inc. New York, 1988.
- Hickey, Gerald Cannon. *Village in Vietnam*. New Haven and London; Yale University Press, 1964.

John, Howard. *Death of a Generation: How the Assassinations of Diem and JFK Prolonged the Vietnam War*. Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, 2003.

Reid, Anthony. *Dari Ekspansi Hingga Krisis : Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 – 1680, jilid 2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Spencer, Robert F, (Ed.). *Religion and Change in Contemporary Asia*. United Kingdom; Oxford University Press, 1971.

Suzuki, D.T. *Outlines of Mahayana Buddhism*, cetakan ke-4. New York; Schocken Books. Inc, 1970.

Swearer, Donald K. *Buddhism in Transtition*, Philadelphia, Pennsylvania; The Wesminster Press, 1969.

Thu, Nguyen Tai, (et.al). *The History of Buddhism in Vietnam*. Institute of Philosophy, Vietnamese Academy Social Sciences, United States; The Councilfor Research in Values and Philosophy, 2008.

Monograf

Hanh, Maj. Gen. Nguyen Duy and Brig. Gen. Tranh Dinh Tho. The South Vietnam Society: Indochinese Monograph. U.S. Army Center of Military History; Washington, D.C.

Jurnal Ilmiah

(Diakses dari Jurnal On-Line Digital www.jstor.org / JSTOR Journal Online)

Berger, Mark T. Decolonisation, Modernisation and Nation-Building: Political Development Theory and the Appeal of Communism in Southeast Asia, 1945-1975, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 34, No. 3 (Oktober., 2003), pp. 421-448 Cambridge University Press on behalf of Department of History, National University of Singapore, diakses 28/09/2009 15.39 WIB

- Devido, Elise Anne. "The Influence of Chinese Master Tai Xu on Buddhism in Vietnam." *Journal of Global Buddhism*, 10, 2009, 413-458
- Donnel, John C. "National Renovation Campaigns in Vietnam" *Pacific Affairs*, Vol. 32, No. 1 (Mar., 1959), hlm. 73-88, dipublikasikan oleh University of British Columbia, diakses pada 28/06/2009, 01:47 wib
- Heine-Geldern, Robert. "Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara" terj. Deliar Noer. Jakarta; CV. Rajawali, 1982
- Moyar, Mark, "Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War", *Modern Asian Studies* 38, 4 (2004), hlm. 749-784, 2004, dipublikasikan oleh University of Cambridge
- Houtart, Francois, "Buddhism and Politics in South-East Asia: Part One", *Social Scientist*, Vol. 5, No. 3 (Oktober., 1976), hlm. 3-23
- Houtart, Francois, "Buddhism and Politics in South-East Asia: Part Two", *Social Scientist*, Vol. 5, No. 4 (November., 1976), hal. 30-45
- Kitagawa, Joseph M, "Buddhism and Asian Politics", *Asian Survey*, Vol. 2, No. 5 (Juli., 1962), hlm. 1-11, dipublikasikan oleh University of California Press
- McLeod, Mark W. "Nationalism and Religion in Vietnam: Phan Boi Chau and the Catholic Question." *The International History Review*, Vol. 14, No. 4, hlm. 661-680, diakses 07/09/2009, 01.01 wib
- Mus, Paul. "Buddhism and World Order". *Daedalus*, Vol. 95, No. 3, Tradition and Change, hlm 813-817, diakses pada 28/09/2009, 04.55 wib
- Puligandla, R dan K. Pudhukka, "Buddhism and Revolution", *Philosophy East and West*, Vol. 20, No. 4 (Oktober., 1970), hal. 345-354, dipublikasikan oleh University of Hawai'i Press
- Scigliano, Robert, "Vietnam: Politics and Religion", *Asian Survey*, Vol. 4, No. 1, A Survey of Asia in 1963: part I (Januari., 1964), hlm. 666-673, dipublikasikan oleh University of California Press

Seneviratne, H. L. "Buddhist Monks and Ethnic Politics: A War Zone in an Island Paradise." *Anthropology Today*, Vol. 17, No. 2 (Apr., 2001), pp. 15-21. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, diakses 30/10/2009 14.36 wib

Saunders, Kenneth J. "Buddhism in China: A Historical Sketch." *The Journal of Religion*, Vol. 3, No.3 (May,1923), pp.256-275, The University of Chicago Press diakses 28/09/2009 16:40wib

Fishel, Wesley R. "Political Realities in Vietnam." *Asian Survey*, Vol. 1, No. 2 (Apr., 1961), hlm. 15-23 Published by: University of California Press

Tambiah, S.J. "The Buddhist Conception of Kingship and its Historical Manifestations: A reply to Spiro." *The Journal of Asian Studies*. Vol. 37, No. 4, hlm. 801-809. Diakses 28/09/2009 04:43wib

(Diakses dari [www.vietnam.ttu.edu/Vietnam Virtual Archive](http://www.vietnam.ttu.edu/VietnamVirtualArchive))

Nguyen The Anh. "Buddhism and Vietnamese Society Throughout History". 1993

_____, Notes on Strategic Hamlet, Office of Rural Affairs, USOM, Saigon, 15 Agustus 1963

Daftar Dokumen Terpublikasi

Ran, Lee Chi. "World Peace Movement Through WFB Activities and Engagement", 2007

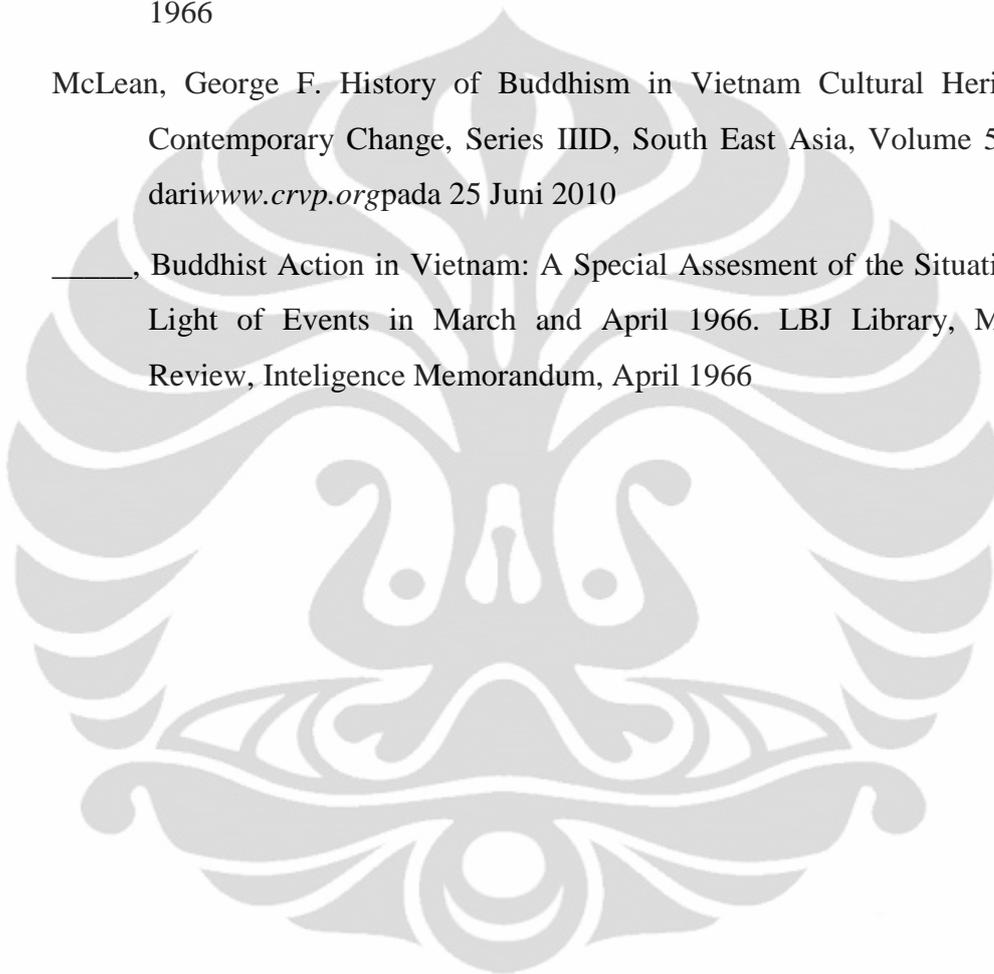
Cammeron, Allan W, "*Vietnam Crisis: a Documentary History*," *Volume I ; 1940-1956*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1971

Topmiller, Robert. *"The Buddhist Crisis of 1964."* Western Conference of the Association for Asian Studies. Selected Papers in Asia Studies, Paper No. 58. 1996

_____, *"Thich Tri Quang and Buddhist Political Objectives in South Vietnam"* LBJ Library, Mandatory Review, Intelligence Memorandum, 20 April 1966

McLean, George F. History of Buddhism in Vietnam Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IIID, South East Asia, Volume 5, diakses dari www.crvp.org pada 25 Juni 2010

_____, *Buddhist Action in Vietnam: A Special Assesment of the Situation in the Light of Events in March and April 1966.* LBJ Library, Mandatory Review, Intelligence Memorandum, April 1966

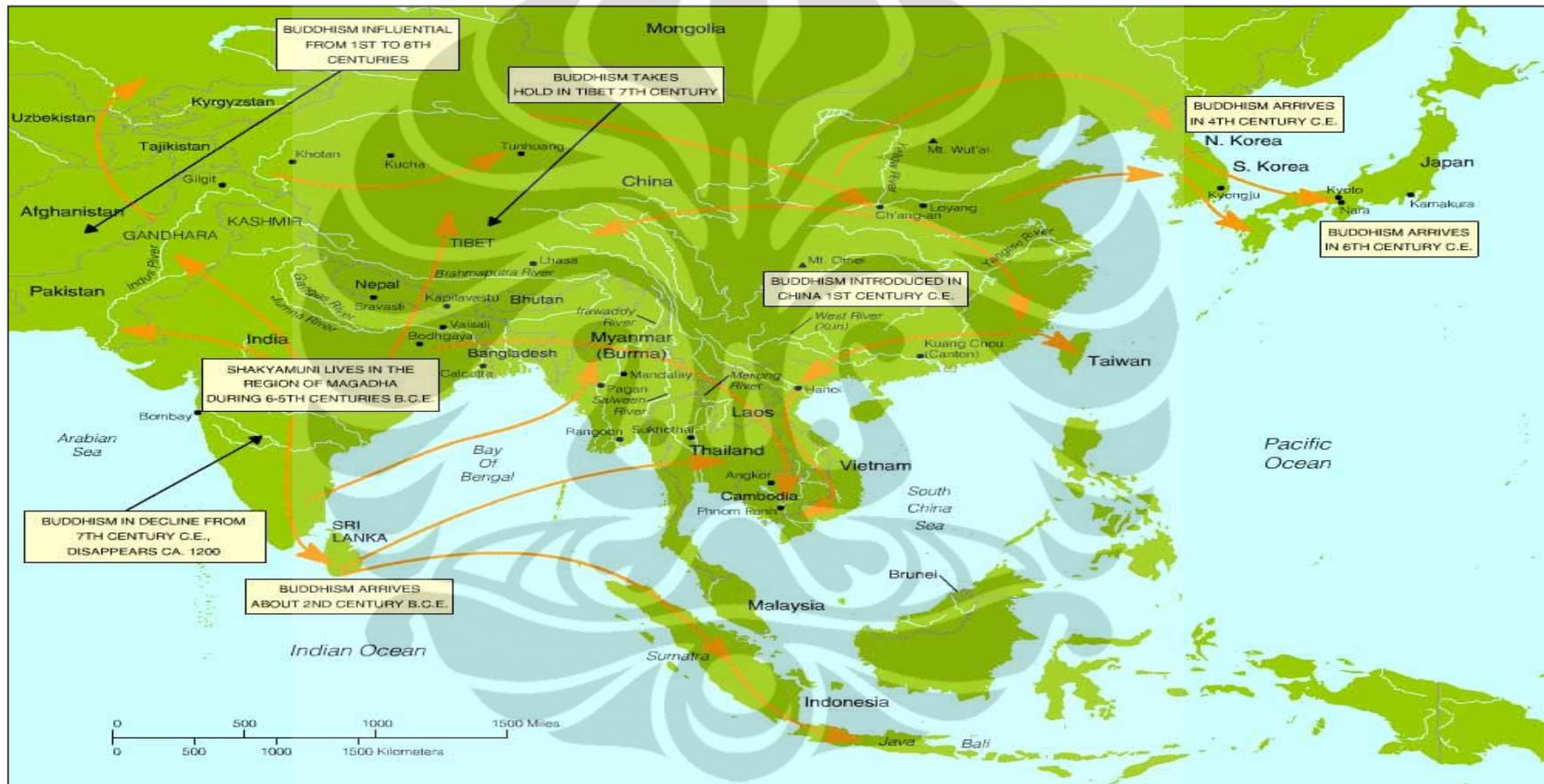


LAMPIRAN-LAMPIRAN



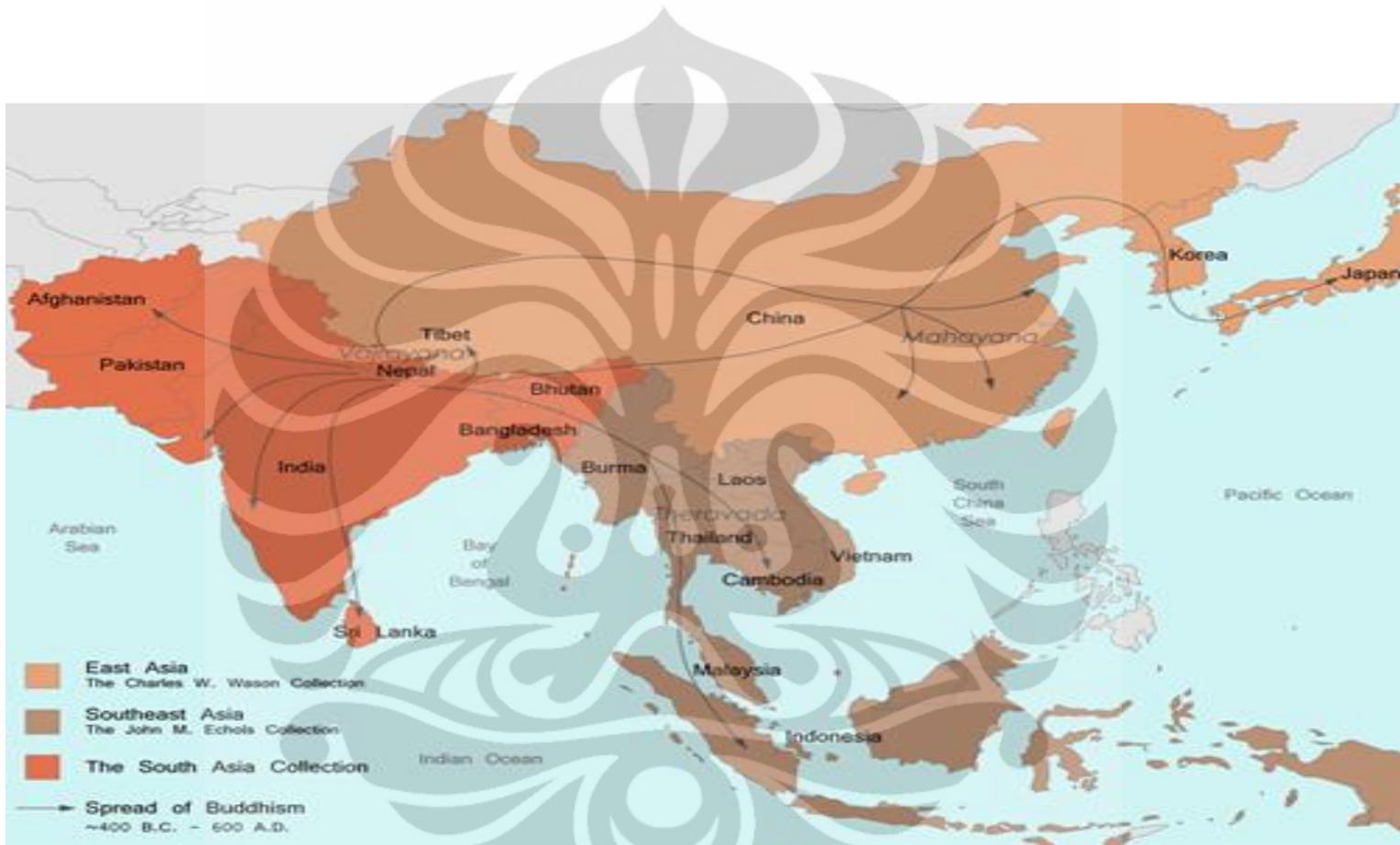
Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Lampiran 2.1. Peta Vietnam



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Lampiran 2.2.
Peta Persebaran Ajaran Buddhisme I



Sumber <http://www.flickr.com>, telah dikelola kembali

Lampiran 2.3. Peta Persebaran Ajaran Buddhisme II



Lampiran 2.4. Tai Xu, Tokoh Pembaharu Buddhisme China



Lampiran 4.4. Monumen Thich Quang Duc



Lampiran 3.1. Ngo Dinh Nhu



Lampiran 3.2. Maddame Nhu

OUTGOING TELEGRAM Department of State

INDICATE: COLLECT
 CHARGE TO

~~TOP SECRET~~

Initial telegram 3
cleared by persons
listed below
BIC 5

M

Origin

SS

Index

ACTION: AmEmbassy SAIGON - OPERATIONAL IMMEDIATE AUG 24 9 36 PM '63
243

EYES ONLY - AMBASSADOR LODGE
FOR CINCPAC/POLAD EXCLUSIVE FOR ADMIRAL FELT
NO FURTHER DISTRIBUTION

019

~~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK~~

Re CAS Saigon 0265 reporting General Don's views; Saigon 320, ~~and~~ Saigon 316, and Saigon 329.

It is now clear that whether military proposed martial law or whether Nhu tricked them into it, Nhu took advantage of its imposition to smash pagodas with police and Tung's Special Forces loyal to him, thus placing onus on military in eyes of world and Vietnamese people. Also clear that Nhu has maneuvered himself into commanding position.

US Government cannot tolerate situation in which power lies in Nhu's hands. Diem must be given chance to rid himself of Nhu and his coterie and replace them with best military and political personalities available.

If, in spite of all of your efforts, Diem remains obdurate

Drafted by:

FE:RHilsman:ml 8/24/63

Telegraphic transmission and

classification approved by:

M - W. Averell Harriman

Clearence:

FE - Mr. Hilsman

WH - Mr. Forrestal

U - Mr. Ball

S/S-O - Mr. ~~KKKKKKK~~ Getsinger

REPRODUCTION FROM THIS COPY IS PROHIBITED UNLESS "UNCLASSIFIED".

~~TOP SECRET~~

DECLASSIFIED

Committee Print

ED. 11222, 11222, 11222, 11222 (E)

MFO

10/21/75

FORM 5-63 DS-322

~~TOP SECRET~~

and refuses, then we must face the possibility that Diem himself cannot be preserved.

We now believe immediate action must be taken to prevent Nhu from consolidating his position further. Therefore, unless you in consultation with Harkins perceive overriding objections you are authorized to proceed along following lines:

(1) First, we must press on appropriate levels of GVN following line:

(a) USG cannot accept actions against Buddhists taken by Nhu and his collaborators under cover martial law.

(b) Prompt dramatic actions redress situation must be taken, including repeal of decree 10, release of arrested monks, nuns, etc.

(2) We must at same time also tell key military leaders that US would find it impossible to continue support GVN militarily and economically unless above steps are taken immediately which we recognize requires removal of the Nhus from the scene. We wish give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but if he remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious implication that we can no longer support Diem. You may also tell appropriate military commanders we will give them direct support in any interim period of breakdown central government mechanism.

~~TOP SECRET~~

~~TOP SECRET~~

(3) We recognize the necessity of removing taint on military for pagoda raids and placing blame squarely on Nhu. You are authorized to have such statements made in Saigon as you consider desirable to achieve this objective. We are prepared to have Voice of America make statement along lines contained in next numbered telegram whenever you give the word, preferably as soon as possible.

Concurrently with above, Ambassador and country team should urgently examine all possible alternative leadership and make detailed plans as to how we might bring about Diem's replacement if this should become necessary.

Assume you will consult with General Harkins re any precautions necessary protect American personnel during crisis period.

You will understand that we cannot from Washington give you detailed instructions as to how this operation should proceed, but you will also know we will back you to the hilt on actions you take to achieve our objectives.

Needless to say we have held knowledge of this telegram to minimum essential people and assume you will take similar precautions to prevent premature ~~leaks~~ ~~leaks~~.

GI-2,

END.

BALL

~~TOP SECRET~~

UNCLASSIFIED

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF BUDDHIST PAGODAS SOUTH VIETNAM 1963

I. Central Vietnam Lowlands Region

<u>Province</u>	<u>Pagodas</u>
Quang Tri	176
Thua Thien (plus city of Hue)	408
Quang Nam	214
Quang Tin	54
Quang Ngai	215
Binh Dinh	297
Phu Yen	154
Khanh Hoa	124
Ninh Thuan	85
Binh Thuan	96
<u>Principal Cities</u>	
Danang	36
	<u>1857</u>

II. Central Vietnam Highlands Region

<u>Province</u>	<u>Pagodas</u>
Kontum	12
Pleiku	26
Phu Bon	5
Darlac	33
Quang Duc	6
Tuyen Duc	13
Lam Dong	10
<u>Principal Cities</u>	
Dalat	15
Total	<u>120</u>

III. South Vietnam East Region

<u>Province</u>	<u>Pogodas</u>
Phuoc Long	5
Binh Long	31
Tay Ninh	67
Binh Duong	105
Phuoc Thanh	9
Long Khanh	17
Binh Tuy	18
Phuoc Tuy	81
Bien Hoa	102
Gia Dinh	246
<u>Principal Cities</u>	
Saigon	180
Total	<u>861</u>

IV. South Vietnam West Region

<u>Province</u>	<u>Pogodas</u>
Long An	179
Kien Tuong	15
Dinh Tuong	283
Kien Hoa	121
Vinh Binh	249
Vinh Long	223
Kien Phong	60
An Giang	313
Phong Dinh	113
Ba Xuyen	170
An Xuyen	55
Chuong Thien	60
Kien Giang	84
Con Son	3
Total	<u>1,928</u>

Grand Total: 4,766

Source: Vietnam Press, Times of Vietnam, June 16, 1963

UNCLASSIFIED



Geographic Distribution of Buddhist Pagodas, South Vietnam, 1953

(Unpublished)